



2024

Laporan Kinerja (LKj)
Perwakilan Republik Indonesia

**KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
VANIMO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga *Laporan Kinerja (LKJ) KRI Vanimo Tahun 2024* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai garda depan diplomasi Republik Indonesia di wilayah perbatasan, KRI Vanimo berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua, Indonesia dan didominasi oleh kondisi geografis berupa hutan tropis membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam mengelola isu-isu perbatasan dan dinamika hubungan bilateral. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait pelaksanaan tugas serta kondisi wilayah kerja KRI Vanimo sepanjang tahun 2024.

Dokumen ini dirancang untuk menyajikan informasi yang seakurat mungkin dan dapat diandalkan, yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan diplomasi Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas substansi dan penyajian data dalam laporan ini.

Semoga *Laporan Kinerja (LKJ) KRI Vanimo Tahun 2024* ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Papua Nugini, serta memperluas pengaruh Indonesia melalui pendekatan diplomasi yang lebih terintegrasi terutama di wilayah perbatasan RI-PNG.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Kepala Perwakilan RI



Tangkuman Alexander Immanuel

Konsul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN.....	9
I.1. Latar Belakang.....	9
I.2. Tugas dan Fungsi.....	9
I.3. Struktur Organisasi	10
I.4. Aspek Strategis Organisasi	12
I.5. Isu-Isu Strategis.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
II.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 KRI Vanimo	15
II.2. Penetapan Kinerja KRI Vanimo Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
III.1. Capaian Kinerja KRI Vanimo	20
III.2. Stakeholder Perspective	23
III.2.1. S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal	23
III.2.2. Analisis S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	24
III.2.3. Analisis S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	37
III.2.4. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	47
III.2.5 S2 Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang meningkat	58
III.2.6. Analisis S2.1 Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo	58
III.3. Customer Perspective	79
III.3.1. C1 Pelindungan dan Pelayanan Publik KRI Vanimo	79
III.3.2. Analisis C1.1 Persentase Kasus WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Diselesaikan	80

III.3.3. Analisis C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo	93
III.3.4. Analisis C1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelindungan WNI KRI Vanimo	102
III.3.5. C2 Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo	105
III.4. Internal Business Process Perspective	112
III.4.1. B1 Diplomasi Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Kuat	112
III.4.2. Analisis B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	112
III.4.3. B2 Basis Data KRI Vanimo yang Akurat.....	119
III.4.4. Analisis B2.1 Persentase WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI	120
III.5. Learning and Growth Perspective	133
III.5.1. L1 Tata Kelola Organisasi KRI Vanimo yang Baik	133
III.5.2. IK L1.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo	133
III.5.3. IK L2.1. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	134
III.5.4. IK L3.1. Nilai IKPA KRI Vanimo	134
III.5.5. Realisasi Anggaran	134
III.5.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya	135
BAB IV PENUTUP	144
IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja	144
IV.2. Kendala-Kendala Utama yang Dihadapi	145
IV.3. Langkah di Masa Mendatang Untuk Peningkatan Kinerja	145

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara. Laporan ini memuat ikhtisar capaian kinerja secara ringkas dan komprehensif, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja KRI Vanimo pada tahun 2024 (*Nilai Capaian Kinerja Organisasi/NCKO*) adalah sebesar 102.03. Capaian yang baik ini dicapai seiring dengan semakin berkembangnya rasa saling percaya dan itikad baik antara kedua belah pihak dalam mengelola kerjasama di perbatasan. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada isu-isu keamanan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan hubungan di bidang ekonomi lintas perbatasan dan penanganan permasalahan di perbatasan kedua negara seperti illegal entry, illegal fishing, kejahatan lintas batas, dll serta perlindungan terhadap WNI yang bekerja di wilayah kerja KRI Vanimo.

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Capaian Kinerja Organisasi	91.42	106.94	-	88.11	102.03

Sebagai salah satu perwakilan Republik Indonesia, KRI Vanimo diwajibkan untuk menyusun *Laporan Kinerja* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran yang dipercayakan. Laporan ini mencakup pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja, melakukan evaluasi, dan memberikan analisis atas pengukuran kinerja terhadap setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan. Hal ini menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan di masa mendatang guna mendukung peningkatan kinerja dan efektivitas diplomasi Indonesia dan kerjasama di wilayah kerja KRI Vanimo.

PERSPEKTIF	BOBOT PERSPEKTIF	SKOR PERSPEKTIF
Stakeholder Perspective	25%	93.71
Customer Perspective	15%	109.72
Internal Process Perspective	30%	103.44
Learning and Growth Perspective	30%	103.70
NCKO 2024	102.03	

Dengan adanya *Laporan Kinerja (LKj) KRI Vanimo Tahun 2024* ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, serta pengembangan kerja sama yang lebih terintegrasi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini terutama di wilayah perbatasan.

Kepala Perwakilan RI

Tangkuman Alexander Immanuel

Konsul

ONE PAGER INFOGRAPHICS

CAPAIAN IK

- 4 dari 14 IK Tercapai melebihi ekspektasi
- 4 dari 14 IK Tercapai sesuai target
- 4 dari 14 IK tercapai Optimal

REALISASI ANGGARAN

KRI Vanimo berhasil mengoptimalkan anggaran tahun 2024 dengan realisasi sebesar 99,15% atau Rp17,02 miliar, meningkat 7,05 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 92,10%.

NCKO 2024
102,03
(ISTIMEWA)

TEROBOSAN/ PENGHARGAAN/ INISIATIF STRATEGIS

- Mengawasi pelaksanaan proyek hibah infrastruktur seperti Wutung primary School, Fire Station, dan Waste Management,
- Melampaui target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 689,20% melalui promosi intensif, termasuk pelaksanaan forum bisnis dan kunjungan bilateral dengan pejabat Papua Nugini.

HIGHLIGHT KINERJA

- Mengadakan promosi pariwisata yang berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga 1.723 kunjungan, melampaui target hingga 689,20% melalui PLBN Skouw
- Menyelenggarakan business meeting dengan pengusaha Papua dan pengusaha dari Provinsi West Sepik untuk meningkatkan nilai perdagangan perbatasan, dengan realisasi mencapai USD 2,85 juta atau 105,51% dari target melalui PLBN Skouw, Sota, dan Yatetkun.
- Melakukan verifikasi 100% data WNI di wilayah kerja melalui Portal Peduli WNI, mendukung akurasi data untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya.



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
VANIMO

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja berisikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Konsulat Republik Indonesia di Vanimo (KRI Vanimo) sebagai salah satu Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga dilakukan untuk menyampaikan capaian, evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan langkah perbaikan ke depan.

Penyusunan Laporan Kinerja KRI Vanimo Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Lampiran II-120 Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tertanggal 1 Juni 2004, tugas pokok KRI Vanimo adalah melaksanakan hubungan Konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Provinsi Sandaun / West Sepik dan Provinsi Western, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KRI Vanimo menyelenggarakan fungsi:

1. Perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Wilayah Kerja meliputi Provinsi Sandaun / West Sepik dan Provinsi Western PNG;
2. Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
3. Perundingan dengan Pemerintah wilayah kerja;

4. Pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi;
5. Peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
6. Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi KRI Vanimo terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan: Konsul/Kepala Perwakilan
2. Unsur Pelaksanaan (Januari - Desember 2024)
 - a. Minister Counsellor, 1 orang (Maret - Desember 2024)
 - b. Counsellor, 1 orang (Januari-Mei 2024)
 - c. Sekretaris II, 1 Orang (Februari - Desember 2024)
3. Unsur Penunjang:
 - a. Penata Kanselerai;
 - b. Petugas Komunikasi
 - c. SK 111

Kondisi riil *besetting* personil KRI Vanimo pada Januari - Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan:
 - a. Allen Simarmata, Konsul/Kepala Perwakilan RI (Januari - Mei 2024)
 - b. Tangkuman Alexander Immanuel, Konsul/Kepala Perwakilan RI (Mei - Desember 2024)
2. Unsur Pelaksana:
 - a. Paulus Harry Langitan, Minister Counsellor/PF Ekonomi (Maret - Desember 2024)
 - b. Tangkuman Alexander Immanuel, Counsellor/PF Pensosbud (Januari-Mei 2024)
 - c. Rizaldi Ishak, Sekretaris II/PF Protkons (Februari - Desember 2024)
3. Unsur Penunjang:
 - a. Cliff Sangkek, Penata Kanselerai (Januari - November 2024)
 - b. Jonathan Dharma Tama, Penata Kanselerai (November - Desember 2024)
 - c. Sutiono, Petugas Komunikasi (Januari - Desember 2024)
 - d. Suwagiono, Staf non diplomatik SK. 111, (Januari - September 2024)
 - e. Atang Castra, Staf non diplomatik SK. 111, (Oktober - Desember 2024)

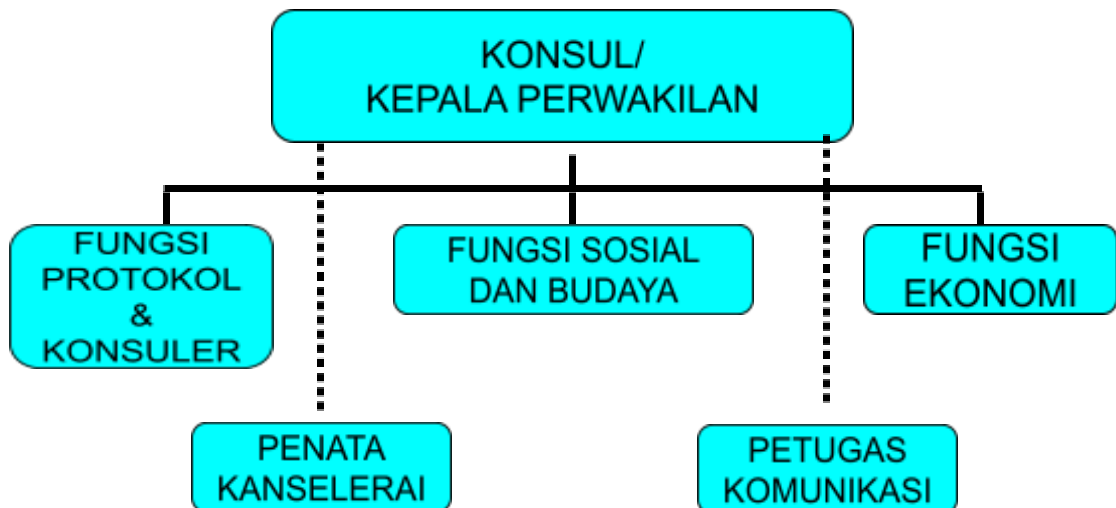
Fungsi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KRI di bidang Sosial dan Budaya yaitu meningkatkan hubungan, kerjasama, dan promosi sosial dan budaya antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Budaya memiliki Fungsi antara lain peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral, perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional dan pengembangan rencana dan taktik pembentukan opini publik dan dukungan media massa di Negara Penerima untuk mendukung diplomasi Indonesia, terutama berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;

Fungsi Ekonomi mempunyai tugas meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional serta lembaga-lembaga resmi lainnya antara lain melakukan fungsi antara lain peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral, perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional dan perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral.

Fungsi Konsuler mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KRI Vanimo di bidang Kekonsuleran dan Perlindungan WNI yaitu tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsuler antara lain menyelenggarakan fungsi pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan hukum setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional dan penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan majikan, pengguna, dan/atau dengan pemerintah setempat dsb.

Unsur Penunjang mempunyai tugas pokok membantu Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan. Unsur Penunjang (Penata Kanselerai dan Petugas Komunikasi) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan;
- e. Pemberian dukungan umum dan logistik bagi pelaksanaan tugas Perwakilan
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
- g. Pengelolaan dan pelaksanaan persandian dan komunikasi.



I.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

KRI Vanimo adalah organisasi yang memegang peranan strategis yang terkait dengan Diplomasi Perbatasan dan Penegakan kedaulatan NKRI mengingat wilayah kerja KRI Vanimo berbatasan antara Provinsi Papua-RI dengan Provinsi Sandaun/West Sepik dan Provinsi Western di PNG. Peran strategis KRI Vanimo adalah sebagai Perwakilan Indonesia yang melakukan pendekatan dengan Pemprov Sandaun/West Sepik dan Western serta meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua wilayah kerja dengan Indonesia terutama Provinsi-Provinsi di wilayah Papua baik itu hubungan sosial budaya dan perdagangan serta *people to people contact* khususnya warga masyarakat di perbatasan yang memiliki hubungan emosional persaudaraan satu rumpun satu sama lain juga terlaksana dengan baik.

Ada beberapa poin penting yang menempatkan hubungan dan kerjasama kedua negara begitu penting dan memiliki nilai strategis serta karakter kekhususan yaitu antara Indonesia dan PNG terdapat kesamaan budaya dan ras Melanesia khususnya dengan di provinsi-provinsi di wilayah Papua yang berbatasan dengan Provinsi West Sepik dan Western Province (PNG).

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan KRI Vanimo sangat dipengaruhi oleh kondisi Perwakilan dan wilayah kerja. Sesuai Permenlu No. 05 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya, KRI Vanimo merupakan salah satu Perwakilan yang rawan. Meskipun demikian, struktur organisasi Perwakilan RI dan bezetting personil yang ada sekarang memiliki nilai strategis dalam melaksanakan visi dan misi Perwakilan RI Vanimo.

I.5. ISU-ISU STRATEGIS

Visi Konsulat Republik Indonesia di Vanimo sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Konsulat RI Vanimo 2020-2024 adalah “Menjadi ujung tombak dalam diplomasi Indonesia yang aktif dan efektif di Provinsi Sandaun dan Provinsi Western, Papua Nugini, bagi Kepentingan Nasional.” Sesuai dengan pernyataan Visi di atas, maka dapat diartikan bahwa KRI Vanimo menitikberatkan upaya-upaya diplomasi yang aktif dan efektif untuk mendorong dan memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta perlindungan WNI.

Diplomasi perbatasan untuk meningkatkan stabilitas di wilayah perbatasan kedua negara menjadi fokus utama KRI Vanimo. Oleh karena itu, kerjasama perbatasan menjadi inti dari berbagai program diplomasi KRI Vanimo, termasuk diplomasi di bidang ekonomi, sosial budaya serta perlindungan WNI yang berdomisili di wilayah kerja. Sejalan dengan itu, posisi geografis wilayah kerja (Provinsi West Sepik dan Western) yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan memerlukan peran kuat diplomasi KRI Vanimo dalam upaya menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KRI Vanimo memiliki peran strategis, terutama dalam menjalin hubungan dan melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Sandaun/West Sepik dan Pemerintah Provinsi Western untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, KRI Vanimo secara aktif berpartisipasi dan berkoordinasi dalam berbagai forum perbatasan, seperti *Border Liaison Officer Meeting* (BLOM), *Border Liaison Meeting* (BLM), *Joint Border Committee* (JBC), *Senior Official Meeting* (SOM), serta sesi khusus lainnya, termasuk rapat-rapat koordinasi yang membahas penguatan diplomasi perbatasan. Rapat-rapat ini melibatkan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sandaun dan Western di Papua Nugini.



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
VANIMO

BAB II

PERENCANAAN

KERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KRI VANIMO

- VISI KONSULAT RI VANIMO : “Menjadi ujung tombak dalam diplomasi Indonesia yang aktif dan efektif di Provinsi Sandaun dan Provinsi Western, Papua Nugini, bagi Kepentingan Nasional.”
- MISI 1 : Memantapkan peran KRI Vanimo sebagai penjuror pelaksanaan diplomasi ekonomi yang optimal di wilayah kerja;
- MISI 2 : Memberikan pelayanan perlindungan WNI / BHI yang prima di wilayah kerja;
- MISI 3 : Menjaga integritas NKRI khususnya di wilayah perbatasan RI - PNG;
- MISI 4 : Meningkatkan citra positif Indonesia di wilayah kerja;
- MISI 5 : Mewujudkan kapasitas KRI Vanimo agar menjadi organisasi yang kompeten, profesional, dan mumpuni.
-
- SASARAN STRATEGIS : - Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal
- Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Wilayah Kerja KRI Vanimo
 - Perlindungan WNI / BHI dan Pelayanan Publik KRI Vanimo yang Prima
 - Dukungan dan Komitmen yang tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo
 - Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya KRI Vanimo yang Kuat
 - Basis Data WNI KRI Vanimo yang Akurat
 - Tata Kelola Organisasi KRI Vanimo yang Baik
 - Sarana dan Prasarana KRI Vanimo yang Memadai
 - Pengelolaan Anggaran KRI Vanimo yang Optimal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU):

1. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo
2. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo
3. Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo
4. Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo
5. Persentase Kasus WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang diselesaikan
6. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo
7. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI KRI Vanimo
8. Persentase tindak lanjut/Implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo
9. Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo
10. Indeks Respon Positif Terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang Wilayah Kerja KRI Vanimo
11. Persentase WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI
12. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo
13. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri
14. Nilai Kinerja Anggaran KRI Vanimo

II.2 PENETAPAN KINERJA KRI VANIMO TAHUN 2024

KRI Vanimo telah melakukan Penetapan Kerja Tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Perwakilan RI dengan Menteri Luar Negeri. Adapun penjabaran PK KRI Vanimo Tahun 2024 sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal	IK S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	99.00 %

		SUB IK 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	4
		SUB IK 2	Nilai perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	USD. 2.700.000
		IK S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	99.00 %
		SUB IK 1	Jumlah komitmen investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	4
		SUB IK 2	Nilai investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	USD. 1.700.000
		IK S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan wilayah kerja KRI Vanimo	99.00 %
		SUB IK 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari Wilayah Kerja KRI Vanimo ke Indonesia	76.54 %
		SUB IK 2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KRI Vanimo ke Indonesia	250 Kunjungan
S.2	Citra positif Indonesia di wilayah kerja KRI Vanimo yang meningkat	IK S.2.1	Indeks Citra Indonesia di wilayah kerja KRI Vanimo	4.07 (Skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Perlindungan WNI dan pelayanan publik KRI Vanimo yang prima	IK C.1.1	Persentase kasus WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang diselesaikan	84.00 %

		IK C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo	4 (Skala 4)
		IK C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KRI Vanimo	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di wilayah kerja KRI Vanimo	IK C.2.1	Persentase tindak lanjut / implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo	84.00 %
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral di wilayah kerja KRI Vanimo yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan wilayah kerja KRI Vanimo	4
B.2	Basis data KRI Vanimo yang akurat	IK B.2.1	Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100 %
		IK B.2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KRI Vanimo	80.00
Learning and Growth Perspective				
L1	Tata kelola organisasi KRI Vanimo yang baik	IK L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo	76.90 (BB)
L2	Pengelolaan aset KRI Vanimo yang optimal	IK L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KRI Vanimo	3.20 (Skala 4)
L3	Pengelolaan anggaran KRI Vanimo yang optimal dan akuntabel	IK L.3.1	Nilai IKPA KRI Vanimo	90.00



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
VANIMO

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA KRI VANIMO

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja KRI Vanimo pada tahun 2024 (*Nilai Capaian Kinerja Organisasi / NCKO*) tercatat sebesar **102,03%**. Capaian yang baik ini tercapai di tengah semakin berkembangnya rasa saling percaya dan itikad baik antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kerja sama di wilayah perbatasan. Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada isu keamanan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi lintas perbatasan serta perlindungan terhadap WNI..

Sepanjang tahun 2024, KRI Vanimo telah berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang menangani isu perbatasan, isu Papua, perdagangan, serta perlindungan WNI. Koordinasi terus dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan, termasuk pembahasan agenda mengenai implementasi berbagai kesepakatan. Namun, tantangan dalam koordinasi, terutama dalam penerapan kesepakatan yang berkaitan dengan perbatasan, masih memerlukan upaya lebih besar dan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, keterlibatan banyak pemangku kepentingan serta dinamika tinggi di lapangan yang menghasilkan banyak kesepakatan menjadi kendala sekaligus tantangan bagi KRI Vanimo. Hal ini mendorong KRI Vanimo untuk terus berupaya memastikan seluruh kesepakatan yang telah dicapai dapat diimplementasikan dengan baik.

NCKO 2024 (ISTIMEWA)				102,03%
Stakeholder Perspective (25%)				93,71
S1 : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal				87,90
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	99%	84,15%	85%	
Jumlah komitmen perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	4	3	75%	
Nilai perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	USD 2.700.000	USD 2.848.754	105,51%	

Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	99%	58,15%	58,74%	
Jumlah komitmen investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	4	3	75%	
Nilai investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	USD 1.700.000	USD 320.000	18,82%	
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan wilayah kerja KRI Vanimo	99%	247,91%	250,41%	
Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari Wilayah Kerja KRI Vanimo ke Indonesia	76,54%	45%	58,79%	
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KRI Vanimo ke Indonesia	250 Kunjungan	1.723 Kunjungan	689,20%	120
S2 : Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Meningkat				99,51%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo	4,07 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)	99,51%	
Customer Perspective (15%)				109,72%
C1 : Perlindungan WNI dan Pelayanan Publik KRI Vanimo yang Prima				100,39%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Persentase kasus WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang diselesaikan	82%	85%	101,19%	
Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	100%	
Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KRI Vanimo	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	100%	

C2 : Dukungan dan Komitmen yang tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo				119,05%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Persentase Tindak Lanjut / Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	84%	100%	119,05%	
Internal Business Process Perspective (30%)				103,44%
B1 : Diplomasi Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Kuat				100%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan wilayah kerja KRI Vanimo	4	4	100%	
B2 : Basis data KRI Vanimo yang akurat				106,89%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Persentase WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%	100%	100%	
Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Wilayah Kerja KRI Vanimo	80	98	122,50%	120%
Learning & Growth Perspective (30%)				103,70%
L1 : Tata Kelola Organisasi KRI Vanimo yang Baik				98,11%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo	76,90 (BB)	75,45	98,11%	

L2 : Pengelolaan Aset KRI Vanimo yang Optimal				116,56%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Indeks Pengelolaan BMN KRI Vanimo	3,20 (Skala 4)	3,12	97,50%	
L3 : Pengelolaan Anggaran KRI Vanimo yang Optimal dan Akuntabel				96,43%
Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Nilai IKPA KRI Vanimo	90	86,79	96,43%	

III.2. Stakeholder Perspective

III.2.1. S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal

Sesuai dengan tujuan keberadaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional, dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, dan kerja sama pembangunan internasional. Optimal berarti paling baik dan tertinggi

Sasaran Strategis (SS) S1 diukur berdasarkan capaian pada 3 (tiga) IK dan perhitungan capaian pada tiap IK merujuk pada realisasi SUB IK masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

1. IK S1.1 : Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo yang capaiannya merupakan agregat capaian SUB IK:

- a. Jumlah Komitmen perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo
 - b. Nilai Perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo
2. IK S1.2 : Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo
- a. Jumlah komitmen investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo
 - b. Nilai investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo
3. IK S1.3 : Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan wilayah kerja KRI Vanimo
- a. Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia
 - b. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia

III.2.2. Analisis S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Efektivitas diplomasi ekonomi berarti bahwa IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Ruang lingkup:

IK S1.1 memiliki 2 Sub IK, yakni:

Sub IK 1: Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 70%

Sub IK ini mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Dibobotkan sebesar 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen perdagangan merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Perwakilan RI

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai perdagangan yang disepakati.

Sub IK 2: Nilai perdagangan dengan negara akreditasi, dengan bobot 30%

Sub IK ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan suatu negara akreditasi. Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan.

Sub IK 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IK dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Perwakilan RI namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Informasi Kinerja

Tabel III.1
Capaian IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK *)	NILAI BOBOT **)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	Capaian SUB IK 1: Jumlah komitmen perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	75%	52,5%
	Capaian SUB IK 2: Nilai Perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo	105,51%	31,65%
Realisasi			84,15%
Target			99%
Capaian			85%
Batas Toleransi			

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.1 “Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” tercatat sebesar **84,15%**, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar **99%**. Dengan demikian, Capaian IK mencapai **85%**, dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IK S1.1 diperoleh melalui penjumlahan bobot capaian SUB IK 1 dan SUB IK 2. Pada tahun 2024, realisasi SUB IK 1 “Jumlah komitmen perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” mencapai **3** dari target sebesar **4** komitmen, sehingga capaian IK mencapai **75%** dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Berikut di bawah ini adalah data Komoditas Ekspor dan Impor yang melalui Pos Lintas Batas Negara SKouw, Sota, dan Yetetkun. Sumber didapatkan dari rekapitulasi setiap PLBN

Tabel III.2
Data Komoditas Ekspor / Impor
Melalui Pos Lintas Batas Negara Negara Skouw
Periode Januari - Desember

NO	BULAN	PLBN SKOUW		
		EKSPOR	IMPOR	KOMODITAS
1	Januari	3.561.972.193,00	351.370.957,00	Ekspor : bahan pangan pokok, bahan material bangunan, makanan ringan, makanan instan, minuman kemasan, kopi instan, komputer, aksesoris alat elektronik, akumulator, kendaraan roda dua, suku cadang kendaraan, perkakas, tripleks, oli, detergen, printer, mesin pompa air, minuman kemasan, peti jenazah, kamera, mebel. Impor : Vanili, Cacao Beans, makanan ringan, sosis, kornet, kulit kayu Masohi, spare parts.
2	Februari	2.083.172.642,00	1.052.685.574,00	
3	Maret	3.932.938.892,00	975.626.281,07	
4	April	2.524.787.490,00	512.670.495,68	
5	Mei	3.255.041.918,00	560.209.217,00	
6	Juni	3.597.613.525,00	688,496.491,68	
7	Juli	3.575.090.138,00	591.910.205,10	
8	Agustus	5.219.894.376,00	659.855.557,93	
9	September	4.490.204.950,00	670.063.433,32	
10	Oktober	785.724.000,00	442,620.433,83	
11	November	5.553.004.000,00	363.366.183,40	
12	Desember	5.905.452.250,00	611.876.098,57	
	Jumlah	44.484.896.374,00	7.480.751.096,58	

Sumber : PLBN Skouw dan Kantor Bea Cukai Jayapura

Tabel III.3
Data Komoditas Ekspor / Impor
Melalui Pos Lintas Batas Negara Negara Sota
Periode Januari - Desember

NO	BULAN	PLBN SOTA		
		EKSPOR	IMPOR	KOMODITAS
1	Januari - Desember	1.462.749.000,00	169.410.000,00	Ekspor: Beras, tepung terigu, tembakau kering, kopi bubuk, pinang, sirih, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, kelapa, tepung sagu
	Jumlah	1.462.749.000,00	169.410.000,00	

Sumber : PLBN Sota

Tabel III.4
Data Komoditas Ekspor / Impor
Melalui Pos Lintas Batas Negara Negara Yetetkun
Periode Januari - Desember

NO	BULAN	PLBN YETETKUN		
		EKSPOR	IMPOR	KOMODITAS
1	Januari - Desember	39.220.000,00	39.220.000,00	Ekspor: Mie Instan dan Kopi bubuk Impor: Sosis dan makanan kemasan (kornet)
	Jumlah	39.220.000,00	39.220.000,00	

Sumber : PLBN Yetetkun

Berdasarkan data aktivitas ekspor dan impor melalui pos lintas batas negara Skouw, Sota, dan Yetetkun pada periode Januari hingga Desember 2024, terlihat bahwa Pos Skouw mendominasi perdagangan lintas batas dengan total nilai ekspor sebesar **Rp 44,48 miliar** dan impor sebesar **Rp 7,69 miliar**. Ekspor melalui Pos Skouw mencakup berbagai komoditas seperti bahan pangan, bahan bangunan, peralatan elektronik, kendaraan roda dua, dan suku cadang, dengan puncak nilai ekspor terjadi pada bulan November, mencapai **Rp 5,55 miliar**. Impor di Skouw terutama terdiri dari kakao beans, vanili, kulit kayu Masohi, dan suku cadang kendaraan, dengan nilai tertinggi pada bulan Agustus sebesar **Rp 659 juta**. Pos Sota mencatat total ekspor sebesar **Rp 1,46 miliar**, terutama untuk

komoditas agrikultur seperti beras, tepung terigu, kopi bubuk, dan bawang merah, sementara nilai impornya relatif kecil, yaitu **Rp 169 juta**. Di sisi lain, aktivitas perdagangan di Pos Yetetkun terbilang minim, dengan total ekspor **Rp 39 juta** dan impor **Rp 41 juta**, yang menunjukkan keseimbangan perdagangan namun dengan volume yang sangat kecil dibandingkan dua pos lainnya.

Secara keseluruhan, total nilai ekspor melalui ketiga pos lintas batas mencapai **Rp 46,99 miliar**, sedangkan total impornya sebesar **Rp 7,90 miliar**, menandakan surplus perdagangan yang signifikan. Pos Skouw berperan sebagai pusat perdagangan utama dengan kontribusi hampir **85%** terhadap total nilai ekspor lintas batas, diikuti oleh Sota yang berfokus pada hasil agrikultura.

Realisasi SUB IK 2 “Nilai Perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” pada tahun 2024 tercatat sebesar **USD. 2.848.754** dari target sebesar **USD. 2.700.000**, sehingga capaian IK sebesar **105,51%** dengan batas toleransi capaian sebesar 120%

Perbandingan Kinerja

Tabel III.5

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Kode IK / SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
S1.1	Target			98,90%	99%
	Realisasi			105.23%	84,15%
	Capaian			106,83%	85%
SUB IK 1	Target			3	4
	Realisasi			3	3
	Capaian			100%	75%
SUB IK 2	Target			USD 2.600.000	USD 2.700.000
	Realisasi			USD 3.050.000	USD 2.848.754
	Capaian			117,42%	105,51%

IK S1.1 “Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” baru diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian

diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, capaian IK di tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK tahun 2023 dan 2022.

Target IK tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi **99%** dari yang sebelumnya **98,90%** pada tahun 2023. Target tahun 2024 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2023 yang melampaui target, serta untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan penetapan target yang menantang tetapi tetap *achievable*

Target SUB IK 1 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi **4** dari **3** pada tahun 2023. Peningkatan didasari oleh realisasi dan capaian tahun 2023 yang sesuai dengan target pada tahun tersebut. Selain itu, peningkatan target juga berdasarkan hasil pemetaan potensi komitmen perdagangan yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2024.

Realisasi SUB IK 2 mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi **USD. 2.848.754** dari **USD. 3.050.000** pada tahun 2023. Menurunnya realisasi ini disebabkan oleh penurunan jumlah transaksi dagang akibat fluktuasi permintaan dari negara akreditasi, serta kendala teknis dalam pelaksanaan promosi perdagangan yang berdampak pada capaian komitmen perdagangan. Selain itu, jumlah hari pasar di perbatasan kedua negara di Pos Batas Skouw dengan Wutung hanya satu hari dalam seminggu.

Target SUB IK 2 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi **USD. 2.700.000** dari **USD. 2.600.000** pada tahun 2023. Peningkatan didasari oleh realisasi dan capaian tahun 2023 yang jauh lebih tinggi dari target pada tahun tersebut.

Realisasi SUB IK 1 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena berada pada posisi yang sama di tahun 2024 yaitu 3 dari 3 pada tahun 2023. Walaupun tidak terjadi kenaikan maupun penurunan realisasi nilai perdagangan, performa ekspor Indonesia hingga bulan Oktober masih terbilang baik dengan total surplus neraca perdagangan sebesar **Rp 36.795.530.404,42**, yang dihitung dari total nilai ekspor Rp 41.977.012.880 dan total nilai impor Rp 5.181.482.475,58 berdasarkan data dari PLBN Skouw, Sota, dan Yetetkun.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian KRI Vanimo di sektor perdagangan membuktikan bahwa diplomasi ekonomi berjalan dengan efektif dan berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, yakni dengan menstimulasi aktivitas perdagangan antara pemangku kepentingan domestik dan internasional.

Pencapaian target efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan didukung oleh realisasi komitmen perdagangan yang tinggi, dengan valuasi komitmen yang

teridentifikasi mencapai **USD 2.848.754** dari 3 komitmen yang berhasil disepakati. KRI Vanimo telah dan terus memberikan fasilitasi dan pengawalan komitmen perdagangan mulai dari tahap peninjauan, kesepakatan, hingga tindak lanjut.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi khususnya dalam menjangkau komitmen perdagangan. Dalam rangka merealisasikan IK tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, berikut beberapa kegiatan yang mendukung program strategis yang telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo pada tahun 2024

1. Pada 13-14 Maret 2024, Konsul RI dan staf mengunjungi Perusahaan *Bewani Oil Palm Plantations Limited* (BOPPL) di Imbio, Provinsi West Sepik, PNG, untuk kegiatan *Market Intelligence*, peninjauan perluasan pasar tenaga kerja, serta pembinaan dan perlindungan WNI. Pemerintah PNG memprioritaskan pembangunan industri kelapa sawit pada tahun anggaran 2024, menjadikan BOPPL sebagai potensi besar untuk memperluas pangsa pasar dan produk Indonesia di wilayah kerja Konsulat RI Vanimo. Konsulat RI berupaya mengatasi hambatan ekonomi, khususnya terkait CIQS di PLBN Skouw-Wutung, sementara potensi kebutuhan produk dan tenaga kerja Indonesia di sektor kelapa sawit masih terbuka lebar. Produk Indonesia di kawasan Bewani sebagian besar masuk melalui perbatasan tradisional Keerom-Bewani tanpa fasilitas CIQ (Custom, Immigration, Quarantine, Security), sedangkan produk yang melalui PLBN Skouw-Wutung telah dikenakan proses CIQ kedua negara, memungkinkan perhitungan nilai ekspor-impor.
2. Pada Senin, 18 Maret 2024, Konsul RI dan staf mengunjungi Pos Perbatasan PNG di Wutung, 43 km dari Vanimo, untuk melepas ekspor produk Indonesia, bertemu dengan Komandan Pos Tentara Perbatasan PNG, serta meninjau jalur tikus perbatasan. Volume ekspor produk Indonesia ke PNG melalui Pos Wutung sejak Januari hingga awal Maret 2024 menunjukkan peningkatan, mencakup sembako, semen, aspal, bahan bangunan, bahan kelistrikan, dan suku cadang. Namun, jalur tikus perbatasan semakin dimanfaatkan oleh oknum warga untuk perdagangan ilegal dan aktivitas lainnya. Meski otoritas perbatasan Indonesia di PLBN Skouw telah berupaya menutup jalur ini dengan palang dan pagar batas, jalan tikus tetap digunakan, terutama pada malam hari saat pos resmi tutup. Untuk pencegahan lebih efektif, pemasangan palang jalan perlu didukung dengan penempatan petugas keamanan dan patroli rutin.

3. Pada 21-22 Maret 2024, Konsul RI Vanimo melakukan kunjungan ke Kota Jayapura untuk bertemu dengan Kepala Kantor Imigrasi Jayapura dan para pengusaha/*supplier*. Pertemuan dengan Kepala Kantor Imigrasi bertujuan mempermudah koordinasi di lapangan terkait persoalan pelintasan orang dan jalur tikus di perbatasan. Sementara itu, pertemuan dengan para *supplier* dilakukan untuk memastikan kesinambungan dorongan ekspor produk Indonesia ke PNG melalui perbatasan, sekaligus memantau pesanan bahan material proyek hibah Pemerintah RI di Vanimo yang dipesan oleh kontraktor pelaksana, *Tumla Investment Ltd*.
4. Konsul RI Vanimo berkunjung ke Aitape, Provinsi West Sepik, pada tanggal 27 - 30 Maret 2024, dalam rangka *market intelligence*, mempelajari potensi ekspor produk Indonesia dan pertemuan dengan pemerintah daerah Aitape. Kunjungan pada intinya sebagai upaya memperkokoh kerja sama dengan wilayah kerja khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dengan melihat potensi yang ada.
5. Pada 26 September 2024, KRI Vanimo bekerjasama dengan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (BPPK) Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi peraturan Kepabeanaan Indonesia dan Persiapan Pelaksanaan *Border Trade Show 2024* di Jayapura. Tujuan dilaksanakannya pertemuan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi Provinsi Papua dan Provinsi West Sepik. Pemahaman kepabeanaan ditujukan terutama untuk pelaksanaan ekspor-impor yang terkait dengan kepabeanaan melalui perbatasan Skouw dan Wutung.
6. Tim KRI Vanimo mendampingi Gubernur, pejabat pemerintah daerah, dan pengusaha dari Provinsi West Sepik, Papua Nugini, dalam kunjungan ke *Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39* yang berlangsung di *Indonesia Convention Exhibition (ICE)*, BSD City, Banten, pada 9-12 Oktober 2024. Dalam *Business Meeting* di kantor PT Rajawali Nusindo, Direktur Utama PT Rajawali Nusindo menyampaikan penawaran untuk kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta di Provinsi West Sepik dalam distribusi berbagai produk yang dikelola oleh perusahaan
7. Konsulat RI memberikan dukungan penyelenggaraan *Border Trade Fair (BTF) 2024* yang berlangsung pada 12-14 Desember 2024 di Zona Netral RI-PNG Skouw-Wutung dan Zona Inti PLBN Skouw. Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Papua Nugini serta meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. BTF 2024 diikuti oleh 79 UMKM dengan total 59 booth dan menarik sekitar 11.000 pengunjung. Selama acara, tercatat total transaksi mencapai Rp. 450.857.000. Selain itu, digelar Business Matching yang difasilitasi oleh

Pemerintah Provinsi Papua, melibatkan 44 UMKM Indonesia dan 8 UMKM Papua Nugini. Kegiatan ini bertujuan membuka peluang kerjasama bisnis di bidang teknologi pengolahan dan pemasaran komoditas.

Kendala dan Tantangan

1. **Keterbatasan Fasilitas CIQS di Perbatasan Tradisional Keerom-Bewani:** Produk Indonesia yang masuk melalui perbatasan tradisional belum melalui proses CIQS, sehingga nilai perdagangan tidak tercatat resmi, berbeda dengan produk yang masuk melalui PLBN Skouw-Wutung. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pencatatan nilai ekspor.
2. **Pemanfaatan Jalur Tikus untuk Aktivitas Perdagangan Ilegal:** Jalur tikus di perbatasan masih menjadi tantangan besar, dengan aktivitas *illegal trading* yang mengurangi potensi nilai perdagangan resmi. Meski telah dilakukan upaya seperti pemasangan palang jalan dan pagar, aktivitas ini masih berlangsung, terutama di luar jam operasional pos batas.
3. **Fluktuasi Permintaan dari Negara Mitra/Wilayah Kerja:** Penurunan realisasi perdagangan juga dipengaruhi oleh perubahan permintaan di pasar PNG khususnya di wilayah perbatasan, baik karena dinamika ekonomi lokal maupun prioritas pembangunan yang mungkin berbeda dibanding tahun sebelumnya.
4. **Hambatan Logistik dan Koordinasi di Perbatasan:** Masalah koordinasi lintas instansi, seperti pelintasan orang dan barang di perbatasan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, menjadi kendala dalam memperlancar perdagangan.
5. **Kendala Teknis pada Proyek Hibah Pemri:** Pemantauan pesanan bahan material untuk proyek hibah di Vanimo menunjukkan adanya tantangan dalam kesinambungan suplai dari supplier di Jayapura, yang dapat memengaruhi kelancaran implementasi proyek dan hubungan perdagangan.

Upaya Perbaikan

KRI Vanimo telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

1. **Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak Terkait di Perbatasan:** KRI Vanimo menjalin komunikasi intensif dengan pihak otoritas perbatasan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, untuk mengatasi permasalahan

pelintasan orang dan pengawasan terhadap jalur tikus yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

2. **Fasilitasi Business Meeting dan Komunikasi Dagang:** KRI Vanimo menyelenggarakan kegiatan seperti business meeting dan pertemuan dengan pengusaha lokal, termasuk mendorong pelaksanaan *Business Forum* pada Desember 2024 bersamaan dengan penyelenggaraan Border Trade Fair 2024 bekerjasama dengan Provinsi Papua dan Kadin Papua, untuk memperkuat jejaring dagang dan membuka peluang ekspor produk Indonesia ke PNG. Selain itu dilakukan pertemuan sektoral diantaranya terkait dengan kepabeanan.
3. **Memantau dan Menjamin Kelancaran Proyek Hibah Pemri di Vanimo:** Melakukan pertemuan dengan *supplier* di Jayapura untuk memastikan pasokan bahan material proyek hibah, sekaligus memantau proses pelaksanaannya guna mendukung penyelesaian proyek bantuan hibah Pemri.
4. **Meningkatkan Efisiensi Pelintasan di PLBN Skouw-Wutung:** KRI Vanimo berupaya menjembatani kendala terkait fasilitas CIQS di PLBN untuk memastikan proses pelintasan barang dan orang berjalan lebih lancar, sehingga nilai perdagangan resmi dapat terus tercatat dan meningkat.

Proyeksi Kedepan

1. Proyeksi Peningkatan Fasilitas dan Pengawasan di Perbatasan

KRI Vanimo akan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Indonesia dan PNG untuk mengembangkan fasilitas CIQS di jalur perbatasan tradisional seperti Keerom-Bewani, sehingga nilai perdagangan dapat tercatat secara resmi. Selain itu, pengawasan terhadap jalur tikus akan ditingkatkan melalui pemasangan palang jalan tambahan, penguatan patroli rutin, dan pelibatan aparat keamanan dalam pengawasan malam hari.

2. Penguatan Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi akan menjadi fokus utama dengan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan volume dan diversifikasi ekspor. KRI Vanimo akan melanjutkan komunikasi dengan *Bewani Oil Palm Plantations Limited* (BOPPL) dan perusahaan lain di West Sepik Province untuk memperluas pangsa pasar produk dan tenaga kerja asal Indonesia, khususnya di sektor kelapa sawit dan kehutanan.

Sebagai informasi tambahan: Terkait dengan ekspor dan impor, PNG memiliki peraturan bea cukai dan karantina yang ketat dengan berkilat kepada sistem Australia. Untuk itu, eksportir harus memastikan bahwa

standar karantina perlu diperhatikan dengan baik. Standar Australia juga diberlakukan terkait dengan produk serta material termasuk konstruksi yang telah dikodifikasikan termasuk dalam bidang infrastruktur seperti diberlakukannya Building Code.

Terdapat potensi dan peluang dalam mengembangkan bisnis di Papua Nugini khususnya di provinsi West Sepik dan Western Province sebagai negara yang bertetangga dekat dan berbatasan. Kalangan pengusaha Indonesia yang mau mengembangkan bisnis ini masih perlu diyakinkan karena sering dianggap memulai bisnis dengan PNG dikaitkan dengan keamanan dan kendala terkait dengan transparansi peraturan. Kendala yang ada adalah persepsi dari sebagian besar para pengusaha Indonesia yang masih menganggap PNG lekat dengan potret keamanan negaranya yang lemah, sistem perbankan yang buruk dan kurangnya transparansi terhadap peraturan ekspor-impor. Berbeda dengan para pengusaha Asia lainnya seperti pengusaha dari Malaysia dan China berani berbisnis dan menanamkan modalnya di PNG dengan keuntungan yang diraih.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Untuk mempercepat penyelesaian kendala logistik dan pelintasan, KRI Vanimo mendukung digitalisasi data perdagangan melalui kerja sama dengan instansi terkait di PLBN. Digitalisasi ini akan mempermudah pencatatan nilai ekspor-impor secara lebih akurat dan efisien, mendukung transparansi dalam perdagangan serta efisiensi dalam pelaporan perdagangan lintas batas.

4. Pembinaan dan Perlindungan WNI

KRI Vanimo akan terus memprioritaskan pembinaan dan perlindungan WNI, khususnya pekerja migran di sektor kelapa sawit. Upaya ini meliputi peningkatan komunikasi dengan perusahaan di PNG untuk memastikan perlindungan tenaga kerja, serta pengadaan program pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

5. Penetapan Target yang Menantang Namun Realistis

Dalam menetapkan target IK di tahun mendatang, KRI Vanimo akan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan perdagangan berdasarkan potensi pasar yang telah diidentifikasi. Target akan dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja, seperti pertumbuhan nilai ekspor melalui PLBN Skouw sebesar 10-15% dibandingkan tahun 2024, peningkatan pencatatan nilai perdagangan resmi dari jalur tradisional seperti Keerom-Bewani, dan penambahan jumlah mitra dagang dengan perusahaan di PNG khususnya di Provinsi West Sepik dan Western Province di sektor prioritas.

Dokumentasi



Kunjungan ke Bewani Oil Palm Plantations Limited: 13-14 Maret 2024



Kunjungan Konsul RI ke Pos Wutung dan Upaya Mitigasi Perdagangan Ilegal di Jalan tikus: 18 Maret 2024



Kunjungan Konsul RI Vanimo ke Kota Jayapura untuk Koordinasi dan Penguatan Ekspor: 21-22 Maret 2024





26 September 2024: Diseminasi Informasi Kepabeanaan dan Persiapan Border Trade Show 2024



12-14 Desember 2024: Partisipasi Konsulat RI dalam Border Trade Fair (BTF) 2024 di PLBN Skouw-Wutung

III.2.3. Analisis S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Efektivitas diplomasi ekonomi berarti bahwa IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi agar hasil diplomasi dapat

dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Sub IKU ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.

Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dari negara akreditasi untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup:

IK S1.2 memiliki 2 Sub IK yakni:

Sub IK 1: Jumlah Komitmen Investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo, dengan bobot 70%

Sub IK ini mengukur jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi. Sub IK 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen investasi merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai investasi yang disepakati.

Sub IK 2: Nilai Investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo, dengan bobot 30%

Sub IK ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Realisasi dari nilai investasi bersifat tahunan. Sub IK 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IK dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Perwakilan RI namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Pencapaian target IK ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan intensif antara Perwakilan RI dengan entitas yang bernaung dalam *Indonesia Incorporated* (ITPC, IIPC) di negara tersebut.

Informasi Kinerja

Tabel III.6

Capaian IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK *)	NILAI BOBOT **)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	Capaian SUB IK 1: Jumlah komitmen investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	75%	52,5%
	Capaian SUB IK 2: Nilai Investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo	18,82%	5,646%
Realisasi			58,15%
Target			99%
Capaian			58,74%
Batas Toleransi			

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.2 “Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” tercatat sebesar **58,15%**, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar **99%**. Dengan demikian, Capaian IK mencapai **58,74%**.

Realisasi IK S1.2 diperoleh melalui penjumlahan bobot capaian SUB IK 1 dan SUB IK 2. Pada tahun 2024, realisasi SUB IK 1 “Jumlah komitmen investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” mencapai **3** dari target sebesar **4** komitmen, sehingga capaian IK mencapai **75%**.

Perolehan komitmen investasi didominasi oleh sektor infrastruktur dengan 3 komitmen dari total 3 komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi. Berdasarkan data, pada bagian *2nd down payment*, nilai investasi untuk masing-masing proyek infrastruktur melalui bantuan hibah adalah sebagai berikut: pembangunan dan konstruksi *Vanimo Urban Fire Station* sebesar PGK 434,673.28 (setara dengan USD 121,708.52), perbaikan infrastruktur *Wutung Primary School* sebesar PGK 519,599.82 (setara dengan USD 145,487.95), dan pembangunan fasilitas *Waste Management* sebesar PGK 255,099.45 (setara dengan USD 71,427.85). Total nilai *2nd down payment* mencapai PGK 1,209,372.55 (setara dengan USD 338,624.31).

KRI Vanimo tetap berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan proyek dan mendorong penyelesaiannya, sehingga dapat mendukung penguatan hubungan ekonomi dan kerja sama lainnya antara Indonesia dan Papua Nugini.

Realisasi SUB IK 2 “Nilai investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” pada tahun 2024 tercatat sebesar **USD. 320.000** dari target sebesar **USD. 1.700.000**, sehingga capaian IK sebesar **18,82%** dengan batas toleransi capaian sebesar 120%

Perbandingan Kinerja

Tabel III.7
Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Kode IK / SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
S1.2	Target			98,50%	99%
	Realisasi			86,65%	58,15%
	Capaian			87,97%	58,74%
SUB IK 1	Target			3	4
	Realisasi			3	3
	Capaian			100%	75%
SUB IK 2	Target			USD 1.600.000	USD 1.700.000
	Realisasi			USD 888.195	USD 320.000
	Capaian			55,51%	18,82%

IK S1.2 “Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” baru diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, capaian IK di tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK tahun 2023 dan 2022.

Target IK tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi **99%** dari yang sebelumnya **98,50%** pada tahun 2023. Target tahun 2024 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2023 yang melampaui target, serta

untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan penetapan target yang menantang tetapi tetap *achievable*

Target SUB IK 1 Di samping komitmen perdagangan , komitmen investasi juga telah diaplikasikan dengan adanya bantuan hibah dari Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan *Wutung Primary school, Fire Station, dan Waste Management.*

Realisasi SUB IK 2 mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi **USD 320.000** dari **USD 888.195** pada tahun 2023. Menurunnya realisasi antara lain disebabkan oleh terhambatnya implementasi proyek investasi sektor infrastruktur publik, akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek-proyek yang telah disepakati. Selain itu, hambatan administratif seperti proses perizinan dan koordinasi lintas instansi di Indonesia dan Papua Nugini juga memerlukan waktu untuk realisasi proyek. Selain itu kurang minatnya investor swasta dari Indonesia serta perekonomian Indonesia yang lebih maju maka belum terdapat investasi dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia.

Target SUB IK 2 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi **USD. 1.700.000** dari **USD. 1.600.000** pada tahun 2023. Peningkatan didasari oleh realisasi dan capaian tahun 2023 yang jauh lebih rendah dari target pada tahun tersebut. Hal tersebut untuk memicu agar dapat menyentuh target yang lebih tinggi.

Realisasi SUB IK 1 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena berada pada posisi yang sama di tahun 2024 yaitu 3 dari 3 pada tahun 2023. Walaupun tidak terjadi kenaikan maupun penurunan realisasi nilai perdagangan, performa ekspor Indonesia hingga bulan Oktober masih terbilang baik dengan total surplus neraca perdagangan sebesar **Rp 36.795.530.404,42**, yang menunjukkan kinerja perdagangan lintas batas tetap stabil dan memberikan kontribusi positif terhadap hubungan ekonomi bilateral.

Analisis Penyebab Kurangnya Pencapaian IK

Capaian KRI Vanimo di sektor investasi belum memenuhi target karena kondisi negara setempat dan kurang minatnya pengusaha Indonesia untuk melakukan investasi di wilayah kerja (Provinsi West Sepik dan Western Province). Untuk sektor perdagangan, diperlukan upaya untuk lebih memfasilitasi dan promosi perdagangan kedua negara yang saling menguntungkan.

Untuk investasi di sektor publik Pemerintah Indonesia mendanai bantuan hibah untuk West Sepik Province yaitu:

1. *Vanimo Urban Fire Station*: **PGK 1,086,683.20**
2. *Wutung Primary School*: **PGK 1,367,362.30**
3. *Solid Waste Management Facilities*: **PGK 652,860.02**

Total realisasi pencairan dana bantuan sebesar **PGK 3,106,905.52** dari 3 komitmen investasi yang telah disepakati. KRI Vanimo telah memberikan fasilitasi dan pengawalan atas komitmen ini, mulai dari tahap peninjauan hingga pelaksanaan, untuk memastikan implementasi diplomasi ekonomi berjalan sesuai rencana. Data ini menunjukkan keberhasilan diplomasi investasi di sektor infrastruktur publik meskipun terdapat tantangan dalam optimalisasi hasil secara keseluruhan.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi khususnya dalam menjangkau komitmen investasi. Dalam rangka merealisasikan IK tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi, berikut beberapa kegiatan untuk mendukung program strategis yang telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo pada tahun 2024.

1. Konsul RI bersama Provincial Administrator West Sepik Province dan para kontraktor yang menangani bangunan hibah melakukan rapat untuk berkoordinasi dan memberikan informasi mengenai target penyelesaian pembangunan per November/awal Desember 2024.
2. Pada 26 Oktober 2024, Konsul RI melakukan kunjungan dan pengamatan terhadap ketiga proyek bangunan hibah. Terkait pembangunan *Fire Station* dan *Waste Management* disampaikan oleh pihak Tumla Investment Ltd bahwa yang masih belum terselesaikan adalah bagian dalam bangunan utama yaitu pada bagian kelistrikan dan lantai. Wutung Primary School sedang diselesaikan bangunan fisik yaitu ruang guru / perpustakaan oleh Golden Gate Investment

Proyek bantuan hibah untuk West Sepik Province, Papua Nugini, yang didanai oleh Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap penyelesaian.

Kendala dan Tantangan

1. Keterlambatan Penyelesaian Proyek Bantuan Hibah

Keterlambatan penyelesaian proyek bantuan hibah sehingga pembayaran ke-3 juga mengalami penundaan sehingga tidak dapat direalisasikan pada tahun 2024.

2. Fasilitas Perbatasan yang Belum Memadai

Fasilitas CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) di PLBN Skouw telah memadai. Namun fasilitas CIQS di pihak PNG-Wutung masih terbatas, sehingga menghambat kelancaran perdagangan dan investasi

lintas batas. Selain itu, kendala ini juga munculnya aktivitas perdagangan melalui jalan tikus sehingga tidak tercatat. Selain itu kurang transparansi peraturan PNG terkait perdagangan dan investasi khususnya di wilayah perbatasan.

3. Minimnya Promosi Dagang dan Investasi

Promosi dagang lintas batas, seperti *business matching* dan pameran dagang, belum dilakukan secara intensif di tahun 2024 karena keterbatasan anggaran. Hal ini membatasi peluang investasi baru dan potensi peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan Papua Nugini.

4. Akses Logistik dan Geografis

Kondisi geografis Papua Nugini yang sulit diakses menjadi tantangan dalam distribusi material dan tenaga kerja. Hal ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek dan membutuhkan perencanaan logistik yang lebih matang di masa depan.

Upaya Perbaikan

KRI Vanimo telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, antara lain:

1. Fasilitasi Pembayaran Proyek Hibah

KRI Vanimo melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan Indonesia, untuk kelancaran pembayaran proyek-proyek hibah infrastruktur yaitu pembangunan Fire Station, Waste Management dan Wutung Primary School setelah terselesaikannya proyek-proyek tersebut.

2. Peningkatan Promosi Dagang

KRI Vanimo mengikuti dan mendukung berbagai kegiatan promosi dagang untuk mendukung diplomasi ekonomi, seperti *Trade Expo Indonesia 2024* dan *Border Trade Fair 2024*. Kegiatan ini melibatkan pengusaha dari Indonesia dan Provinsi West Sepik untuk memperluas peluang investasi.

3. Peningkatan Kolaborasi Perbatasan

Dalam upaya memperkuat hubungan bilateral, KRI Vanimo aktif menginisiasi pembahasan terkait peningkatan fasilitasi perdagangan melalui komunikasi dengan CIQS di perbatasan PLBN Skouw-Wutung. Hal ini diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan dan investasi, sekaligus mengurangi aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan dan mendorong fasilitasi perdagangan di perbatasan kedua negara.

4. Fasilitas Business Matching

KRI Vanimo memfasilitasi kegiatan *business matching* antara pelaku usaha Indonesia dan Papua Nugini, termasuk dalam sektor teknologi dan pemasaran komoditas. Salah satunya melibatkan 44 pelaku usaha Indonesia dan 8 pelaku usaha dari Papua Nugini dalam *Border Trade Fair 2024*, guna menciptakan peluang kerja sama konkret.

5. Peningkatan Koordinasi Lintas Instansi

KRI Vanimo juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi di Indonesia dan Papua Nugini seperti dalam penyelesaian proyek investasi infrastruktur publik. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses perizinan dan menyelesaikan kendala teknis yang menghambat implementasi proyek dan kesepakatan bilateral.

2. Pelaksanaan Program Hibah Infrastruktur Publik

KRI Vanimo mendukung penyelesaian proyek hibah infrastruktur seperti pembangunan Wutung Primary School dan fasilitas pengelolaan limbah di West Sepik Province. Pembelian material dan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia difasilitasi dengan baik untuk mendorong proyek berjalan sesuai rencana.

3. Pemanfaatan MoU dan Kesepakatan Bilateral

KRI Vanimo memanfaatkan perjanjian yang ada sebagai dasar untuk mempercepat kerja sama di berbagai bidang kedua negara untuk mengupayakan fasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama ekonomi melalui/di perbatasan kedua negara.

Proyeksi Kedepan

1. Penyelesaian Proyek Hibah dan Koordinasi Pembayaran

Proyeksi di tahun mendatang mencakup penyelesaian pembayaran tahap akhir (*3rd down payment*) untuk proyek hibah seperti *Wutung Primary School*, *Vanimo Urban Fire Station* dan *Solid Waste Management Facility*. KRI Vanimo akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan dan pihak terkait untuk memastikan pembayaran tepat waktu setelah ketiga proyek bantuan hibah selesai pembangunannya. Monitoring intensif terhadap pelaksanaan proyek juga akan dilakukan untuk memastikan hasil yang optimal dan diupayakan sesuai jadwal.

2. Intensifikasi Promosi Dagang dan Business Matching

Untuk meningkatkan realisasi investasi dan perdagangan lintas batas, program promosi dagang seperti *Trade Expo Indonesia* dan *Border Trade Fair* akan ditingkatkan intensitasnya. KRI Vanimo akan berupaya

memfasilitasi kegiatan *business matching* yang melibatkan pelaku usaha dari Indonesia dan Papua Nugini. Fokus program ini adalah pada sektor infrastruktur, komoditas unggulan, dan teknologi sederhana yang relevan dengan kebutuhan pasar di wilayah kerja Konsulat RI Vanimo.

3. Peningkatan Koordinasi Lintas Instansi

Tantangan administratif yang selama ini menjadi kendala akan diatasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, baik di Indonesia maupun Papua Nugini. Pendekatan ini melibatkan penyederhanaan proses perizinan dan penguatan komunikasi antar pemangku kepentingan. KRI Vanimo juga akan mendorong integrasi program kerja lintas instansi untuk memaksimalkan efisiensi pelaksanaan program prioritas.

4. Target IK yang Menantang namun Realistis

Berdasarkan capaian dan evaluasi tahun 2024, target IK di tahun mendatang akan ditingkatkan secara bertahap namun tetap realistis. Fokusnya adalah realisasi investasi infrastruktur publik melalui bantuan hibah. Langkah ini dirancang agar tetap achievable dengan perencanaan yang lebih matang dan dukungan program prioritas yang terukur.

Dokumentasi





Konsul RI melakukan kunjungan dalam rangka pengamatan proyek bangunan hibah



Proyek Bangunan Hibah Waste Management & Dump Site



Proyek Bangunan Hibah Fire Station



III.2.4. Analisis S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Efektivitas diplomasi ekonomi berarti bahwa IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh unsur pemerintah maupun non-pemerintah.

Ruang lingkup:

IK S1.3 memiliki 2 Sub IKU, yakni:

Sub IK 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia, dengan bobot 70%

Salah satu output diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Perwakilan RI adalah promosi pariwisata. IK ini mengukur efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dengan mengukur seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI atau event promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Perwakilan RI turut menjadi peserta event.

Sub IK 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Perwakilan RI.

Sub IK 2: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia, dengan bobot 30%.

Sub IK 2 menunjukkan jumlah total warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia. Sub IK 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IK dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemlu. Namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, Pemda, masyarakat dll.) dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Informasi Kinerja

Tabel III.8
Capaian IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK *)	NILAI BOBOT **)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	Capaian SUB IK 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia	58,79%	41,15%
	Capaian SUB IK 2: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia	689,20%	206,76%
Realisasi			247,91%
Target			99%
Capaian			250,41%
Batas Toleransi			120%

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.3 “Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” tercatat sebesar **247,91%**, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar **99%**. Dengan demikian, Capaian IK mencapai **250,41%**, dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IK S1.3 diperoleh melalui penjumlahan bobot capaian SUB IK 1 dan SUB IK 2. Pada tahun 2024, realisasi SUB IK 1 “Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia,” mencapai **45%** dari target sebesar **76,54%** potensi kunjungan, sehingga capaian IK mencapai **58,79%** dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perolehan Potensi Kunjungan Wisata sejumlah **45** dari total Survei Indeks Citra dengan mengenai pariwisata dengan wilayah kerja KRI Vanimo sebesar **304 responden**.

Realisasi SUB IK 2 “Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja KRI Vanimo ke Indonesia,” pada tahun 2024 tercatat sebesar **1723 kunjungan** dari target sebesar **250 kunjungan**, sehingga capaian IK sebesar **689,20%** dengan batas toleransi capaian sebesar 120%

Perbandingan Kinerja

Tabel III. 9

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Kode IK / SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
S1.3	Target			98,50%	99%
	Realisasi			213,57%	247,91%
	Capaian			120%	250,41%
SUB IK 1	Target			76%	76,54%
	Realisasi			77%	45%
	Capaian			101,32%	58,79%
SUB IK 2	Target			200 Kunjungan	250 Kunjungan
	Realisasi			951 Kunjungan	1.723 Kunjungan
	Capaian			120%	689,20%

IK S1.3 “Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” baru diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, capaian IK di tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK tahun 2023 dan 2022.

Target IK tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi **99%** dari yang sebelumnya **98,50%** pada tahun 2023. Target tahun 2024 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2023 yang melampaui target, serta

untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan penetapan target yang menantang tetapi tetap *achievable*

Target SUB IK 1 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi **76,54%** dari **76%** pada tahun 2023. Peningkatan didasari oleh realisasi dan capaian tahun 2023 yang lebih tinggi dari target pada tahun tersebut. Selain itu, peningkatan target juga berdasarkan hasil pemetaan potensi kunjungan yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2024, selaras dengan pelaksanaan Survei Indeks Citra dan acara promosi seperti *Border Trade Fair 2023*.

Realisasi SUB IK 2 mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi **1.723 kunjungan** dari **951 kunjungan** pada tahun 2023. Meningkatnya realisasi antara lain disebabkan oleh upaya promosi yang lebih gencar melalui media sosial, kampanye langsung, atau publikasi yang lebih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan atau program yang ditawarkan dan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas belanja di Pasar perbatasan maupun di Kota Jayapura.

Target SUB IK 2 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi **250 kunjungan** dari **200 kunjungan** pada tahun 2023. Peningkatan didasari oleh realisasi dan capaian tahun 2023 yang jauh lebih tinggi dari target pada tahun tersebut.

Realisasi SUB IK 1 mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu **45%** dari **77%** pada tahun 2023. Walaupun terjadi penurunan realisasi nilai potensi kunjungan, masyarakat yang terdata melakukan kunjungan di tahun 2024 sebesar **1723 kunjungan** dengan menggunakan Paspor.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian KRI Vanimo di sektor pariwisata membuktikan bahwa diplomasi ekonomi berjalan dengan sangat efektif dalam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, KRI Vanimo telah menstimulasi aktivitas pariwisata antara pemangku kepentingan domestik dan internasional.

Pencapaian target efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata didukung oleh kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh KRI Vanimo, khususnya untuk kunjungan ke pasar di perbatasan di PLBN Skouw dan kunjungan ke Jayapura kepada warga negara PNG terutama yang tinggal di daerah West Sepik Province. Faktor terpenting dari meningkatnya jumlah kunjungan adalah Warga Negara Papua Nugini di Kota Vanimo dan sekitarnya atau daerah lain telah memiliki paspor atau dokumen perjalanan. Kegiatan perekonomian di perbatasan yang pembelinya adalah Warga Negara Papua Nugini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kunjungan ke Indonesia karena untuk melintasi

perbatasan dengan tujuan berbelanja di pasar perbatasan di PLBN Skouw dan kota Jayapura cukup menggunakan kartu Pas Lintas Batas.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi khususnya dalam menjaring potensi kunjungan.

1. Memperkenalkan dan mendorong para pejabat daerah di wilayah kerja untuk melakukan kunjungan ke Jayapura dan daerah lain di Indonesia termasuk ke Jakarta baik dalam rangka kunjungan kerja sekaligus melakukan kunjungan wisata belanja misal adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan pertemuan di Jayapura dan Jakarta. Diantaranya adalah Tim KRI Vanimo mendampingi Gubernur, pejabat pemerintah daerah, dan pengusaha dari Provinsi West Sepik, Papua Nugini, dalam kunjungan ke Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Banten, pada **9-12 Oktober 2024**.
2. Mendorong kunjungan warga PNG berkunjung ke PLBN Skouw melalui promosi penyelenggaraan *Border Trade Fair* (BTF) 2024 yang diselenggarakan pada **12-14 Desember 2024** di Zona Netral RI-PNG Skouw-Wutung dan Zona Inti Kawasan PLBN Skouw. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 11.000 pengunjung, dengan total transaksi sebesar Rp450.857.000.
3. Konsulat RI Vanimo telah mengunggah konten-konten promosi yang berkaitan dengan Ekonomi dan Pariwisata Indonesia di media sosial yaitu di platform Instagram dan Facebook. Jenis-jenis konten yang diunggah antara lain adalah pengenalan terhadap makanan khas Indonesia seperti: gudeg dari Yogyakarta; Papeda dari Papua; Mie khas Aceh. Konten TTI tempat-tempat wisata yang diunggah ke Media Sosial KRI Vanimo antara lain: Danau Toba; Kepulauan Banggai; Kawah Ijen; Danau Batur; dan Kota Senja Kaimana. Diunggah juga kerajinan-kerajinan khas Indonesia seperti: ukiran kayu dari Jepara dan Noken tas dari Papua.

Kendala dan Tantangan

Kendala

1. Keterbatasan Kepemilikan Dokumen Perjalanan

Banyak warga PNG, terutama di wilayah Vanimo, tidak memiliki paspor atau dokumen perjalanan lainnya akibat proses pengurusan yang kompleks dan

mahal. Hal ini menjadi hambatan utama bagi peningkatan potensi kunjungan wisatawan ke Indonesia.

2. Kesadaran yang Rendah terhadap Potensi Pariwisata Indonesia

Meskipun upaya promosi telah dilakukan, sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Konsulat RI Vanimo masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai destinasi pariwisata di Indonesia. Hal ini mengurangi ekspektasi dan minat mereka untuk melakukan kunjungan wisata.

3. Tantangan Infrastruktur Promosi

Keterbatasan infrastruktur digital dan fisik di wilayah kerja Konsulat menghambat pelaksanaan kampanye promosi yang lebih luas dan efisien, terutama di daerah-daerah terpencil.

4. Perubahan Preferensi Kunjungan

Sebagian besar wisatawan PNG melakukan kunjungan ke Indonesia untuk berbelanja di pasar perbatasan, sementara kunjungan ke destinasi pariwisata utama di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini menghambat pengembangan kunjungan di sektor pariwisata secara menyeluruh.

Tantangan

1. Meningkatkan Kesadaran dan Minat Wisatawan

Tantangan utama adalah menciptakan program promosi yang menarik dan edukatif untuk meningkatkan ekspektasi serta keinginan wisatawan PNG untuk mengunjungi berbagai destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk di luar pasar perbatasan.

2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal

Kerja sama dengan pemerintah lokal PNG, komunitas bisnis, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kerja menjadi peluang untuk memperluas jangkauan promosi dan mendorong lebih banyak warga PNG memiliki dokumen perjalanan.

3. Mengoptimalkan Pasar Perbatasan

Pasar perbatasan tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan PNG. Tantangannya adalah mengembangkan fasilitas dan pengalaman berbelanja yang lebih menarik agar kunjungan ke perbatasan dapat terus meningkat sambil memperkenalkan destinasi lain di Indonesia.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital memberikan peluang besar untuk menjangkau lebih banyak audiens dengan biaya yang relatif rendah. Tantangannya adalah merancang

kampanye digital yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wisatawan PNG terhadap potensi pariwisata Indonesia.

5. Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur

Tantangan lain adalah memperkuat infrastruktur fisik dan digital di wilayah kerja Konsulat maupun di area promosi lainnya, untuk memastikan aksesibilitas informasi pariwisata dan fasilitas bagi wisatawan.

6. Menghadapi Faktor Eksternal

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan lintas batas misal hari pasar hanya satu hari dalam seminggu untuk warga PNG berbelanja dan berkunjung di pasar batas di PLBN Skouw.

Upaya Perbaikan

KRI Vanimo telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, antara lain:

1. Mengoptimalkan Promosi Digital dan Media Sosial

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat PNG tentang potensi pariwisata Indonesia, Konsulat memanfaatkan teknologi digital, termasuk media sosial, sebagai platform promosi yang efektif dan hemat biaya. Konten visual seperti video destinasi wisata, infografis, dan cerita perjalanan diproduksi untuk menarik minat calon wisatawan.

2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal

Konsulat RI Vanimo memperkuat kerja sama dengan pemerintah lokal, komunitas bisnis di wilayah kerja dalam mempromosikan kunjungan ke Indonesia khususnya kota terdekat yaitu Jayapura. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas dampak promosi pariwisata dan mendorong lebih banyak warga PNG mengunjungi Indonesia.

3. Pelaksanaan Survei untuk Pemahaman yang Lebih Baik

Konsulat secara berkala melakukan survei kepada masyarakat PNG di wilayah kerja untuk memahami minat, kebutuhan, dan hambatan mereka dalam melakukan kunjungan ke Indonesia. Hasil survei digunakan untuk merancang strategi promosi yang lebih efektif dan relevan.

4. Penyelenggaraan Acara Promosi Pariwisata dan Budaya

Konsulat aktif berpartisipasi dan membantu persiapan acara-acara besar seperti Border Trade Fair. Dalam acara ini, pariwisata Indonesia dipromosikan melalui pertunjukan budaya, pameran produk unggulan, dan kampanye kuliner. Hal ini menciptakan kesan positif dan membangun

hubungan yang lebih erat dengan masyarakat PNG terutama di daerah perbatasan.

5. Penyesuaian Target yang Lebih Realistis

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, Konsulat menyesuaikan target IK agar tetap menantang namun realistis. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi capaian, seperti kondisi ekonomi dan kebijakan lintas batas.

6. Pendekatan Personal kepada Calon Wisatawan

Konsulat melakukan pendekatan personal kepada masyarakat lokal, seperti komunitas bisnis atau kelompok pelajar, untuk memberikan edukasi tentang manfaat dan prosedur berkunjung ke Indonesia. Langkah ini membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat sekaligus meningkatkan potensi kunjungan wisatawan.

Upaya perbaikan ini telah membantu mengurangi dampak kendala dan tantangan dalam pencapaian IK. Walaupun terdapat penurunan realisasi Sub IK 1 pada tahun 2024, peningkatan signifikan dalam Sub IK 2 menunjukkan keberhasilan promosi pariwisata yang lebih efektif, khususnya di pasar perbatasan. KRI Vanimo optimis bahwa dengan langkah-langkah ini, kinerja diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Proyeksi Kedepan

1. Menjalin relasi dengan pihak Imigrasi PNG

Konsulat RI Vanimo akan mendorong pihak imigrasi Papua Nugini dan Administrator Perbatasan untuk menyederhanakan proses pengurusan dokumen perjalanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang berminat berkunjung ke Indonesia. Selain itu mendorong pembuatan Kartu Lintas Batas PNG dapat diselesaikan pencetakan dan penyebarannya di kawasan perbatasan sehingga masyarakat di perbatasan dapat melakukan kunjungan ke Pasar Batas dan Jayapura menggunakan kartu lintas batas.

2. Penguatan Kerjasama untuk Pengumpulan Data Pelintasan

Konsulat RI Vanimo akan terus menjalin kerja sama dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data akurat mengenai pelintasan masyarakat Papua Nugini ke Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan tersedianya data yang lengkap dan valid untuk mendukung analisis serta perencanaan program diplomasi ekonomi dan pariwisata.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Konsulat akan memperkuat hubungan dengan pemerintah lokal, komunitas bisnis, dan UKM di wilayah kerja serta instansi terkait di Indonesia. Langkah ini juga melibatkan pelaku UMKM kedua negara dalam kegiatan promosi lintas batas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas dampak diplomasi ekonomi dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu kiranya perjanjian lintas batas menggunakan bus dari Jayapura ke Vanimo dapat direalisasikan sehingga memudahkan kunjungan wisata dari masyarakat PNG ke Jayapura.

4. Penyesuaian Target yang Terukur dan Realistis

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, Konsulat akan menetapkan target IK yang tetap menantang namun realistis. Fokus utama adalah meningkatkan Sub IK 2 secara bertahap mengingat peningkatan signifikan jumlah kunjungan pada tahun 2024. Sub IK 1 juga akan diperkuat melalui survei yang lebih representatif dan strategi promosi yang efektif, sehingga potensi kunjungan wisatawan dapat kembali meningkat.

5. Pendekatan Personal dan Komunitas

Konsulat akan memperkuat pendekatan personal kepada masyarakat lokal, seperti komunitas bisnis dan kelompok pelajar, untuk memberikan edukasi langsung tentang prosedur dan manfaat wisata ke Indonesia. Edukasi khusus akan diberikan kepada komunitas tertentu yang berpartisipasi dalam program kunjungan wisata, sehingga semakin banyak masyarakat PNG yang tertarik untuk menjelajahi destinasi Indonesia. Selain itu mendorong lembaga pendidikan di Papua agar dapat memberikan kursus bahasa Indonesia kepada masyarakat PNG di perbatasan sehingga pemahaman tentang Indonesia termasuk wisata semakin tersebar di wilayah kerja KRI Vanimo.

6. Evaluasi Berbasis Data

Konsulat akan meningkatkan sistem evaluasi berbasis data untuk memahami tren dan preferensi wisatawan PNG secara lebih mendalam. Survei rutin akan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat PNG, kendala yang mereka hadapi, serta peluang yang dapat dioptimalkan. Data ini akan menjadi dasar bagi Konsulat untuk merancang strategi promosi yang lebih relevan dan berdampak.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Konsulat RI Vanimo optimis bahwa tantangan yang ada dapat diatasi secara efektif. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan potensi kunjungan wisatawan dan jumlah kunjungan aktual, serta memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata utama. Strategi ini dirancang untuk menjadikan tahun mendatang sebagai momentum penting

dalam pengembangan pariwisata lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini.

Dokumentasi

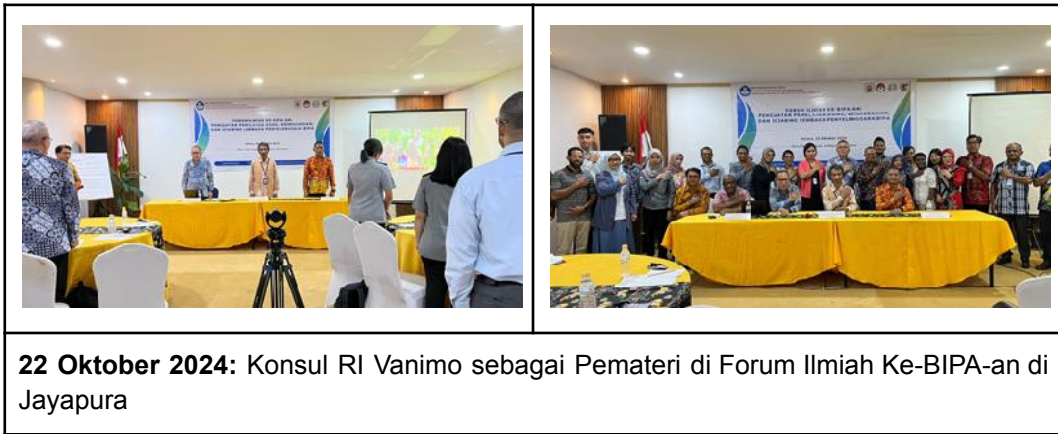


9 Juli 2024: Fasilitasi Kunjungan Tim untuk Persiapan MoU Transportasi Lintas Batas RI-PNG





9-12 Oktober 2024: Pendampingan Delegasi West Sepik pada Trade Expo Indonesia ke-39



22 Oktober 2024: Konsul RI Vanimo sebagai Pemateri di Forum Ilmiah Ke-BIPA-an di Jayapura



28 November 2024: Literasi Kewirausahaan oleh Mahasiswa STIE Port Numbay di KRI Vanimo



III.2.5. S2 Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Meningkat

Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercaya/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi maupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

Wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja rangkaian yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI. Meningkat adalah beralih pada keadaan yang menjadi lebih baik.

Sasaran Strategis (SS) S2 diukur berdasarkan capaian pada 1 (Satu) IK yakni IK S2.1 Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo.

III.2.6. Analisis S2.1 Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo.

Indeks Citra adalah Indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional.

Ruang Lingkup:

Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu TOURISM & SOCIO-CULTURE, ECONOMY, dan GOVERNANCE AND RULE OF LAW. Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengolahan data citra Indonesia di dunia internasional (<https://citraindonesia.kemlu.go.id>). Kuesioner disebar oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja.

Responden merupakan WNA di negara akreditasi/wilayah kerja yang mengetahui Indonesia. Adapun jumlah minimal responden pada setiap perwakilan ditentukan berdasarkan status perwakilan (minimal Triwulan I: 25 responden, Triwulan II: 25 responden, Triwulan III: 25 responden, Triwulan IV: 25 responden, dan Tahunan: 100 responden, untuk setiap perwakilan, kecuali untuk perwakilan kategori rawan dan berbahaya) dan dengan teknik pengambilan sampel sesuai metodologi survei yang digunakan. Adapun nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional per-Triwulan bersifat akumulatif sesuai dengan jumlah total responden dan jawaban survei dari awal penyelenggaraan survei pada tahun berjalan sampai dengan akhir tiap triwulan.

Informasi Kinerja

Tabel III. 10
Capaian IK S2.1 Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK	NILAI BOBOT
Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo	Capaian IK S2. 1: Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo	99,51%	99,51%
Realisasi			4,05 (Skala 5)
Target			4,07 (Skala 5)
Capaian			99,51%
Batas Toleransi			

Pada tahun 2024, realisasi IK S2.1 “Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo,” tercatat sebesar **4,05 dari skala 5** dibandingkan dengan target yang

ditetapkan sebesar **4,07 dalam skala 5**. Dengan demikian, capaian IK mencapai **99,51%**.

Tabel III. 11

Nama Perwakilan	Pariwisata dan Sosial Budaya	Ekonomi	Pemerintahan dan Penegakan Hukum	Total Rata-rata Persepsi per Responden	Responden TW I	Responden TW II	Responden TW III	Responden TW IV	Total Responden	Indeks Citra
PERWAKILAN RAWAN										
KBRI Tripoli	4,86	4,68	4,79	3382,22	47	556	47	56	708	4,78
KBRI Dar Es Salaam	4,69	4,46	4,56	2308,11	218	66	79	142	505	4,57
KBRI Caracas	4,52	3,96	4,06	2019,89	22	185	100	176	483	4,18
KBRI Winchoek	4,47	4,23	4,21	2060,78	51	104	140	184	479	4,30
KBRI Dili	4,31	4,20	4,11	1561,56	114	54	113	90	371	4,21
KBRI Dhaka	4,54	4,27	4,32	1470,11	99	53	45	139	336	4,38
KBRI Nairobi	4,52	4,42	4,44	1413,33	88	36	49	144	317	4,46
KRI Vanimo	4,23	4,08	3,83	1229,78	55	63	38	148	304	4,05
KJRI Mumbai	4,71	4,57	4,58	1100,11	38	50	55	95	238	4,62
KBRI Port Moresby	4,78	4,49	4,35	934,89	78	2	35	91	206	4,54

Sumber : Brafaks Kemlu dengan nomor B-00046/KEMLU/250106

Realisasi IK S2.1 diperoleh melalui pembagian antara Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden dibagi Jumlah Total Responden. Total Responden yang diperoleh KRI Vanimo dalam Indeks Citra Indonesia selama satu tahun sebesar **304 Responden**. Pada *triwulan pertama* terdata 55 responden, *triwulan kedua* terdata 63 responden, *triwulan ketiga* terdata 38 responden, dan *triwulan keempat* terdata 148 responden.

Penilaian terhadap Pariwisata dan Sosial Budaya, KRI Vanimo memperoleh nilai sejumlah **4,23 dari skala 5**. Penilaian terhadap Ekonomi, KRI Vanimo memperoleh nilai sejumlah **4,05 dari skala 5**. Penilaian terhadap pemerintah dan penegakan hukum, KRI Vanimo memperoleh nilai sejumlah **3,83 dari skala 5**. Dengan demikian, total rata-rata persepsi per responden sejumlah **1229,78**.

Perbandingan Kinerja

Tabel III. 12
Target, Realisasi, dan Capaian IK Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Meningkatkan

Kode IK / SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
S2.1	Target			4 (Skala 5)	4,07 (Skala 5)
	Realisasi			4 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)
	Capaian			100%	99,51%

Target IK tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,07 dari skala 5 yang sebelumnya 4 dari skala 5 pada tahun 2023. Target tahun 2024 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2023 yang sesuai dengan target, serta untuk memacu performa Citra positif Indonesia dengan penetapan target yang menantang tetapi tetap *achievable*.

Realisasi S2.1 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi **4,05 dari skala 5**. Meningkatnya realisasi antara lain disebabkan oleh jumlah responden yang bertambah yang semula pada tahun 2023 berjumlah **77 responden** dan pada 2024 meningkat menjadi **304 responden**.

Analisis Penyebab Pencapaian IK

Capaian KRI Vanimo pada Indeks Citra Indonesia membuktikan bahwa Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo dinilai baik oleh warga setempat. Pencapaian target Indeks Citra Indonesia didukung oleh kegiatan promosi yang telah diadakan oleh KRI Vanimo secara mandiri maupun yang bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu.

KRI Vanimo melakukan pengisian survei dengan metode luring yakni membagikan selebaran kertas yang akan diisi oleh para responden. Metode luring dipilih karena masyarakat belum memiliki akses gawai yang memadai untuk mengisi survey dengan cara daring.

KRI Vanimo merasa sangat efektif dan terbantu dalam menggunakan metode luring karena selebaran survey dapat disebar dengan jumlah yang banyak. Kelemahan dari metode survei luring adalah beberapa lembar yang telah diisi oleh responden terdapat kecacatan seperti tidak diisi oleh responden karena terlewat, atau mengisi tetapi tidak sesuai dengan panduan yang telah disampaikan. Hal tersebut membuat lembar survey menjadi tidak bisa digunakan.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung Indeks Citra Indonesia. Dalam rangka merealisasikan IK citra positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo pada tahun 2024 guna lebih mendorong pemahaman tentang Indonesia baik kepada pejabat dan masyarakat di wilayah kerja:

1. Konsulat RI Vanimo telah mengadakan acara "Nonton Bareng" Live Channel Youtube Kemlu mengenai pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri-PPTM 2024, pada hari **Senin 8 Januari 2024** bertempat di hotel

Medallion Vanimo. Pada acara tersebut selain dihadiri Jajaran Konsulat RI Vanimo juga dihadiri Wakil Sekda Pemprov West Sepik, Kapolda Provinsi West Sepik, Walikota Vanimo, Perwakilan pengusaha setempat dan wartawan Radio NBC West Sepik serta beberapa Pihak terkait Lainnya.

2. Pada tanggal **12 Februari 2024**, Konsul RI telah memfasilitasi pertemuan antara *Officer Commanding Charlie Company 2RPIR Papua New Guinea Defence Force* (PNGDF) yang membawahi Pos PNGDF di Pos Perbatasan Wutung PNG dengan Wakil Komandan Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122/TD Skouw bertempat di Zona Netral antara PLBN Skouw (Indonesia) dan Pos Perbatasan Wutung (PNG). Pertemuan dalam rangka koordinasi keamanan di perbatasan khususnya demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Indonesia tanggal 14 Februari 2024.
3. Walikota Vanimo, Sekda Provinsi West Sepik, dan jajarannya atas undangan Walikota Jayapura telah melakukan kunjungan ke Jayapura tanggal **6 - 8 Maret 2024** dalam rangka menghadiri Upacara HUT Kota Jayapura ke 114 dan pembicaraan mengenai tindak lanjut MoU sister City antara kota Jayapura dengan Vanimo.
4. Konsul RI Vanimo pada **2 – 4 April 2024** telah melakukan pendampingan kunjungan kerja *Provincial Administrator* Provinsi West Sepik Papua Nugini dan Delegasi ke Kota Jayapura dalam rangka melakukan pertemuan dengan Pejabat Sekda Provinsi Papua, kunjungan ke laboratorium Kesehatan provinsi, pertemuan dengan Kapolda Papua dan Pertemuan dengan Kepala Lembaga Masyarakat Narkoba Doyo Sentani, sekaligus mengunjungi 111 orang PN PNG yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Doyo.
5. Pada **28 Mei 2024** telah diselenggarakan *cooking class* bertempat di KRI Vanimo. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kota Jayapura dan Kota Vanimo sebagai implementasi dari MoU Kerjasama *Sister City* antara kedua kota dimaksud yang sekaligus memperkenalkan Indonesia melalui masakan.
6. Pada **19 Juli 2024**, Konsulat RI Vanimo bersama Konsulat Jenderal PNG dan Instansi Pendidikan di Jayapura telah memfasilitasi kunjungan Delegasi Kongres Pendidikan ke-39 PNG untuk melakukan studi banding ke beberapa sekolah kejuruan di Jayapura. Konsul RI mengharapkan kerjasama kedua negara di bidang pendidikan kedua negara dapat ditingkatkan di masa yang akan datang terutama pasca penandatanganan MoU di bidang pendidikan saat kunjungan PM PNG Hon. James Marape ke Jakarta tanggal 14-15 Juli 2024.
7. Konsul RI Vanimo beserta staf mendampingi Gubernur West Sepik Hon. Tony Wouwou, MP yang mendampingi Perdana Menteri PNG pada

rangkaian kunjungan kerja ke Indonesia pada **tanggal 14-15 Juli 2024** di Jakarta. Gubernur Tony Wouwou turut hadir mendampingi Perdana Menteri PNG pada acara *Business Forum* yang diselenggarakan KADIN pada tanggal 14 Juli 2024 bertempat di Menara KADIN Jakarta.

8. Pada tanggal **19 Juli 2024**, Konsulat RI Vanimo bersama Konsulat Jenderal PNG dan Instansi Pendidikan di Jayapura telah memfasilitasi kunjungan Delegasi Kongres Pendidikan ke-39 PNG untuk melakukan studi banding ke beberapa sekolah kejuruan di Jayapura. Konsul RI mengharapkan kerjasama kedua negara di bidang pendidikan kedua negara dapat ditingkatkan di masa yang akan datang terutama pasca penandatanganan MoU di bidang pendidikan saat kunjungan PM PNG Hon. James Marape ke Jakarta tanggal 14-15 Juli 2024.
9. Atas undangan *Provincial Administrator* Provinsi West Sepik, Konsul RI Vanimo telah menghadiri **43rd Remembrance Day Parade and Service** yang diselenggarakan di Vanimo Memorial Park, pada **23 Juli 2024**.
10. Pada **2 Agustus 2024** bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Ottow Geissler Jayapura, telah diselenggarakan acara penandatanganan MoU pengembangan dan peningkatan Kerjasama Pendidikan termasuk kegiatan perkuliahan dan penerimaan mahasiswa dan pegawai pemerintah dari provinsi West Sepik Papua Nugini untuk mengikuti Pendidikan di Universitas dimaksud.
11. Pada **3 dan 5 September 2024**, Konsul RI menghadiri 2 rapat koordinasi di Jayapura yang membahas antara lain: Pengaturan dan Langkah antisipatif penanganan WNI dalam melintas ke Vanimo melalui PLBN Skouw, Potensi gangguan keamanan pada saat kunjungan Paus Fransiskus ke Vanimo, penambahan jumlah personil keamanan di PLBN Skouw, pengamanan jalur perjalanan dan perbatasan untuk mencegah perlintasan ilegal, serta pendataan nomor kendaraan berupa bus dan nama pelintas segera disiapkan untuk disampaikan ke KBRI Port Moresby dengan tembusan KRI Vanimo. Pada **8 September 2024** Paus Fransiskus tiba di Vanimo pada pk 14.30 waktu setempat. Rombongan Keuskupan Jayapura hadir dalam *audiensi public* Paus Fransiskus di Vanimo dan Kembali ke Jayapura melalui Pos Perbatasan dengan aman.
12. Konsul RI telah mendampingi Tim Verifikasi PNG yang dipimpin oleh Konjen PNG di Jayapura dengan anggota berbagai pejabat dari Deplu PNG, Imigrasi, Bea Cukai serta Departemen Pertahanan PNG berkunjung ke Merauke, Asiki dan PLBN Sota (MM-13) tanggal **29 September - 4 Oktober 2024**. Tim telah berkunjung ke Asiki dan Rawa Kasat untuk bertemu dengan warga negara PNG yang tinggal di daerah tersebut yang merupakan wilayah

Provinsi Papua Selatan. Selain itu tim juga telah melakukan kunjungan ke PLBN Sota dan patok MM 13 serta bertemu dengan masyarakat PNG dan *PNG Defense Force* yang bertugas di daerah perbatasan Sota-Weam. Tim Verifikasi PNG juga mengunjungi penggilingan padi dan sawah di daerah Kabupaten Merauke.

13. KRI Vanimo bersama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (BPPK) Provinsi Papua pada tanggal **15 November 2024** bertempat di KRI Vanimo mengadakan Rapat Koordinasi dengan Provinsi West Sepik Papua Nugini. Rapat dihadiri oleh Sekretaris dan beberapa pejabat dari BPPK dan pejabat West Sepik Province terdiri dari Administrator perbatasan, Direktur *National Function*, Wakil Kadin, Pengusaha, dan Batas Vendor Association untuk membicarakan rencana pelaksanaan *Border Trade Fair RI – PNG 2024* (BTF 2024).
14. Pada **28 November 2024** bertempat di KRI Vanimo telah dilakukan kegiatan literasi kewirausahaan oleh mahasiswa STIE Port Numbay-Jayapura bekerjasama dengan Badan Perbatasan Kota Jayapura serta Vanimo Town dengan difasilitasi oleh KRI Vanimo. Kegiatan tersebut berupa “demo Masak” dengan membuat kue yang terbuat dari bahan sagu. Kegiatan dimaksud juga merupakan bagian dari realisasi MoU Kerjasama *Sister City* antara Kota Jayapura dan Vanimo Town. Pada kesempatan tersebut, Rektor STIE Port Numbay-Jayapura juga menjajaki Kerjasama Pendidikan dengan Provinsi West Sepik agar mahasiswa dari Provinsi tersebut dapat menempuh Pendidikan di STIE Port Numbay Jayapura.
15. Border trade Fair (BTF) 2024 berlangsung **pada 12 – 14 Desember 2024** di zona netral RI – PNG Skouw – Wutung dan Zona Inti Kawasan PLBN Skouw. Tujuan BTF 2024 adalah untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Papua Nugini. Acara ini dibuka dengan sambutan pada pejabat dari kedua negara yang pada intinya menekankan pentingnya kolaborasi lintas batas untuk pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi Kawasan. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan Tarian dari Papua Indonesia yaitu tarian Tifa serta tarian daerah dari Papua Nugini. Beberapa tamu dan warga yang hadir dalam acara tersebut mengenakan atribut khas Papua seperti topi mahkota dan noken sebagai bentuk Promosi Kebudayaan Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Kendala :

1. Kondisi Geografis yang Menantang

Wilayah kerja Konsulat RI Vanimo memiliki topografi yang sulit dijangkau, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Hal ini membatasi pelaksanaan survei dan distribusi informasi secara langsung kepada responden yang lebih luas.

2. Fluktuasi Situasi Keamanan

Adanya potensi gangguan keamanan dan pemberitaan ancaman keamanan serta kampanye negatif mengenai Indonesia mempengaruhi persepsi responden terhadap stabilitas pemerintah dan penegakan hukum. Hal ini diperkirakan berkontribusi pada rendahnya penilaian dalam aspek pemerintahan dan hukum pada survei citra Indonesia.

3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Terbatasnya alokasi anggaran dan jumlah staf Konsulat RI membatasi kemampuan untuk melaksanakan kegiatan secara konsisten di seluruh wilayah kerja. Hal ini menghambat jangkauan promosi citra positif Indonesia yang merata di wilayah kerja..

4. Jarangnya masyarakat setempat di wilayah kerja yang berlangganan internet

Masyarakat di wilayah kerja umumnya masih jarang menggunakan media sosial menggunakan internet mengingat mahalnya berlangganan internet sehingga menyulitkan untuk penyebaran informasi mengenai Indonesia.

Tantangan :

1. Peningkatan Partisipasi Responden

Dengan jumlah responden yang meningkat dari 77 pada tahun 2023 menjadi 304 pada tahun 2024, tantangan utama adalah mempertahankan kualitas data dan representasi yang valid. Meningkatnya jumlah responden juga mencerminkan motivasi untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

2. Target yang Lebih

Kenaikan target dari 4,00 pada tahun 2023 menjadi 4,07 pada tahun 2024 memberikan dorongan untuk meningkatkan program promosi dan koordinasi lintas sektor. Target ini menjadi motivasi untuk memperkuat citra Indonesia melalui inovasi penyebaran informasi tentang Indonesia.

3. Meningkatkan Persepsi pada Aspek Pemerintahan dan Hukum

Tantangan utama adalah memperbaiki persepsi masyarakat terkait penegakan hukum dan stabilitas pemerintahan, yang memiliki nilai terendah (3,83). Hal ini membutuhkan upaya komunikasi yang lebih efektif mengenai kebijakan dan kontribusi Indonesia di sektor ini ditengah pemberitaan negatif tentang Indonesia di wilayah kerja.

4. Memperluas Jangkauan Kegiatan Sosial dan Budaya

Tingginya nilai pada aspek pariwisata dan sosial budaya (4,23) menunjukkan potensi besar. Tantangannya adalah memperluas cakupan kegiatan budaya dan pariwisata untuk menjangkau lebih banyak audiens, terutama di wilayah terpencil.

Upaya Perbaikan

KRI Vanimo telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai. Berikut adalah solusi yang telah dilakukan oleh Konsulat RI Vanimo selama tahun 2024:

1. Optimalisasi Teknologi Digital untuk Jangkauan Responden

Konsulat RI Vanimo memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak responden di wilayah kerja yang sulit diakses. Platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan survei daring digunakan untuk memastikan partisipasi masyarakat lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas survei, tetapi juga memperluas jangkauan penyebaran informasi mengenai Indonesia oleh Konsulat.

2. Pelibatan Mitra Lokal

Kerja sama dengan pemerintah lokal, seperti Pemprov West Sepik dan pemerintah kota Vanimo, menjadi solusi penting dalam memperluas cakupan program. Konsulat juga melibatkan institusi pendidikan, komunitas bisnis, dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat di wilayah kerja tentang Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Program Sosial Budaya

Konsulat memperluas dan meningkatkan kualitas program budaya, seperti *cooking class* dan pertunjukan seni tradisional, yang sukses memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat lokal. Elemen budaya ini juga diintegrasikan dalam promosi pariwisata untuk meningkatkan persepsi positif pada aspek sosial budaya dan pariwisata. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang kaya akan nilai budaya.

4. Penguatan Komunikasi Publik dan Branding

Konsulat meningkatkan publikasi kegiatan melalui media lokal, radio, dan televisi untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, materi promosi visual seperti video pendek dan infografis dikembangkan untuk menarik perhatian berbagai kalangan. Dengan komunikasi yang lebih intensif dan menarik, persepsi positif terhadap Indonesia di wilayah kerja Konsulat semakin meningkat.

5. Pendekatan Personal kepada Responden

Untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, Konsulat melakukan kunjungan langsung ke komunitas kecil di wilayah kerja. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran Indonesia di wilayah tersebut.

6. Pengelolaan Efisiensi Sumber Daya

Konsulat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan berdampak luas dan menggunakan pendekatan kolaboratif dengan mitra lokal. Hal ini membantu mengurangi beban anggaran tanpa mengurangi efektivitas program.

7. Peningkatan Kapasitas Internal

Penguatan SDM Konsulat dengan penambahan personil yang menangani Pensosbud dan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyebaran informasi kepada publik di wilayah kerja.

8. Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga

Konsulat memperkuat koordinasi dengan KBRI Port Moresby, instansi pemerintah, dan mitra kerja di Indonesia untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program penyebaran informasi di wilayah kerja..

Berbagai solusi yang dilakukan Konsulat RI Vanimo sepanjang tahun 2024 telah memberikan dampak signifikan, seperti peningkatan jangkauan responden menjadi 304, perbaikan persepsi masyarakat terhadap aspek pariwisata dan budaya, serta efisiensi operasional yang lebih baik.

Proyeksi Kedepan

1. Penguatan Survei Secara Daring

Konsulat RI Vanimo akan meningkatkan penggunaan teknologi digital sebagai upaya menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah kerja yang sulit diakses.

2. Fokus pada Persepsi Negatif dan Peningkatan Persepsi Positif

Untuk mengatasi persepsi rendah di bidang pemerintahan dan penegakan hukum, Konsulat akan menjalankan program edukasi publik yang lebih strategis. Selain itu, kampanye informasi melalui media lokal akan diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di wilayah kerja.

3. Diversifikasi Program Budaya dan Ekonomi

Konsulat akan memperluas cakupan program budaya dan ekonomi yang telah terbukti meningkatkan persepsi positif di wilayah kerja. Untuk itu akan diperkuat melalui kolaborasi dalam acara promosi ekonomi dan budaya seperti Border Trade Fair.

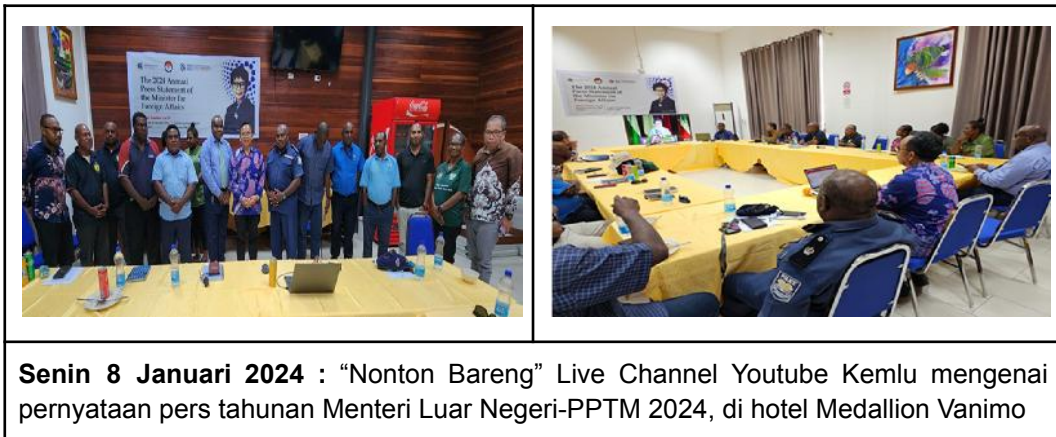
4. Penguatan Hubungan dengan Mitra Lokal

Kolaborasi dengan pemerintah lokal, institusi pendidikan, dan komunitas bisnis di Papua Nugini akan terus diperkuat. Program pendidikan lintas batas, seperti beasiswa dan pertukaran pelajar, akan menjadi salah satu prioritas utama. Di sisi lain, kerja sama ekonomi yang berfokus pada pengembangan wilayah perbatasan akan terus ditingkatkan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien

Pengelolaan anggaran akan diarahkan pada program prioritas dengan dampak besar, sementara program yang kurang strategis akan dievaluasi untuk efisiensi.

Dokumentasi





12 Februari 2024 : Konsul RI memfasilitasi pertemuan antara Officer Commanding Charlie Company 2RPIR PNGDF dan Wakil Komandan Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122/TD Skouw di Zona Netral PLBN Skouw-Wutung.



6-8 Maret 2024: Kunjungan Walikota Vanimo ke Jayapura untuk HUT Kota Jayapura ke-114 dan Tindak Lanjut MoU Sister City



2-4 April 2024: Pendampingan Kunjungan Kerja Provincial Administrator West Sepik ke Jayapura



8 April 2024: Pembahasan Kerjasama Universitas OTTO Geissler Papua dengan Pemerintah West Sepik Province



28 Mei 2024: Cooking Class di KRI Vanimo sebagai Implementasi MoU Sister City Jayapura-Vanimo

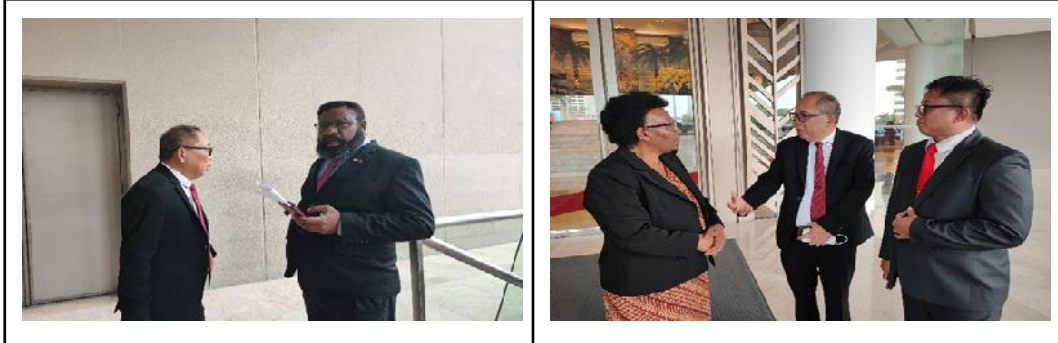


29 Mei 2024: Pertemuan dengan National Fisheries Authority PNG Terkait Penyerahan Kapal Run Zeng 5 dan Repatriasi 19 WNI





9 Juli 2024: Fasilitasi Kunjungan Tim Kemenhub dan BPP Papua untuk Persiapan MoU Transportasi Lintas Batas



14-15 Juli 2024: Pendampingan Gubernur West Sepik dalam Kunjungan Kerja Perdana Menteri PNG ke Indonesia





19 Juli 2024: Fasilitasi Studi Banding Delegasi Kongres Pendidikan ke-39 PNG ke Jayapura



23 Juli 2024: Partisipasi Konsul RI Vanimo dalam 43rd Remembrance Day Parade di Vanimo



2 Agustus 2024: Penandatanganan MoU Kerjasama Pendidikan antara Universitas Ottow Geissler dan Provinsi West Sepik



17 Agustus 2024: Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI oleh KRI Vanimo



Situasi pengecekan dokumen perjalanan di Pos Perbatasan Wutung (PNG)

Rombongan Bus Indonesia tiba di Vanimo



3, 5, dan 8 September 2024: Koordinasi dan Pengamanan Kunjungan Paus Fransiskus ke Vanimo







5 November 2024: Pelaksanaan BLOM RI-PNG ke-27 Membahas Isu Strategis Perbatasan



15 November 2024: Konsul RI Vanimo Hadiri Serah Terima Jabatan Provincial Administrator West Sepik





15 November 2024: Rapat Koordinasi Persiapan Border Trade Fair RI-PNG 2024 di KRI Vanimo



28 November 2024: Literasi Kewirausahaan dan Realisasi MoU Sister City Jayapura-Vanimo di KRI Vanimo



9-10 Desember 2024: Border Liaison Meeting ke-18 dan Kunjungan ke PLBN Sota di Merauke





III.3 Customer Perspective

III.3.1. C1 Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KRI Vanimo yang Prima

Sasaran Strategis (SS) C1 diukur berdasarkan capaian pada 3 (tiga) IK dan perhitungan capaian pada masing-masing IK, dengan rincian sebagai berikut:

1. IK C.1.1 Persentasi kasus WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang diselesaikan
2. IK C.1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo
3. IK C.1.3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KRI Vanimo

Untuk tahun 2024 Sasaran Strategis Pelindungan WNI dan pelayanan publik KRI Vanimo yang prima telah diukur secara periodik triwulanan selama kurun waktu Bulan Januari hingga Desember 2024 (Triwulan I, II, III dan IV) pada Aplikasi AKSI. Terjadi peningkatan realisasi dan capaian pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi dan Capaian IK C.1.1 Persentasi kasus WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang diselesaikan realisasi mencapai 85 melebihi target yang dicanangkan yaitu 84 sehingga capaian mencapai 101,19 persen namun belum melebihi batas toleransi 120 persen. Sementara IK C.1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo dan IK C.1.3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KRI Vanimo sesuai dengan target yang dicanangkan pada PK Kepala Perwakilan RI Vanimo. Berikut tabel Target, Realisasi dan Capaian IK C.1 Pelindungan WNI dan pelayanan publik KRI Vanimo yang prima:

Perbandingan Kinerja

Tabel III. 13
Target, Realisasi, dan Capaian IK Pelindungan WNI dan pelayanan publik KRI
Vanimo yang prima

Kode IK/ SUB IK		2020	2021	2022	2023	2024
IK C.1.1	Target	N/A	N/A	...	83	84
	Realisasi	N/A	N/A	...	84	85
	Capaian	N/A	N/A	...	101,20	101,19
IK C.1.2	Target	N/A	N/A	...	4	4
	Realisasi	N/A	N/A	...	4	4
	Capaian	N/A	N/A	...	100	100
IK C.1.3	Target	N/A	N/A	...	4	4
	Realisasi	N/A	N/A	...	4	4
	Capaian	N/A	N/A	...	100	100

III.3.2. Analisis C.1.1 Persentase Kasus WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Diselesaikan

Kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang ditangani Perwakilan RI di Luar Negeri.

Kasus Khusus termasuk high profile case, seperti hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidental dan/atau massive yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.

Kasus Umum antara lain kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pencurian, pencucian uang, pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan ketentuan internasional.

Pembobotan Kasus WNI di Luar Negeri terdiri dari:

1. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan dengan bobot: 55 %
2. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan dengan bobot: 45 %

Pertimbangan pembobotan didasarkan pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dan penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri.

Kasus yang selesai adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional; hukum negara setempat; dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.

Kasus yang ditangani adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, ataupun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Penghitungan kasus WNI yang diselesaikan mencakup kasus yang ditangani dan diselesaikan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember), yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Sumber data berasal dari Laporan penanganan kasus, database Portal Peduli WNI, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus.

Tabel III. 14
Capaian IK C.1.1 Persentase kasus WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian IK*)	Nilai Bobot **)
Persentase kasus WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang diselesaikan	Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan dengan bobot: 55 %	55 %	55 %
	Persentase Kasus Umum yang diselesaikan dengan bobot: 45 %	- %	45 %
Realisasi			103.67 %
Target			84 %

Capaian	123.41 %
Batas Toleransi****) (jika capaian melebihi 120%)	120,00 %

Narasi Realisasi Kinerja

Penanganan kasus khusus yang dilakukan oleh KRI Vanimo adalah kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO terhadap 19 orang Anak Buah Kapal/ABK dari Kapal Run Zheng 5 yang mempekerjakan Anak Buah Kapal dengan modus perekrutan dan perlakuan di tempat kerja memenuhi unsur TPPO. Kasus 19 ABK ini terjadi di perairan Provinsi Western, Papua Nugini yang masuk ke dalam wilayah kerja KRI Vanimo. Kasus 19 ABK ini dinyatakan selesai dilakukan oleh KRI Vanimo karena otoritas Provinsi Western yang menangani kasusnya telah melimpahkan seluruh berkas perkara, korban dan alat bukti kapal kepada otoritas Pemerintah Pusat di Port Moresby, sehingga kasus ini diambil alih oleh KBRI Port Moresby.

Sebelum kasus dilimpahkan ke National Fisheries Authority (NFA) di Port Moresby, dalam proses penanganan 19 ABK WNI KRI Vanimo telah memperoleh persetujuan dari Imigrasi PNG untuk repatriasi 19 ABK tersebut, namun proses tersebut tidak dapat terlaksana karena pemberitahuan resmi dari NFA penanganan kasus masih dalam proses sehingga ABK dimaksud dilarang meninggalkan kapal/wilayah PNG.

Pada tanggal 29 November 2024, KRI Vanimo telah memfasilitasi pemulangan 19 ABK WNI tersebut oleh KBRI Port Moresby melalui jalur perjalanan Port Moresby-Vanimo-Batas RI-PNG untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tindak lanjut di dalam negeri.

Dari 9 kasus umum yang didapati telah selesai 6 kasus umum telah selesai menjalani hukuman dan telah kembali ke Indonesia.

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk kasus khusus yang ditangani oleh KRI Vanimo kasus dugaan tindak pidana TPPO terhadap 19 ABK WNI sebagai korban dengan modus perekrutan dan perlakuan di tempat kerja memenuhi unsur TPPO.

Penanganan kasus umum oleh KRI Vanimo yang melibatkan WNI sebagai korban yaitu kasus Sdr. APS yang menuntut seorang pria berkebangsaan Filipina telah melakukan upaya pemerkosaan terhadap dirinya. Konsulat RI secara intensif telah mendampingi pelaporan yang bersangkutan kepada Kepolisian Vanimo serta menjalani proses pengadilan di Pengadilan Distrik Vanimo. Proses penanganan kasus berjalan cukup lama antara lain diakibatkan oleh proses pemeriksaan pelaku, korban dan saksi yang dilakukan

penyidik kepolisian Vanimo terkendala oleh tidak adanya suplai listrik yang memadai di Kota Vanimo saat itu, serta proses di Pengadilan Distrik Vanimo yang selalu mengalami penundaan akibat dari belum lengkapnya dokumen penuntutan yang disiapkan oleh jaksa penuntut dari Kepolisian Vanimo.

Kasus Sdr. APS terjadi pada 19 November 2023 namun yang bersangkutan baru melaporkan kasusnya pada 30 November 2023, sehingga tidak dapat dilakukan visum oleh karena jeda waktu yang cukup lama dari saat kasus terjadi. Hal inilah menjadi salah satu titik lemah dari upaya penuntutan kepada terduga pelaku menjadi gagal.

Pada tanggal 1 Juli 2024 Hakim Pengadilan Distrik Vanimo telah memutuskan bahwa kasus dugaan perkosaan yang dilakukan oleh tersangka WN Filipina terhadap Sdr. APS tidak dapat dilanjutkan atas dasar tidak cukupnya bukti.

Kasus umum lainnya yang ditangani oleh KRI Vanimo antara lain terkait kasus illegal entry, sengketa Pekerja Migran Indonesia dengan perusahaan pemberi kerja serta terdapat 1 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana seorang WNI dan 1 anaknya sebagai korban.

Terdapat 1 kasus yang melibatkan 3 orang pelaku yaitu kasus percobaan pembunuhan 1 orang Warga Negara Papua Nugini yang terjadi di Desa Dawi, Vanimo. Kasus ini sempat mengakibatkan terjadi penyerangan terhadap pemukiman 3 orang pelaku oleh keluarga dan kelompok masyarakat dimana korban bertempat tinggal.

Ketiga pelaku yaitu Leminus Gombo, Yoris Karoba dan Lamina Karoba berasal dari komunitas masyarakat yang bermukim di pinggir kota Vanimo, mereka umumnya adalah orang-orang yang berasal dari wilayah Papua Indonesia sehingga dinyatakan oleh pihak kepolisian dengan status WNI, namun setelah dilakukan verifikasi oleh KRI Vanimo, ketiga orang tersebut tidak dapat membuktikan statusnya sebagai WNI melalui dokumen identitas dan tidak dapat memberikan informasi secara pasti dimana alamat tinggalnya di Indonesia.

Terkait penanganan kasus umum, seperti kasus dugaan pemerkosaan, keimigrasian dan dugaan pidana lainnya, KRI Vanimo telah menangani sebanyak 21 kasus, dari jumlah tersebut sebanyak 14 kasus telah selesai, dengan data sebagai berikut:

Tabel III. 15
Penanganan Kasus WNI Umum

No.	Nama dan Alamat	Tempat/Tanggal Lahir	Kasus	Tindak Lanjut	Status Kasus
1.	Sdr. MB	Manokwari, 8 Agustus 1980	Illegal Entry	Telah selesai menjalani hukuman 6 bulan Repatriasi	Selesai
2.	Sdr. ACW	Jayapura, 21 Januari 1995	KDRT oleh WN PNG	Kembali ke Indonesia	Selesai
3.	Sdr. ZRM	Manokwari, 29 April 2020	Anak dari Andriana Caronine Wally	Kembali ke Indonesia	Selesai
4.	Sdr. RF	Jayapura, 15 Juli 1997 (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal entry	Deportasi	Selesai
5.	Sdr. COR	Manokwari, 25 Februari 2003	Illegal entry	Deportasi	Selesai
6.	Sdr. HM	Sumbe, 16 Mei 1996	Illegal entry	Deportasi	Selesai
7.	Sdr. RL	Kaso, 11 Desember 2002	Illegal entry	Deportasi	Selesai
8.	Sdr. MM	20 Desember 2002 (tidak memiliki dokumen identitas)	illegal trading/export	Telah selesai menjalani hukuman dan telah Kembali secara mandiri	Selesai

9.	Sdr. GG	29 tahun (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal Fishing	Telah selesai menjalani hukuman 5 bulan dan telah Kembali secara mandiri	Selesai
10.	Sdr. GG	39 tahun (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal Fishing	Telah selesai menjalani hukuman 5 bulan dan telah Kembali secara mandiri	Selesai
11.	Sdr. SY	7 Agustus 1994 (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal Fishing	Telah selesai menjalani hukuman 5 bulan dan telah Kembali secara mandiri	Selesai
12.	Sdr. APS	Selong, 30 November 1994	Dugaan Perkosaan (korban)	Pelaku dinyatakan tidak bersalah	Selesai
13.	Sdr. JB	Jawai, 12 April 1976	Kasus PHK/Gaji PMI Sunland Ltd	Telah selesai negosiasi dengan perusahaan	Selesai
14.	Sdr. RB	Sambas, 7 September 1980	Kasus PHK/Gaji PMI Sunland Ltd	Telah selesai negosiasi dengan perusahaan	Selesai
15.	Sdr. JM	21 Desember 1999 (tidak memiliki dokumen identitas)	illegal trading/export	Dalam proses Pengadilan Distrik Daru, Provinsi Western	Akan dibebaskan pada Februari 2024

16.	Sdr. GSJ	Merauke, 9 Mei 1984 (tidak memiliki identitas)	Illegal Entry (berdagang gelembung ikan)	6 bulan atau denda K 3000	Proses Pengadilan
17.	Sdr. MAK	Merauke, 15 Desember 1989	Illegal Entry (berdagang gelembung ikan)	6 bulan atau denda K 3000	Proses Pengadilan
18.	Sdr. LG	Wamena, 1995 (tidak memiliki dokumen identitas)	Kasus Percobaan Pembunuhan WN PNG	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses Pengadilan Distrik Vanimo, Provinsi West Sepik • Tidak dapat membuktikan statusnya sebagai WNI 	Proses Pengadilan
19.	Sdr. YK	-	Kasus Percobaan Pembunuhan WN PNG	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses Pengadilan Distrik Vanimo, Provinsi West Sepik • Tidak dapat membuktikan statusnya sebagai WNI 	Proses Pengadilan
20.	Sdr. LK	Wamena, 1995 (tidak memiliki dokumen identitas)	Kasus Percobaan Pembunuhan WN PNG	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses Pengadilan Distrik Vanimo, Provinsi West Sepik • Tidak dapat membuktikan statusnya sebagai WNI 	Proses Pengadilan
21.	Sdr. MSU	Kadinge, 20 Juli 1986	Kasus PHK/Gaji PMI Sunland Ltd,	Sedang dalam negosiasi dengan perusahaan	Proses Negosiasi

KRI Vanimo selama tahun 2024 telah melakukan serah terima jenazah WNI kepada pihak keluarga atau yang mewakili dan memfasilitasi repatriasi 4 jenazah WNI dari Vanimo ke perbatasan RI-Papua Nugini di Perbatasan Skouw-Wutung, dengan data sebagai berikut:

Tabel III. 16
Repatriasi Jenazah WNI ke Indonesia

No.	Nama dan Alamat	Tempat/Tanggal Lahir	No NIK/Paspor/Dokumen	Penyebab Kematian	Tanggal Dipulangkan
1.	Organes Sapramin Alamat: Kampung Kendate RT 001 RW 001 Kelurahan Kendate, Kecamatan Depapre, Kabupaten Jayapura	Kendate, 2 Januari 1970	910303020170 0001 Nelayan	Tenggelam di perairan laut perbatasan RI-Papua Nugini	23 Februari 2024
2.	Yance Ireeuw Alamat:	Jayapura, 28 Januari 1963	Permanent Resident	Sakit	4 Juni 2024
3.	Tri Krishartoko Alamat: Dusun Beringin Jaya, Kelurahan Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Puhuwato, Propinsi Gorontalo	Surakarta, 18 April 1966	X2898152	Kecelakaan Kerja	19 Oktober 2024
4.	Asnan Alamat: Dusun Sempadan RT 010 RW 005 Kelurahan Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	Sidu, 6 November 1987	E7101259	Kecelakaan Kerja	7 Desember 2024

Faktor Penghambat

Penanganan kasus yang melibatkan WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang mencakup wilayah Provinsi West Sepik dimana Kantor Konsulat RI Vanimo berada di Kota Vanimo sebagai ibukota dari Provinsi West Sepik serta Provinsi Western yang berada di sebelah selatan dengan Kota Daru sebagai ibukotanya.

Jarak antara Kota Vanimo dan Kota Daru jika ditarik garis lurus sekitar 730 kilometer. Untuk mencapai Kota Daru dari Kota Vanimo moda transportasi yang dapat digunakan hanya pesawat udara yang harus ditempuh melalui jalur penerbangan transit di Ibu Kota Port Moresby.

Kendala jarak dan transportasi menjadi salah satu faktor penghambat KRI Vanimo dalam penanganan kasus di Provinsi Western, khususnya kasus *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing, illegal entry* dan kasus lainnya yang dilakukan oleh WNI yang umumnya masuk dari perairan Indonesia di Provinsi Papua Selatan.

Langkah penanganan kasus di Provinsi Western juga memerlukan pertimbangan dari sisi anggaran, mengingat biaya transportasi pesawat udara pergi-pulang dari Vanimo ke Daru sebesar PGK 4.900 atau sekitar Rp. 19.600.000 (Kurs PGK 1 = Rp. 4000), disamping itu kondisi Kota Daru sebagai kota yang dapat dikategorikan sebagai area merah karena tingginya penyebaran penyakit TBC menjadi pertimbangan khusus bilamana akan melakukan kunjungan.

Dalam penanganan kasus di Provinsi Western khususnya di Kota Daru, KRI Vanimo seringkali menghadapi kendala dan kesulitan untuk memperoleh informasi dari otoritas terkait di Kota Daru seperti kepolisian, imigrasi, otoritas perikanan, yang antara lain disebabkan karena jaringan komunikasi telepon yang sulit, kurangnya transparansi aparat hukum.

Untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan penanganan kasus WNI, KRI Vanimo sering dibantu oleh Bu seorang sukarelawan Warga Negara Papua Nugini asal Indonesia sebagai guru dan penerjemah Bahasa Indonesia di Pengadilan Distrik Daru. Informasi awal mengenai penanganan kasus WNI lebih banyak didapat dari yang bersangkutan karena banyak diminta oleh pengadilan sebagai penterjemah bila ada WNI yang menghadapi permasalahan hukum.

Selama kurun waktu tahun 2024, sebanyak 26 WNI yang menghadapi kasus di Provinsi Western sebagaimana data terlampir:

Tabel III. 17
Kasus WNI di Provinsi Western

No.	Nama dan Alamat	Tempat/Tanggal Lahir	Kasus	Tindak Lanjut	Status Kasus
1.	Muhamad Alamsyah Alamat: Kp. Pasar Malang, Sukamaju, Cibeber, Cianjur Asal: Cianjur	Cianjur, 13 Maret 2003	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai

2.	Dani Sopian Alamat: Rawamerta Asal: Karawang	Karawang, 11 Juni 1999	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
3.	Acep Puad Alamat: Urug, Kawalu Asal: Tasikmalaya	Tasikmalaya, 18 Agustus 1982	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
4.	Saepul Rojani Alamat: Cihampelas Asal: Bandung	Bandung, 26 Januari 1995	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
5.	Agus Tri Andani Alamat: Pengantingan Asal: Banyuwangi	Jember, 2 Agustus 1984	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
6.	Sahroni Alamat: Rawamerta Asal: Bandung	Karawang, 13 Desember 2001	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
7.	Tajudin Rusmana Alamat: Kp. Palawija, Tahiang, Salawu, Tasikmalaya Asal: Tasikmalaya	Bandung, 22 Maret 1989	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
8.	Adrius Mone Alamat: Sumba Timur Asal: NTB	Aha Kara, Sumba, 10 Agustus 2004	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai

9.	Ajun Alamat: Dawuan Timur Asal: Karawang	Sukabumi, 2 Januari 1979	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
10.	Ade Kurnia Sandi Alamat: Pangalengan Asal: Bandung	Bandung, 12 Januari 2000	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
11.	Rangga Saputra Alamat: Kp. Panyeredan, Desa Margajaya, Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya Asal: Tasikmalaya	Tasikmalaya, 25 Desember 2004	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
12.	Soleman Mone Alamat: Sumba Timur Asal: NTB	Iru Kaha, Sumba, 3 Maret 2001	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
13.	Kasim karma Bakti Alamat: Dawuan Timur Asal: Karawang	Karawang, 1 Januari 1982	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
14.	Apandi Alamat: Kp. Kaban, Wanci Mekar, Kota Baru, Karawang Asal: Karawang	Karawang, 7 Juni 1982	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
15.	Rendi Alamat: Meral Karimun, Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun, 15 Juni 1982	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai

16.	M. Rafli Ahadi Alamat: Kp. Pasar, Cihampelas, Bandung Asal: Bandung	Bandung, 20 November 2008	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
17.	Faiz Kamaludin Alamat: Kp. Ciharuman, RT 02 RW 10 No. 61, Desa Jelegong, Kutawaringin, Kabupaten Bandung Asal: Bandung	Bandung, 26 Juli 2001	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
18.	Alwi Salsabili Al Isnaeni Alamat: Cihampelas Asal: Bandung	Bandung, 12 November 2004	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
19.	Aditya Iskandar Alamat: Jl. Cihampelas, Gg. Duren, RT 5 RW 1 No. 70, Cihampelas, Bandung Asal: Bandung	Bandung, 26 Juni 2004	Dugaan TPPO dan Illegal Fishing Kapal Run Zheng 5 di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ditangani KBRI Port Moresby • Repatriasi 	Selesai
20.	Marcelus Marcel Alamat : Merauke Asal: Motai, Kecamatan Wei Domu, Kupang, NTT	20 Desember 2002 (tidak memiliki dokumen identitas)	illegal trading/export	Telah selesai menjalani hukuman dan telah Kembali secara mandiri	Selesai
21.	Geraldus Gepse Alamat: Kampung Dokim, Distrik Tubang, Kabupaten Merauke Asal: Merauke	29 tahun (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal Fishing	Telah selesai menjalani hukuman 5 bulan dan telah Kembali secara mandiri	Selesai
22.	Robby Basik Alamat: Kampung Dokim, Distrik Tubang, Kabupaten Merauke Asal: Merauke	39 tahun (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal Fishing	Telah selesai menjalani hukuman 5 bulan dan telah Kembali secara mandiri	Selesai
23.	Sergius Yolmen Alamat: Kampung Dokim, Distrik Tubang, Kabupaten Merauke Asal: Merauke	7 Agustus 1994 (tidak memiliki dokumen identitas)	Illegal Fishing	Telah selesai menjalani hukuman 5 bulan dan telah Kembali secara mandiri	Selesai

24.	Jerry Mau Alamat: Merauke Asal: Motai, Kecamatan Wei Domu, Kupang, NTT	21 Desember 1999 (tidak memiliki dokumen identitas)	illegal trading/export	Dalam proses Pengadilan Distrik Daru, Provinsi Western	Akan dibebaskan pada Februari 2024
25.	Gede Suropati Jahra Alamat: Lampu Satu, Merauke Kota Asal: NTB	Merauke, 9 Mei 1984 (tidak memiliki identitas)	Illegal Entry (berdagang gelembung ikan)	6 bulan atau denda K 3000	Proses Pengadilan
26.	Muhammad Abdul karim Alamat: Lampu Satu, Merauke Kota Asal: NTB	Merauke, 15 Desember 1989	Illegal Entry (berdagang gelembung ikan)	6 bulan atau denda K 3000	Proses Pengadilan

Kasus pelanggaran keimigrasian seperti illegal entry, illegal fishing dan perdagangan ilegal lainnya menjadi kasus yang banyak dilakukan oleh WNI di wilayah kerja KRI Vanimo. Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan:

1. Hubungan kekerabatan antara WNI dan WN Papua Nugini yang bermukim di wilayah perbatasan dimana kedua kelompok masyarakat ini senantiasa melakukan kegiatan saling kunjung yang telah dilakukan sejak sebelum terbentuknya entitas negara yang terpisah menjadi dua wilayah berbeda. Kegiatan ini dilakukan secara tradisional hingga saat ini tanpa memenuhi persyaratan keimigrasian melalui kepemilikan dokumen perjalanan yang sah seperti paspor, visa dan kartu lintas batas, sehingga berakibat terjadi penangkapan oleh aparat terkait Papua Nugini karena dinilai telah melakukan perlintasan batas negara secara ilegal yang berujung pada sanksi denda atau kurungan penjara.
2. Daya tarik sumber daya alam Papua Nugini yang masih berlimpah khususnya sumber daya alam di laut seperti ikan, teripang, gelembung ikan/Fish Maw, gigi ikan dugong mendorong banyak nelayan Indonesia masuk untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Papua Nugini.

Percepatan / Langkah Perbaikan / Proyeksi Kedepan

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam melakukan upaya perlindungan WNI serta untuk melakukan langkah preventif, KRI Vanimo akan memaksimalkan berbagai langkah, antara lain:

1. Melakukan pendekatan kepada otoritas terkait di wilayah kerja, baik yang berada di Provinsi West Sepik maupun Provinsi Western. Upaya ini dilakukan untuk membangun jejaring komunikasi yang kuat dan terbangun kepercayaan antara kedua pihak, langkah ini diharapkan dapat mendeteksi

dan menangani secara dini bilamana terjadi permasalahan/kasus yang melibatkan WNI;

2. Melakukan kegiatan penyadaran publik melalui diseminasi informasi serta kepedulian WNI yang ada di wilayah kerja KRI Vanimo maupun kepada Pemerintah dan masyarakat yang di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini khususnya terkait hukum di Papua Nugini, cara bermigrasi yang aman bagi WNI serta memberikan berbagai contoh kasus WNI akibat pelanggaran hukum di Papua Nugini;
3. Membangun dan menjembatani koordinasi dan komunikasi yang kuat antara otoritas kedua negara khususnya yang menyangkut CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security) sehingga diharapkan kerjasama maupun penanganan permasalahan dapat berjalan dengan baik.

III.3.3. Analisis IK C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Kekonsuleran adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum nasional dengan memperhatikan hukum negara mitra serta kebiasaan dan hukum internasional yang mencakup, namun tidak terbatas pada layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Pelayanan publik dalam lingkup kekonsuleran mencakup layanan terkait pengurusan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi dan jasa konsuler warga negara asing.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran diperoleh melalui survei (manual dan/atau elektronik) kepada responden yang sedang/telah menerima pelayanan kekonsuleran. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran merujuk Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan KRI Vanimo dengan responden orang/Perusahaan, Staf/Pejabat Kementerian/Lembaga, Organisasi Internasional, Pemda setempat dan Perwakilan Negara Asing. nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran dihitung sebagai berikut:

Triwulan I (TW I) = nilai persepsi periode Januari s.d. Maret
 Triwulan II (TW II) = nilai persepsi periode April s.d. Juni
 Triwulan III (TW III) = nilai persepsi periode Juli s.d. September
 Triwulan IV (TW IV) = nilai persepsi tahunan = [(TW I + TW II + TW III + TW IV)]/4

Narasi Realisasi Kinerja

Pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo selama kurang waktu Januari hingga Desember 2024 didominasi oleh pelayanan penerbitan paspor dan validasi dokumen kontrak kerja. Berikut tabel pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo tahun 2024:

Tabel III. 18
Pelayanan Kekonsuleran

PELAYANAN KEIMIGRASIAN

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	JML
1.	Penerbitan Paspor RI Non SIMKIM - 48 Halaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Penerbitan Paspor RI SIMKIM - 48 Halaman	25	-	12	4	11	-	5	-	-	-	-	-	57
3.	SPLP Perorangan (SIMKMI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	SPLP Perorangan (tanpa Biometrik)	-	-	-	-	1	21	2	-	-	-	-	-	24

PELAYANAN KEIMIGRASIAN WNA

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	JML
1.	Visa Kunjungan Non Wisata SIMKIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Visa Kunjungan Wisata SIMKIM	7	7	6	3	4	3	1	-	-	2	-	-	33
3.	Visa Diplomatik/Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

PELAYANAN KEKONSULERAN LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	JML
1.	Legalisasi Bisnis	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
2.	Legalisasi Non-Bisnis Berbayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Verifikasi Kontrak Kerja PMI	4	6	37	9	12	21	6	12	22	14	20	1	164
4.	Surat Pengganti SIM Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Surat Keterangan Lahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Surat Keterangan Kematian	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4
7.	Pembaharuan Buku Pelaut	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
8.	Legalisir Surat Kuasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.	Surat Avidafit (Berkewargaan Ganda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Sejalan dengan pelaksanaan pelayanan kekonsuleran perlu dilakukan survei kepada pemohon pelayanan untuk mengukur kualitas pelayanan, sarana serta prasarana pelayanan yang dimiliki oleh KRI Vanimo.

Rekapitulasi survei persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KRI Vanimo dilakukan menggunakan Aplikasi Link Google Form, hal ini dinilai lebih memudahkan responden untuk melakukan pengisian survei dengan cepat dan tanpa adanya pemborosan kertas. Pengisian survei dilakukan secara mandiri oleh responden melalui telepon genggam dan atau melalui perangkat laptop yang disediakan di ruang pelayanan kekonsuleran.

Berikut adalah tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo yang telah dilakukan selama kurun waktu bulan Januari hingga Desember 2024.

Tabel III. 19
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Periode Pelaporan	2024	
	Target	Realisasi
Triwulan I	4	4
Triwulan II	4	4
Triwulan III	4	4
Triwulan IV	4	4

Survei belum sepenuhnya menggunakan 9 kategori pertanyaan yang disarankan oleh Pusat, namun demikian untuk memudahkan pengisian bagi para responden khususnya PMI dilakukan ekstraksi menjadi 3 pertanyaan yang meliputi: kepuasan atas pelayanan yang berikan; penilaian atas petugas pelayanan; dan kemudahan memahami alur pelayanan dan penjelasan serta keterangan yang diberikan petugas. Catatan: Survei yang dilakukan untuk pelayanan kekonsuleran menjadi satu kesatuan dengan survei pelayanan perlindungan.

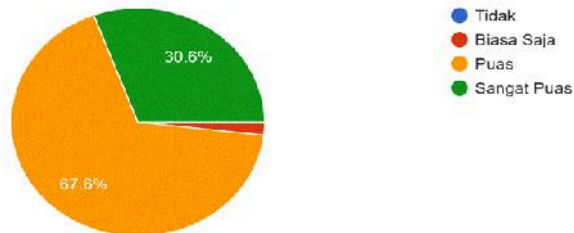
Sesuai dengan arahan dari Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri nomor B-00144/KEMLU/250113, KRI Vanimo akan menerapkan kuesioner survei secara lengkap sesuai standar pengukuran survey Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI bagi Perwakilan RI di luar negeri yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut adalah nilai persentase Survei Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran yang dilakukan oleh KRI Vanimo tahun 2024 yang diukur secara periodik triwulanan,

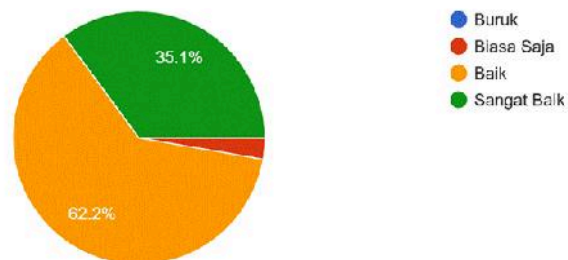
yang jumlah responden masing sebanyak 111 responden pada TW 1, 37 responden pada TW 2, 51 responden pada TW3 dan , 38 responden pada TW 4, yaitu:

Diagram III.1
Persentase Survei Kepuasan Triwulan I

Apakah anda puas dengan pelayanan Kekonsuleran dan Perlindungan KRI Vanimo yang diberikan?
111 responses



Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pelayanan dan Perlindungan KRI Vanimo?
111 responses



Apakah anda dengan mudah memahami sosialisasi/penjelasan/keterangan yang diberikan oleh petugas Pelayanan dan Perlindungan KRI Vanimo?
111 responses

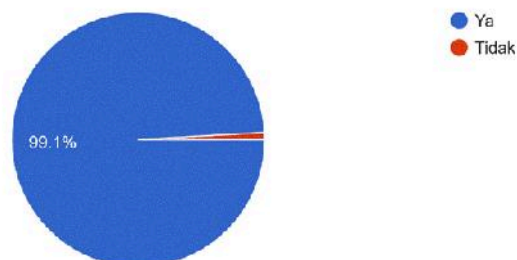
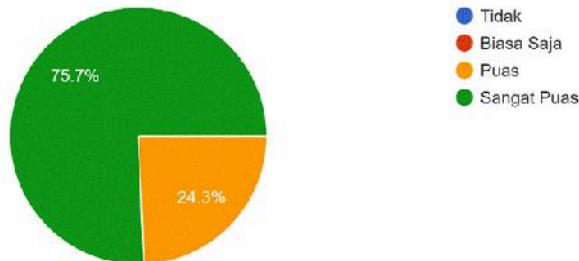
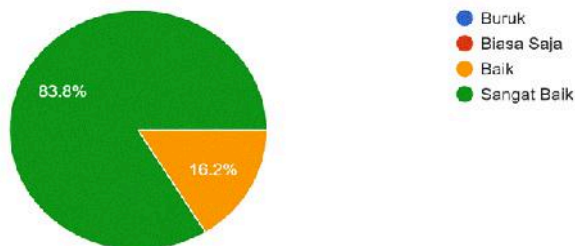


Diagram III.2
Prosentase Survei Kepuasan Triwulan II

Apakah anda puas dengan pelayanan Kekonsuleran dan Perlindungan yang diberikan KRI Vanimo?
37 responses



Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pelayanan dan Pelindungan KRI Vanimo?
37 responses



Apakah anda dengan mudah memahami sosialisasi/penjelasan/keterangan yang diberikan oleh petugas Pelayanan dan Perlindungan KRI Vanimo?
37 responses

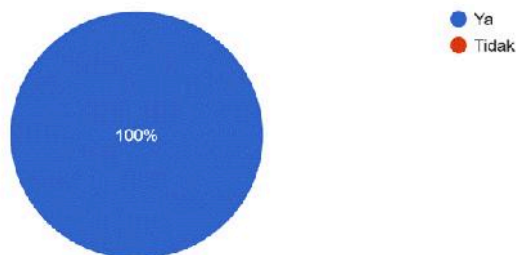
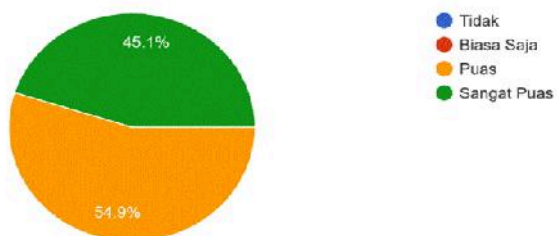


Diagram III.3
Persentase Survei Kepuasan Triwulan III

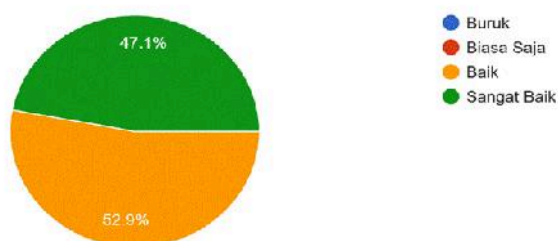
Apakah anda puas dengan pelayanan Kekonsuleran dan Perlindungan yang diberikan KRI Vanimo?

51 responses



Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pelayanan dan Perlindungan KRI Vanimo?

51 responses



Apakah anda dengan mudah memahami sosialisasi/penjelasan/keterangan yang diberikan oleh petugas Pelayanan dan Perlindungan KRI Vanimo?

51 responses

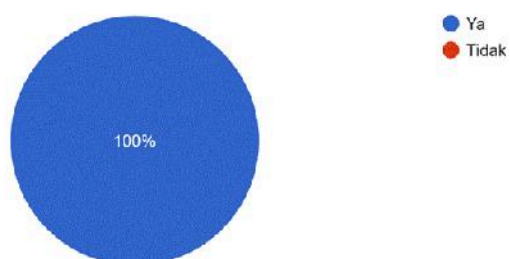
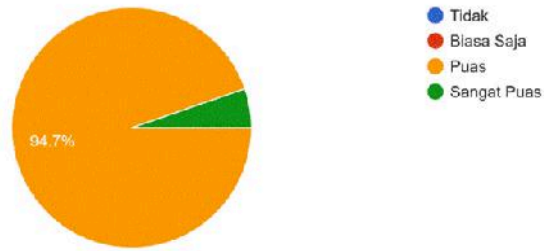


Diagram III.4
Prosentase Survei Kepuasan Triwulan IV

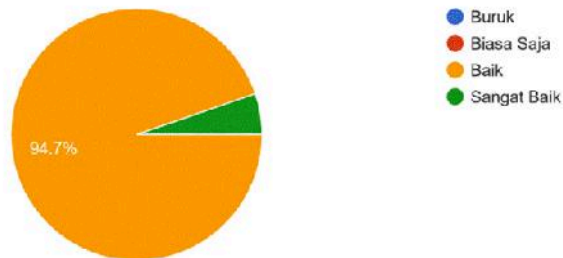
Apakah anda puas dengan pelayanan Kekonsuleran dan Perlindungan yang diberikan KRI Vanimo?

38 responses



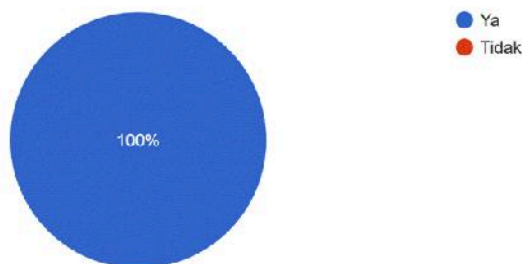
Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pelayanan dan Pelindungan KRI Vanimo?

38 responses



Apakah anda dengan mudah memahami sosialisasi/penjelasan/keterangan yang diberikan oleh petugas Pelayanan dan Perlindungan KRI Vanimo?

38 responses



Tabel III. 20
Capaian IK C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo		100 %	33 %
Realisasi			4
Target			4
Capaian			100.00 %
Batas Toleransi***) (jika capaian melebihi 120%)			120,00 %

Faktor Penghambat / Kendala

Beberapa faktor yang menjadi kendala di dalam melakukan survei antara lain, yaitu:

1. Tidak semua WNI memiliki pemahaman tentang pengisian survei melalui daring;
2. Penyebaran WNI yang mayoritas berada di wilayah pedalaman yang umumnya bekerja di perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan sulit untuk mengakses jaringan internet. Kesempatan mengisi hanya pada saat responden berada di kota Vanimo dan sekitarnya yang dapat mengakses jaringan seluler;
3. Keengganan responden untuk mengisi kuesioner survei, antara lain karena tidak memiliki telepon genggam yang bisa mengakses internet;
4. Pada kurun waktu Agustus sampai dengan Desember 2024, pelayanan penerbitan paspor tidak dapat dilaksanakan diakibatkan karena perangkat SIMKIM termasuk stabiliser tegangan listrik mengalami kerusakan akibat voltase listrik dari PNG-Power yang tidak stabil. KRI Vanimo pada bulan Oktober 2024 telah menerima perangkat SIMKIM baru dari Biro Umum Kementerian Luar Negeri, namun mempertimbangkan kondisi voltase listrik yang belum stabil dan tidak adanya anggaran Belanja Modal untuk pembelian stabiliser pada saat itu, permohonan pelayanan penerbitan paspor bagi WNI tetap tidak dapat dilaksanakan hingga Desember 2024 dan

meminta para pemohon untuk melakukan penggantian paspor di Kantor Imigrasi Jayapura.

Percepatan / Langkah Perbaikan / Proyeksi Kedepan

Dalam menjawab tantangan untuk memberikan pelayanan kekonsuleran kepada WNI dan WN asing sekaligus untuk memperoleh masukan dan penilaian terhadap pelayanan kekonsuleran bagi KRI Vanimo, perlu dilakukan outreach ke lokasi kantong-kantong domisili WNI yang terletak di pedalaman.

Beberapa hal yang perlu mendapat pertimbangan untuk dilakukannya outreach tersebut tersedianya fasilitas kendaraan dan peralatan antara lain:

1. Kendaraan jenis jeep dengan kemampuan penggerak 4 roda untuk menempuh jalur perlintasan menuju camp tempat tinggal PMI yang bekerja di Perkebunan sawit dan penebangan hutan;
2. Perangkat komunikasi seluler bergerak melalui satelit yang mumpuni untuk mengakses aplikasi SIMKIM, Portal Peduli serta aplikasi lainnya untuk memudahkan pelayanan;

Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pelayanan di Kantor KRI Vanimo perlu dilakukan perbaikan pada beberapa hal, yaitu:

1. Modernisasi perangkat kerja seperti komputer/laptop petugas pelayanan, perangkat pengaman voltase listrik;
2. Pembuatan ruang pelayanan dan ruang pelayanan yang terpisah dari ruang kerja staf. Hal ini selain mempertimbangkan kenyamanan pelayanan, juga perlunya membatasi akses pemohon masuk ke ruang kerja staf.
3. Adanya perangkat informasi visual yang dipasang di ruang tunggu pelayanan sehingga pada saat menunggu para pemohon disajikan oleh berbagai informasi tidak saja mengenai pelayanan kekonsuleran tetapi juga mengenai informasi lainnya seperti wisata, investasi dan perdagangan di Indonesia;
4. Hal lain yang perlu dipertimbangan untuk menciptakan kenyamanan di ruang pelayanan, perlu disiapkan air minum melalui dispenser, permen dan makanan ringan, serta akses yang mudah ke toilet.

III.3.4. Analisis C1.3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KRI Vanimo

Sejalan dengan pelaksanaan pelayanan perlindungan WNI KRI Vanimo, maka perlu dilakukan survei kepada pemohon pelayanan perlindungan untuk mengukur kualitas pemberian pelayanan yang dilakukan oleh KRI Vanimo.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Pelindungan WNI merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pelayanan terkait perlindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus atau pemberian bantuan perlindungan lainnya, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI diperoleh melalui survei (manual dan/atau elektronik) kepada responden yang sedang/telah menerima pelayanan Pelindungan WNI. Pelayanan terkait perlindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran merujuk Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan dengan responden yaitu orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI. Nilai persepsi dihitung berdasarkan pengukuran selama satu tahun anggaran, yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Narasi Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024, survei pelayanan perlindungan masih digabungkan dalam satu kesatuan kuesioner survei pelayanan konsuleran dan belum sepenuhnya merujuk pada panduan pengukuran yang disampaikan Direktorat Pelindungan WNI melalui berita faksimili nomor B-01975/KEMLU/200324. Namun demikian, kuesioner survei tetap menitik beratkan pada kepuasan pelayanan yang diberikan kepada pemohon.

Berikut adalah tabel rekapitulasi Capaian Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KRI Vanimo yang dirujuk dari aplikasi AKSI KRI Vanimo triwulan 1 hingga triwulan 4, sebagai berikut:

Tabel III. 21
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KRI Vanimo

Periode Pelaporan	2024	
	Target	Realisasi
Triwulan I	4	4
Triwulan II	4	4
Triwulan III	4	4
Triwulan IV	4	4

Tabel III.22
Capaian IK C.1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KRI Vanimo

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KRI Vanimo		100 %	33 %
Realisasi			4
Target			4
Capaian			100.00 %
Batas Toleransi***) (jika capaian melebihi 120%)			120,00 %

Selain memberikan Pelayanan Kekonsuleran dan Pelayanan Perlindungan WNI, Konsulat RI Vanimo juga melaksanakan Fungsi Pelayanan Keprotokolan, yang pada umumnya diberikan untuk layanan kunjungan dinas, transit pejabat dan WNI serta pejabat KRI Vanimo dari Vanimo dan Perbatasan RI-Papua Nugini di Pos Perbatasan Skouw-Wutung dan sebaliknya.

Total Pelayanan Keprotokolan yang tercatat mulai bulan Mei hingga Desember 2024 sebanyak 95 kegiatan dengan jumlah 473 orang telah terlayani, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 23
Pelayanan Keprotokolan

No.	Bulan	Jumlah Pelayanan	Jumlah Orang
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	-	-
5.	Mei	18	104
6.	Juni	8	13
7.	Juli	23	114
8.	Agustus	11	50
9.	September	2	2
10.	Oktober	5	13
11.	November	10	150
12.	Desember	18	27
Jumlah		95	473

Faktor Penghambat / Kendala

Faktor penghambat dalam melakukan survei pelayanan perlindungan WNI lebih disebabkan oleh faktor eksternal, dimana pada umumnya WNI yang diberikan pelayanan perlindungan tidak pada kondisi yang bebas untuk mengisi kuesioner survei.

Disamping itu, petugas pelayanan juga tidak mudah untuk memperoleh akses khusus dari aparat hukum Papua Nugini bagi WNI yang menghadapi kasus hukum. Sehingga petugas pelayanan memanfaatkan waktu pertemuan dengan WNI tersebut dengan memberikan pertanyaan secara lisan untuk kemudian dicatatkan dan dimasukkan ke dalam kuesioner survei.

Percepatan / Langkah Perbaikan / Proyeksi Kedepan

Percepatan dan langkah perbaikan Pelayanan perlindungan WNI untuk Tahun Anggaran 2025 dapat disinergikan dengan rencana langkah-langkah percepatan dan perbaikan pelayanan kekonsuleran, sehingga diharapkan nantinya diperoleh informasi yang lebih komprehensif dari penerima pelayanan melalui kuesioner survei pelayanan perlindungan WNI.

Guna peningkatan akses perlindungan bagi WNI yang sedang menghadapi kasus hukum, perlu dilakukan langkah-langkah pendekatan ke berbagai otoritas terkait di Papua Nugini, antara lain: Kepolisian, PNG-Defence Force, Imigrasi, Pengadilan, Bea Cukai, National Fisheries Authority. Di Papua Nugini, kedekatan kolegial dapat menjadi faktor penentu untuk mendapatkan akses dan kemudahan dari otoritas terkait.

III.3.5. C2. Dukungan dan Komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo

Ruang Lingkup

Sasaran strategis (SS) C2 diukur berdasarkan capaian pada 1 IK yaitu Persentase tindak lanjut / implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo

Informasi Kinerja

Tabel III. 24

Capaian IK C2 Dukungan dan Komitmen yang tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK *)	NILAI BOBOT **)
Persentase Tindak Lanjut / Implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo		119,05%	119,05%
Realisasi			100%
Target			84%
Capaian			119,05
Batas Toleransi			-

Pada tahun 2024, realisasi IK C2 “Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo” tercatat sebesar 100%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 84%. Dengan demikian, capaian IK mencapai 119,05%, yang menunjukkan keberhasilan KRI Vanimo dalam memastikan implementasi kesepakatan bilateral berjalan dengan sangat baik, melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian IK C2 ini mencerminkan efektivitas program tindak lanjut kesepakatan bilateral yang difokuskan pada implementasi nyata di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Pencapaian ini menunjukkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari pihak-pihak terkait, serta efektivitas langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh KRI Vanimo, memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.25

Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase tindak lanjut / implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024	
IK 2. 1	Target	N/A	N/A	...	83%	84%
	Realisasi	N/A	N/A	...	83,33%	100%
	Capaian	N/A	N/A	...	100,40%	119,05%

Target IK 2.1 pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi **84%** dari **83%** pada tahun 2023. Target ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2023, di mana realisasi mencapai **83,33%** dari target **83%**. Kenaikan target ini mencerminkan upaya untuk memacu peningkatan implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo, dengan tetap mempertimbangkan bahwa target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai. Kenaikan target juga merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan momentum positif yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, realisasi IK 2.1 meningkat signifikan hingga mencapai **100%**, melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini menyebabkan capaian IK mencapai **119,05%**, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar **100,40%**. Meningkatnya realisasi ini menunjukkan keberhasilan KRI Vanimo dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan kesepakatan bilateral secara lebih optimal, didukung oleh penguatan koordinasi, pelaksanaan program prioritas, dan perbaikan mekanisme implementasi kerja sama bilateral di wilayah kerja. Hasil ini menjadi indikator keberlanjutan kinerja diplomasi ekonomi yang semakin baik di tahun mendatang.

Analisis Penyebab Tercapainya IK

Capaian KRI Vanimo di sektor investasi membuktikan bahwa diplomasi ekonomi berjalan kurang efektif dalam memberikan manfaat langsung bagi perekonomian nasional yang disebabkan belum tertariknya investor dari Indonesia untuk

melakukan investasi di wilayah kerja di sektor infrastruktur publik. Namun demikian, pada sektor investasi, KRI Vanimo berhasil memenuhi target dengan capaian signifikan yang didukung oleh realisasi komitmen yang telah disepakati.

Pencapaian target efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi didukung oleh realisasi komitmen investasi, dengan valuasi komitmen yang teridentifikasi mencapai **PGK 3,200,020.50** (setara dengan **USD 896,005.74**) dari 3 komitmen yang berhasil disepakati. KRI Vanimo telah dan terus memberikan fasilitasi serta pengawasan komitmen investasi melalui bantuan hibah di sektor publik mulai dari tahap peninjauan, kesepakatan, hingga tindak lanjut. Langkah-langkah ini termasuk memastikan pembayaran *down payment* untuk proyek-proyek strategis, seperti pembangunan *Vanimo Urban Fire Station*, perbaikan infrastruktur *Wutung Primary School*, dan *Waste Management* sekiranya telah diselesaikannya proyek tersebut. Upaya ini mencerminkan kemampuan KRI Vanimo dalam mengawal implementasi diplomasi ekonomi secara terencana, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan sektor perdagangan sebagai manfaat langsung bagi perekonomian nasional melalui bantuan hibah.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi bilateral. Dalam rangka merealisasikan IK tingkat efektivitas diplomasi bilateral, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo pada tahun 2024

1. Pada 5 November 2024, Konsulat RI terlibat sebagai anggota Delri pada pertemuan *Border Liaison Officers Meeting* (BLOM) RI-PNG ke-27 di Jayapura, yang membahas berbagai isu perbatasan terkait diplomasi bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Agenda yang dibahas meliputi pengaturan dokumen perjalanan lintas batas, pengelolaan visa di Pos Wutung, dan penanganan aktivitas ilegal di Sungai Torasi. Selain itu, pertemuan ini juga membahas peningkatan kerja sama bilateral di bidang transportasi darat lintas batas, pendidikan, serta program *Sister City/Province*. Topik penting lainnya mencakup persiapan *Border Trade Fair 2024*, pemberian hibah untuk Provinsi West Sepik, dan usulan pendirian Konsulat RI di Daru serta Konsulat PNG di Merauke, yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral.
2. Selanjutnya, Konsulat RI turut hadir dalam *Border Liaison Meeting* (BLM) ke-18 yang dilaksanakan pada 9-10 Desember 2024 di Merauke, Papua Selatan. Pertemuan ini berfokus pada isu-isu strategis perbatasan, seperti identifikasi penduduk perbatasan, aktivitas ilegal di perairan teritorial, dan penguatan kerja sama perdagangan lintas batas. Pertemuan ini juga mencakup pembahasan pertukaran informasi terkait CIQS (*Customs*,

Immigration, Quarantine, and Security), pembangunan pos perbatasan baru di Keerom, serta tinjauan ulang *Special Arrangements* (SA) 1993. Selain itu, agenda penting lainnya meliputi MoU di bidang Teknologi Informasi dan Frekuensi Komunikasi serta rancangan kerjasama *Sister Province* antara Papua Selatan dan Western Province, yang menunjukkan diplomasi bilateral sebagai instrumen untuk memfasilitasi hubungan strategis lintas sektor.

3. Pada 17-20 Desember 2024, pertemuan *Joint Border Committee* (JBC) ke-38 diselenggarakan di Jakarta untuk membahas penguatan kerjasama bilateral dalam pengelolaan perbatasan, perdagangan, dan keamanan antara Indonesia dan Papua Nugini. Diskusi utama mencakup pengaturan perbatasan, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama teknis di bidang telekomunikasi dan penetapan batas wilayah. Pertemuan ini mengadopsi beberapa laporan penting dari BLM dan Sub-Komite Bersama, menekankan perlunya upaya kolaboratif dalam menangani tantangan perbatasan, aktivitas ilegal, dan isu terkini. Proposal kebijakan visa on arrival dan pendirian kantor konsulat menjadi bagian dari pembahasan strategis untuk memperkuat hubungan bilateral. Dengan komitmen untuk kolaborasi lebih erat, JBC ke-38 berhasil menetapkan dasar untuk pelaksanaan pertemuan berikutnya di Papua Nugini pada 2025, mencerminkan kemajuan diplomasi bilateral yang berfokus pada hubungan yang saling menguntungkan dan upaya menyelesaikan persoalan-persoalan perbatasan.

Kendala dan Tantangan

Meskipun berbagai upaya diplomasi bilateral telah dilakukan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024, terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama antara Indonesia dan wilayah kerja Konsulat RI. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas di wilayah perbatasan, seperti belum optimalnya pengaturan visa di Pos Wutung dan perlunya peningkatan fasilitas CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*).

Selain itu, tantangan lain mencakup aktivitas ilegal yang terus terjadi di Sungai Torasi dan perairan teritorial, yang membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif antara kedua negara. Penyusunan MoU di berbagai sektor, seperti Teknologi Informasi, Frekuensi Komunikasi, dan *Sister Province*, juga menghadapi hambatan administratif dan teknis yang memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan.

Hambatan dalam melakukan koordinasi dengan mitra kerja dari Provinsi West Sepik dan Western dan perlunya dukungan dari berbagai instansi di dalam negeri yang lebih kuat.

Selain itu masih adanya biaya tinggi untuk berkunjung ke wilayah kerja di Western Province diantaranya transportasi dan akomodasi guna melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kesepakatan bilateral RI-PNG..

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya upaya diplomasi yang lebih kuat, baik dalam memperkuat kerja sama lintas sektor maupun dalam meningkatkan efektivitas implementasi kesepakatan bilateral.

Upaya Perbaikan

Konsulat RI Vanimo terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efektivitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memberikan masukan berbagai pertemuan strategis seperti BLOM 2024 dan BLM 2024. Selain itu, langkah kolaboratif juga dilakukan untuk meningkatkan kerja sama di sektor transportasi darat, pendidikan, dan program Sister City/Province, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral yang lebih erat termasuk kerjasama antara provinsi West Sepik dan Western dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia khususnya di wilayah perbatasan RI-PNG.

KRI Vanimo perlu terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sekaligus memanfaatkan momentum positif dari pertemuan BLOM, BLM, dan JBC untuk mendorong langkah-langkah konkret yang mendukung implementasi kesepakatan bilateral yang lebih kokoh antara Indonesia dan Papua Nugini di berbagai bidang yang disepakati kedua negara.

Sebagai bentuk diplomasi ekonomi, Konsulat RI Vanimo memfasilitasi investasi dan perdagangan lintas batas melalui berbagai kesepakatan dan penguatan koordinasi antar sektor. Contohnya adalah keberhasilan Konsulat dalam mendorong merealisasikan komitmen investasi publik melalui bantuan hibah Pemerintah Indonesia senilai PGK 3,200,020.50 (setara dengan USD 896,005.74) yang mencakup proyek strategis yaitu pembangunan dan renovasi Wutung Primary School, Vanimo Fire Station dan West Management. Proyek-proyek ini tidak hanya menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia tetapi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di wilayah perbatasan.

Konsulat RI Vanimo telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan meningkatkan fasilitasi proses lintas batas. Melalui strategi ini, Konsulat RI Vanimo menunjukkan komitmen dalam menjembatani hambatan dan terus memperkuat hubungan strategis dengan wilayah kerja di Papua Nugini dalam mengimplementasikan kesepakatan kedua negara.

Proyeksi Kedepan

1. Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas

Melalui kegiatan seperti Border Trade Fair dilakukan setiap tahun termasuk untuk tahun 2025 sebagai upaya peningkatan nilai perdagangan lintas batas akan diarahkan pada komoditas utama, seperti sembako, bahan bangunan, dan kebutuhan dasar masyarakat PNG. Proyeksi realistis adalah peningkatan perdagangan lintas batas sebesar 10-15% dalam satu tahun, dengan catatan fasilitasi CIQS dan sistem logistik diperbaiki secara bertahap.

2. Monitoring Proyek Hibah dan Investasi

Proyek-proyek hibah Pemerintah RI, seperti pembangunan fasilitas publik di Provinsi West Sepik, akan dimonitor untuk memastikan penyelesaian proyek tersebut pada tahun 2025.

Proyeksi ini mencerminkan langkah-langkah yang terukur untuk meningkatkan efektivitas diplomasi bilateral, memperkuat hubungan ekonomi, dan mengatasi tantangan perbatasan tanpa memberikan beban berlebih pada sumber daya yang tersedia. Target ini dirancang untuk dicapai secara bertahap, sehingga memberikan hasil yang nyata bagi kedua negara.

Dokumentasi





5 November 2024: Pelaksanaan BLOM RI-PNG ke-27 Membahas Isu Strategis Perbatasan



BLM ke-18: Konsul RI Bahas Identifikasi Penduduk Perbatasan, Aktivitas Ilegal, dan Kerja Sama Lintas Batas di Merauke



Pertemuan ke-38 Joint Border Committee

III.4. Internal Business Process Perspective

III.4.1. B1 Diplomasi Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Kuat

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta kelautan. Dalam dinamika relasi dengan wilayah kerja, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral.

Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan assurance terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan dengan wilayah kerja. Sasaran strategis ini mencerminkan prioritas strategis yang mesti dicapai oleh Perwakilan RI dalam rangka relasi bilateral dengan wilayah kerja yang menjadi naungan Perwakilan.

Sasaran Strategis (SS) B1 diukur berdasarkan capaian pada IK B1.1 Yakni jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan wilayah kerja KRI Vanimo.

III.4.2. Analisis IK B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

Kesepakatan adalah seluruh bentuk perjanjian tertulis Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain yang diatur oleh hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik dan kesepakatan/komitmen pada tingkat Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden, dan Presiden Republik Indonesia.

Bidang ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, dan kerja sama pembangunan internasional.

Bidang sosial adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional di bidang sosial. Bidang budaya adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara

bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional antara lain di bidang seni, budaya, pelestarian aset-aset budaya, bahasa dan informasi.

Ruang lingkup:

Kesepakatan bidang ekonomi merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi, perundingan, diskusi, pertemuan, dan komunikasi yang bersifat landasan/payung hukum dan tidak memiliki monetary value. Kesepakatan ini meliputi namun tidak terbatas pada: bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik. Kesepakatan bidang sosial meliputi namun tidak terbatas pada: kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Kesepakatan bidang budaya meliputi namun tidak terbatas pada: seni, budaya, pelestarian aset-aset budaya, bahasa dan informasi.

Informasi Kinerja

Tabel III. 26

Capaian IK B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK	NILAI BOBOT
Diplomasi Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Kuat	Capaian SUB IK 1: Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan wilayah kerja KRI Vanimo	100%	100%
Realisasi			4
Target			4
Capaian			100%
Batas Toleransi			

Pada tahun 2024, realisasi Ik B1.1 “jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan wilayah kerja KRI Vanimo,” tercatat sebesar **4 kesepakatan** dari target yang ditetapkan sebesar **4 kesepakatan**. Dengan demikian, capaian IK mencapai **100%**.

Realisasi IK B1.1 diperoleh melalui Jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kesepakatan kerja sama bilateral juga termasuk dalam kerangka kerjasama yang dibentuk antara Pemerintah nasional/negara

bagian/wilayah kerja dengan stakeholders terkait di Indonesia (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Parlemen, lembaga think tank, lembaga pendidikan, dan badan usaha).

Perbandingan Kinerja

Tabel III.27

Target, Realisasi, dan Capaian IK Diplomasi Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Kuat

Kode IK / SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024
				4	4
B1.1				4	4
				100%	100%

Target IK pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan, tetap pada jumlah target yang sama yaitu 4 kesepakatan. Target tahun 2024 ditetapkan berdasarkan pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2023 yang sesuai dengan target, serta untuk memacu performa Diplomasi bilateral dengan menetapkan target yang sama tetapi tetap *achievable*.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian KRI Vanimo di sektor Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya membuktikan bahwa diplomasi bilateral berjalan dengan efektif dan berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Pencapaian target efektivitas diplomasi bilateral didukung oleh realisasi komitmen perdagangan yang tinggi, dengan valuasi komitmen yang teridentifikasi mencapai angka signifikan sesuai kesepakatan yang ada dari total 4 kesepakatan yang berhasil disepakati. KRI Vanimo telah dan terus memberikan fasilitasi dan pengawalan komitmen bilateral terkait wilayah kerja mulai dari tahap peninjauan, kesepakatan, hingga tindak lanjut.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi bilateral. Dalam rangka merealisasikan IK tingkat efektivitas diplomasi bilateral, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo pada tahun 2024

1. Konsulat RI menghadiri dan berkontribusi pada pertemuan BLOM RI-PNG ke-27 di Jayapura pada 5 November 2024. Pertemuan ini membahas isu-isu perbatasan seperti dokumen perjalanan lintas batas, visa di Pos Wutung, dan kegiatan ilegal di Sungai Torasi. Juga dibahas kerja sama bilateral, seperti perjanjian transportasi darat lintas batas, kerja sama pendidikan, dan program *Sister City/Province*. Selain itu, dibahas pula proyek *Border Trade Fair 2024*, bantuan hibah untuk Provinsi West Sepik, dan usulan pendirian Konsulat di Daru dan Merauke.
2. Pada tanggal 28 November 2024 bertempat di KRI Vanimo telah dilakukan kegiatan literasi kewirausahaan oleh mahasiswa STIE Port Numbay-Jayapura bekerjasama dengan Badan Perbatasan Kota Jayapura serta Vanimo Town dengan difasilitasi oleh KRI Vanimo. Kegiatan tersebut berupa “demo Masak” dengan membuat kue yang terbuat dari bahan sagu. Kegiatan dimaksud juga merupakan bagian dari realisasi MoU Kerjasama Sister City antara Kota Jayapura dan Vanimo Town. Pada kesempatan tersebut, Rektor STIE Port Numbay- Jayapura juga menjajaki Kerjasama Pendidikan dengan Provinsi West Sepik agar mahasiswa dari Provinsi tersebut dapat menempuh Pendidikan di STIE Port Numbay Jayapura.
3. Konsul RI dan Staf hadir dan berperan dalam memberikan masukan pada Border Liaison Meeting (BLM) ke-18 antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) pada 9-10 Desember 2024 di Merauke, Papua Selatan. Pertemuan ini membahas agenda utama diantaranya identifikasi penduduk perbatasan, aktivitas ilegal di perairan teritorial, kerja sama perdagangan lintas batas, pertukaran informasi CIQS, serta usulan pendirian konsulat RI di Daru dan Konsulat PNG di Merauke. Selain itu rencana pembangunan pos perbatasan baru di Keerom, tinjauan *Special Arrangements* (SA) 1993, pembahasan MoU terkait Teknologi Informasi dan Frekuensi Komunikasi, serta draft MoU kerjasama sister province antara Papua Selatan dan Western Province.
4. Pertemuan ke-38 *Joint Border Committee* (JBC) antara Indonesia dan Papua Nugini diselenggarakan di Jakarta pada 17-20 Desember 2024, dengan fokus pada peningkatan kerja sama bilateral dalam pengelolaan perbatasan, perdagangan, dan keamanan. Kedua delegasi menyepakati isu-isu utama, termasuk tinjauan terhadap pengaturan perbatasan, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama teknis dalam telekomunikasi dan penetapan batas wilayah. Beberapa laporan, seperti dari Pertemuan Penghubung Perbatasan (BLM) dan Sub-Komite Bersama, diadopsi dengan menekankan pentingnya upaya bersama untuk menangani tantangan di perbatasan, aktivitas ilegal, dan insiden terkini. Diskusi juga menyoroti proposal terkait kebijakan visa on arrival, pendirian kantor konsulat, dan penyusunan MoU di berbagai sektor. Pertemuan ini ditutup dengan komitmen untuk kolaborasi

lebih lanjut dan keputusan untuk mengadakan Pertemuan JBC ke-39 di Papua Nugini pada tahun 2025. KRI Vanimo telah memberikan masukan dengan merujuk hasil pertemuan BLOM dan BLM.

5. Konsul RI bersama staf menghadiri *Border Trade Fair (BTF) 2024* yang berlangsung pada 12-14 Desember 2024 di Zona Netral RI-PNG Skouw-Wutung dan Zona Inti PLBN Skouw. Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Papua Nugini serta meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. BTF 2024 diikuti oleh 79 UMKM dengan total 59 booth dan menarik sekitar 11.000 pengunjung. Selama acara, tercatat total transaksi mencapai Rp. 450.857.000. Selain itu, digelar *Business Matching* yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua, melibatkan 44 UMKM Indonesia dan 8 UMKM Papua Nugini. Kegiatan ini bertujuan membuka peluang kerjasama bisnis di bidang teknologi pengolahan dan pemasaran komoditas.

Pada pertemuan BLOM, BLM dan JBC telah disepakati dokumen *Record of Discussions* dari masing-masing pertemuan tersebut.

Kendala dan Tantangan

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan diplomasi bilateral pada tahun 2024 meliputi kompleksitas koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga pendidikan, badan usaha.. Masalah operasional juga muncul dalam bentuk penyelesaian isu-isu perbatasan, termasuk aktivitas ilegal di perairan teritorial, identifikasi penduduk perbatasan, dan penegakan peraturan lintas batas yang seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur perbatasan, seperti pos lintas batas dan akses transportasi, menghambat kelancaran perdagangan dan mobilitas penduduk antar negara. Kendala lainnya antara lain adalah penjadwalan pertemuan BLM, BLOM, dan JBC beberapa kali mengalami perubahan akibat adanya penyesuaian waktu.

Tantangan utama dalam diplomasi bilateral adalah memastikan penyelarasan prioritas antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya dalam negosiasi dan implementasi perjanjian baru, seperti MoU di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta perdagangan lintas batas. Selain itu, kegiatan seperti *Border Trade Fair* dan *Business Matching* menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi UMKM dan memperkuat daya saing produk lokal. Diplomasi bilateral juga memerlukan strategi yang lebih inovatif dan sinergis untuk memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di kedua negara.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan diplomasi bilateral pada tahun 2024, Konsulat RI Vanimo dapat mengambil sejumlah langkah strategis. Dalam menghadapi kompleksitas koordinasi lintas sektor, dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan diplomasi bilateral. Untuk mengatasi masalah operasional terkait isu-isu perbatasan dilakukan penguatan kerja sama dengan otoritas dan lembaga terkait, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk penanganan aktivitas ilegal, identifikasi penduduk perbatasan, dan penegakan peraturan lintas batas.

Dalam menghadapi tantangan penyelarasan prioritas dan implementasi perjanjian, Konsulat mendorong dan memperkuat diplomasi berbasis hasil (result-oriented diplomacy) dengan mengutamakan agenda-agenda strategis yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara.

Proyeksi Kedepan

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, Konsulat RI Vanimo akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala dan tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Perencanaan ke depan akan menitikberatkan pada program-program yang dapat langsung diimplementasikan dan memberikan hasil nyata dalam diplomasi bilateral.

Dalam rangka memperbaiki koordinasi lintas sektor, Konsulat akan memprioritaskan kehadiran pada rapat koordinasi secara terjadwal dengan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan penyelarasan prioritas dan meminimalisasi hambatan komunikasi. Selain itu, pengelolaan jadwal pertemuan seperti BLM, BLOM, dan JBC akan dilakukan dengan persiapan yang lebih matang.

Target IK di tahun mendatang akan ditetapkan tetap realistis, dengan mempertahankan 4 kesepakatan yang didukung oleh program-program prioritas seperti pertemuan bilateral rutin, peningkatan kerja sama perdagangan, dan penyelesaian isu perbatasan.

Dokumentasi



Konsulat RI Hadiri Pertemuan BLOM RI-PNG ke-27: Bahas Isu Perbatasan dan Penguatan Kerja Sama Bilateral



Literasi Kewirausahaan dan Demo Masak Sagu: Realisasi MoU Sister City Jayapura-Vanimo



BLM ke-18: Konsul RI Bahas Identifikasi Penduduk Perbatasan, Aktivitas Ilegal, dan Kerja Sama Lintas Batas di Merauke



Pertemuan ke-38 Joint Border Committee



Border Trade Fair 2024: Penguatan Perdagangan Indonesia-Papua Nugini dan Peluang Kerja Sama UMKM

III.4.3. B2 Basis Data KRI Vanimo yang Akurat

Dalam rangka mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia" mendorong Kementerian Luar Negeri RI dalam pemanfaatan sistem informasi untuk memastikan keakuratan data WNI di luar negeri. Salah satu tantangan Pemerintah terkait data WNI adalah data WNI yang ada di luar negeri belum terintegrasi dengan sistem data nasional. Data WNI yang terdapat di sistem informasi Kementerian Luar Negeri merupakan database pada Portal Peduli WNI yang berbeda dengan data yang ada pada Lembaga Pemerintah lain seperti: KPU, BNP2TKI, Perbankan, Ditjen Imigrasi maupun Dukcapil. Apabila data yang tidak terintegrasi pada sistem data nasional memungkinkan terjadi duplikasi data menjadi kendala bagi Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri yang berkualitas.

Basis data adalah database WNI di Luar Negeri yang tersimpan secara struktur, sistematis dan daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi. WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI. Akurat adalah teliti; seksama; cermat; tepat benar.

Sasaran Strategis (SS) B2 diukur berdasarkan capaian pada 2 (dua) IK sebagai berikut:

1. IK B2.1 Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI
2. IK B2.2 Nilai laporan data economic intelligence tentang wilayah kerja KRI Vanimo

WNI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri. Basis data WNI yang akurat dapat didefinisikan sebagai terwujudnya database WNI yang tepat dan valid yang tersimpan secara struktur, sistematis dan daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi mengenai WNI di luar negeri.

III.4.4. Analisis B2.1 Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan dan perlindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIK); Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM); Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya.

Selain mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", jumlah WNI yang terdaftar pada Portal Peduli WNI dapat mempermudah proses pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri secara lebih baik dan akurat.

Data pembanding/pembagi adalah data DPT Pemilu tahun 2019 karena data tersebut telah diverifikasi dan ditetapkan validitasnya.

Terverifikasi adalah WNI yang sudah terdaftar pada Portal Peduli WNI disertai dengan dokumen WNI yang diunggah oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Persentase jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI menghitung persentase data WNI yang tercantum dan terverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri di Portal Peduli WNI dibanding jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) WNI di wilayah kerja Perwakilan RI pada Pemilu 2019.

Database WNI di Luar Negeri pada portal peduli WNI berdasarkan penginputan data WNI secara online yang dilakukan oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang. Portal peduli WNI secara berkala dilakukan pemutakhiran dan back-up data WNI atau master data oleh staf Perwakilan RI dan update portal peduli WNI.

Narasi Realisasi Kinerja

Upaya mendorong kepedulian WNI di wilayah kerja KRI Vanimo untuk melakukan lapor diri pada Portal Peduli WNI dilakukan melalui berbagai kesempatan, antara lain pada saat:

1. Sosialisasi di Kantor KRI Vanimo;
2. Kegiatan pelayanan *outreach* ke *camp* tempat tinggal WNI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan;
3. WNI datang ke KRI Vanimo untuk memperoleh pelayanan kekonsuleran, seperti penerbitan paspor, legalisasi dan validasi dokumen, serta layanan lainnya.

Total keseluruhan Lapor Diri WNI pada tahun 2024 sebanyak 81 orang pada aplikasi Portal Peduli WN dan seluruhnya telah terverifikasi oleh KRI Vanimo. Berikut adalah tabel target dan realisasi dan tabel Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI tahun 2024:

Tabel III. 28
Target dan realisasi WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Periode Pelaporan	2024	
	Target	Realisasi
Triwulan I	4	4
Triwulan II	4	4
Triwulan III	4	4
Triwulan IV	4	4

Nilai Capaian IK B.2.1 Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI pada aplikasi AKSI KRI Vanimo dapat dilihat pada tabel berikut:

Informasi Kinerja

Tabel III. 29


Capaian IK B.2.1 Persentase WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI

INDIKATOR KINERJA	INFORMASI KINERJA	NILAI CAPAIAN SUB IK	NILAI BOBOT
Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli PNI	Capaian IK B.2. 1: Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli PNI	100%	100%
Realisasi			100%
Target			100%
Capaian			100%
Batas Toleransi			

Pada tahun 2024, realisasi IK B.2.1 “Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI,” tercatat sebesar **100%** dan sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar **100%**. Dengan demikian capaian IK mencapai **100%**

Tabel III.30

Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI Periode Januari-Desember 2024

 DATA LAPOR DIRI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA Tanggal 2024-01-01 s/d 2025-01-02						
No	Kawasan	Negara	Nama Perwakilan	Total	Progress Verifikasi	
					Verified	Unverified
Total				81	81	0
Persentase (%)				100	100	0
1	ASIA PASIFIK DAN AFRIKA - OCEANIA	PAPUA NUGINI	KRI Vanimo	81	81	0

Realisasi B2.1 diperoleh melalui Jumlah WNI di wilayah kerja yang melakukan lapor diri pada Portal Peduli WNI dibagi Jumlah WNI lapor diri pada Portal Peduli WNI yang telah diverifikasi dikali dengan 100%.

Seperti hal kegiatan Survei Pelayanan Kekonsuleran dan Survei Pelayanan Pelindungan WNI, upaya mendorong WNI yang berada di wilayah kerja untuk melakukan lapor diri pada Portal Peduli WNI menghadap hambatan dan permasalahan yang sama, antara lain yaitu banyak WNI yang belum memahami manfaat dan pentingnya lapor diri, baik untuk perlindungan hukum maupun administrasi selama berada di luar negeri. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh. Tidak semua WNI memiliki akses yang memadai ke perangkat digital atau koneksi internet yang stabil, terutama mereka yang bekerja di wilayah terpencil. Upaya untuk mengatasi hambatan ini membutuhkan strategi yang lebih inklusif, seperti memperkuat sosialisasi melalui komunitas WNI, memanfaatkan media sosial secara kreatif, serta meningkatkan kolaborasi antara perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat setempat.

Pada tahun 2024, sebanyak 81 orang WNI berhasil melakukan lapor diri melalui Portal Peduli WNI dan telah diverifikasi sepenuhnya oleh KRI Vanimo. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari perkiraan jumlah WNI yang berada di wilayah kerja KRI Vanimo, yaitu sekitar 400 orang.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK B2.1 "Persentase WNI di wilayah kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI" sebesar 100% pada tahun 2024 dapat dikaitkan dengan strategi aktif yang dilakukan oleh KRI Vanimo dalam mendorong WNI untuk melakukan lapor diri. Upaya ini meliputi berbagai sosialisasi yang dilakukan, baik di Kantor KRI Vanimo, melalui kegiatan pelayanan outreach ke lokasi tempat tinggal WNI yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan, maupun pada saat WNI datang ke KRI Vanimo untuk mengurus layanan konsuleran. Pendekatan ini memungkinkan petugas untuk menjangkau langsung WNI yang tersebar di wilayah kerja, termasuk di daerah terpencil, sehingga dapat memberikan edukasi dan kemudahan bagi mereka untuk melakukan proses lapor diri.

Faktor lainnya adalah adanya sistem verifikasi yang terintegrasi dan efisien melalui aplikasi Portal Peduli WNI, yang memastikan data WNI dapat segera diverifikasi dengan akurat. Selain itu, realisasi target juga didukung oleh koordinasi yang baik antara KRI Vanimo dengan komunitas WNI di wilayah kerja, sehingga sosialisasi dapat disampaikan secara lebih efektif. Meskipun jumlah WNI yang berhasil lapor diri masih jauh dari jumlah perkiraan total WNI di wilayah kerja, keberhasilan mencapai target IK 100% mencerminkan optimalisasi dari

strategi diplomasi pelayanan yang telah diterapkan. Hal ini menunjukkan komitmen KRI Vanimo dalam memberikan perlindungan dan pelayanan administratif bagi WNI di luar negeri.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo sepanjang tahun 2024 untuk mendukung Persentase WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI. Berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh KRI Vanimo pada tahun 2024.

1. Konsul RI bersama staff telah melakukan kunjungan penggalangan Masyarakat di Kantor Pusat Perusahaan Bewani Oil Palm Plantation Limited/BOPPL, Perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO di Imbio Village West Sepik Province pada tanggal 10 April 2024. Acara penggalangan dan ramah Tamah bersama para pekerja BOPPL tersebut dihadiri sekitar 100 pekerja dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan himbauan untuk melakukan Lapor Diri.
2. Pada 29 Juni 2024, KRI Vanimo telah menyelenggarakan pertemuan Masyarakat dalam rangka sosialisasi perlindungan dan pembinaan WNI. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 30 WNI. Kegiatan perlindungan dan pembinaan secara khusus untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman kepada WNI.

Kendala dan Tantangan

Kendala minimnya jumlah WNI yang melakukan lapor diri antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman sebagian WNI terkait cara pengisian pada aplikasi lapor diri. Hal ini terjadi karena aplikasi tersebut mengharuskan pengguna untuk mengunggah beberapa dokumen tertentu. Selain itu, lokasi tempat tinggal sebagian WNI sering kali berada di area yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler dan internet, sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses aplikasi tersebut.

Upaya Perbaikan

Bersamaan dengan rencana kegiatan KRI Vanimo pada Tahun Anggaran 2025, program outreach Pelayanan Kekonsuleran dan sosialisasi akan dilakukan di lokasi domisili WNI yang bekerja di perkebunan sawit dan penebangan hutan. Kegiatan ini akan dilengkapi dengan asistensi dan pendampingan oleh petugas pelayanan untuk membantu WNI dalam proses pengisian lapor diri. Untuk mendukung tersedianya jaringan seluler dan internet yang memadai di wilayah tersebut, diperlukan penggunaan perangkat internet bergerak yang terhubung melalui satelit.

Dalam upaya meningkatkan jumlah WNI yang melakukan lapor diri pada Portal Peduli WNI, akan dilakukan pendekatan kepada perusahaan tempat WNI bekerja. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam penyiapan dokumen yang diperlukan untuk proses lapor diri, sehingga dapat mempermudah pengisian dan pengunggahan dokumen ke portal. Selain itu, cara alternatif yang direncanakan adalah melalui pengisian data dan dokumen pada formulir Excel lapor diri yang dapat diisi secara offline. Data yang telah lengkap nantinya akan diunggah setelah seluruh dokumen dan informasi tersedia. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini menghambat proses lapor diri WNI.

Proyeksi Kedepan

1. Kerja Sama dengan Perusahaan

KRI Vanimo akan meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan tempat WNI bekerja untuk mempermudah proses lapor diri. Perusahaan akan dilibatkan dalam mendukung pengumpulan dokumen administrasi yang diperlukan serta memberikan edukasi kepada para pekerja tentang pentingnya lapor diri untuk perlindungan hukum dan administrasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi WNI di wilayah kerja.

2. Alternatif Pengisian Data Offline

Sebagai solusi untuk WNI yang mengalami kendala dalam mengakses aplikasi, KRI Vanimo akan menyediakan formulir Excel sebagai alternatif untuk pengisian data lapor diri secara offline. Data yang telah diisi akan diunggah ke Portal Peduli WNI setelah semua dokumen lengkap. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan semua WNI dapat terdaftar, meskipun memiliki keterbatasan akses teknologi.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan untuk memperluas pemahaman WNI tentang manfaat dan pentingnya lapor diri. KRI Vanimo akan memanfaatkan media sosial secara kreatif untuk menjangkau lebih banyak WNI, sambil mengadakan sosialisasi langsung melalui komunitas WNI. Konten edukasi yang menarik juga akan disiapkan untuk memperkuat pemahaman WNI mengenai perlindungan hukum dan administrasi.

4. Penetapan Target yang Realistis dan Achievable

Target IK tahun 2025 akan ditetapkan berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Strategi yang dirancang akan memungkinkan peningkatan jumlah WNI yang melakukan lapor diri secara bertahap, tanpa mengurangi realisme target. Dengan langkah ini, KRI Vanimo berupaya mencapai peningkatan yang

berkelanjutan, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih efisien dan inklusif.

Dengan langkah-langkah ini, KRI Vanimo optimis dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi WNI di wilayah kerja, serta memastikan target IK dapat dicapai dengan efektif.

Dokumentasi



Sosialisasi dan Pemilu Kotak Suara Keliling (KSK) di Kampung Imbio, tanggal 9 Februari 2024



Pertemuan Masyarakat tanggal 11 Februari 2024 di KRI Vanimo dalam rangka Sosialisasi Perlindungan WNI dan Pemungutan Suara Pemilu Indonesia 2024



Penanganan Kasus 5 WNI Nelayan asal Merauke di Pengadilan Distrik Daru, Provinsi Western, Papua New Guinea, 19-23 Februari 2024



Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daru dan Kepala Imigrasi Daru, Provinsi Western 21 Februari 2024



Pendampingan Delegasi Correctional Service/Kementerian Pemasyarakatan Papua Nugini Ke Pasar Batas Skouw, Jayapura, 29 Februari 2024



Rapat Koordinasi Otoritas CIQS Pos Lintas Batas Negara Skouw, dengan KRI Vanimo, Konjen Papua Nugini di Jayapura serta Otoritas CIQS Pos Perbatasan Wutung Papua Nugini



Sosialisasi Dan Pembinaan Warga Negara Indonesia Vanimo, 17 Maret 2024



Persiapan Pengirim Material Hibah dari Surabaya ke Jayapura-Vanimo
22 Maret 2024



Persiapan Pengirim Material Hibah dari Surabaya ke Jayapura-Vanimo
22 Maret 2024



Pendampingan Kunjungan Kerja Provincial Administrator Provinsi West Sepik dan Delegasi Ke Jayapura, 2-4 April 2024



Pendampingan Kunjungan Deputy Dirjen Imigrasi Papua Nugini ke Perbatasan RI-PNG (Skouw-Wutung), 13-14 April 2024



Sosialisasi dan Penggalangan Masyarakat Pekerja Indonesia di Perusahaan Bewani Oil Palm Plantation Limited-Imbio, 10 April 2024



Serah Terima WNI bebas dari Penjara Vanimo oleh KRI Vanimo kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Keerom disaksikan Pejabat Imigrasi dan Pejabat PLBN Skouw, 3 MEI 2024





Pendampingan Gubernur Provinsi West Sepik, Hon. Tony Wouwou dalam rangka Kunjungan Kerja Perdana Menteri Papua Nugini Jakarta 13-15 Juli 2024



Pendampingan Gubernur Provinsi West Sepik, Hon. Tony Wouwou bertemu dengan Perusahaan Global Solution dalam mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan RI-PNG, di sela-sela Kunjungan Kerja Perdana Menteri Papua Nugini, Jakarta 13-15 Juli 2024



Pengisian Buku Duka Cita atas Wafatnya Wakil Presiden RI Ke-9, Bapak Hamzah Haz, oleh Mr. Conrad Tilau, Provincial Administrator West Sepik Province Atas Nama Gubernur 29 Juli 2024



Rangkaian Pelaksanaan HUT RI ke-79 KRI Vanimo, 28 Juli s/d 17 Agustus 2024



Rangkaian Pelaksanaan HUT RI ke-79 KRI Vanimo, 28 Juli s/d 17 Agustus 2024



Rangkaian Pelaksanaan HUT RI ke-79 KRI Vanimo, 28 Juli s/d 17 Agustus 2024



Serah terima jenazah Alm. Tri Krishartoko di Neutral Zone Perbatasan Skouw RI – Wutung PNG, 19 Oktober 2024



Serah terima jenazah Alm. Tri Krishartoko di Neutral Zone Perbatasan Skouw RI – Wutung PNG, 19 Oktober 2024



Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024 KRI Vanimo



Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 Konsulat RI Vanimo



Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke-53 Tahun 2024 Konsulat RI Vanimo

	
<p>Repatriasi Jenazah PMI a.n. Asnan dari Vanimo ke Sambas, Kalimantan Barat melalui Pos Lintas Batas PNG-RI (Wutung-Skouw), 7 Desember 2024</p>	<p>Upacara Peringatan ke-76 Hari Bela Negara Tahun 2024 Konsulat RI Vanimo</p>


<p>Upacara Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 Konsulat RI Vanimo</p>

III.5. Learning and Growth Perspective

III.5.1. L1 Tata Kelola Organisasi KRI Vanimo yang Baik

III.5.2. IK L1.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100.

Nilai AKIP KRI Vanimo adalah 75.45 atau dengan kategori penilaian BB (Sangat Baik). Nilai AKIP tersebut dicapai berdasarkan nilai realisasi penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023/2024 dimana nilai tersebut

dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemlu RI. Bila dibandingkan dengan target nilai yang direncanakan (nilai 80), maka didapat persentase capaian sasaran 96% untuk tahun 2023/2024.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) KRI Vanimo	80 (BB)	75.45	96%
	(T)	(R)	(C)

III.5.3. IK L2.1. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) KRI Vanimo adalah sebesar 3.12 dari skala 4. Sarana kantor dan wisma KRI Vanimo sepanjang TA 2024 telah dipenuhi sesuai dengan kebutuhan internal KRI Vanimo. Total pagu belanja modal KRI Vanimo yang bersumber dari PNBP adalah sebesar Rp350.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 337.998.167 atau 96.57% dari total pagu belanja modal. Adapun KRI Vanimo tidak memiliki pagu belanja modal yang bersumber dari rupiah murni (RM).

Indeks pengelolaan asset Kementerian Luar Negeri	3.20 (skala 4)	3.12 (skala 4)	97,50%
	(T)	(R)	(C)

III.5.4. IK L3.1. Nilai IKPA KRI Vanimo

Per 24 Januari 2025, nilai IKPA KRI Vanimo TA 2024 adalah 86,79 sesuai dengan data yang diperoleh dari OMSPAN. Realisasi ini telah menghasilkan capaian 96,43% dari target yang direncanakan. Terkait dengan hal tersebut, sistem perencanaan, eksekusi, pencatatan dan evaluasi kinerja anggaran secara internal KRI Vanimo perlu ditingkatkan.

Nilai IKPA KRI Vanimo	90	86,79	96,43%
	(T)	(R)	(C)

III.5.5. Realisasi Anggaran

Sepanjang tahun 2024, per tanggal 24 Januari 2025, telah dilakukan 19 kali revisi pagu anggaran, baik untuk tujuan pemutakhiran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anggaran Belanja Tambahan (ABT), maupun blokir anggaran. Berdasarkan DIPA KRI Vanimo TA 2024 tanggal 17 Januari 2025, pagu anggaran KRI Vanimo pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 17.160.093.000 (tujuh belas miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Tabel III.31
Pagu dan Realisasi Anggaran KRI Vanimo TA 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Sumber Pendanaan
Belanja Pegawai	10.518.707.000	10.510.225.448	99.92%	RM
Belanja Barang	6.291.386.000	6.166.849.601	98.02%	RM
Belanja Modal	350.000.000	337.998.167	96.57%	PNBP
Total	17.160.093.000	17.015.073.216	99.15%	

KRI Vanimo telah mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi mencapai 99.15% atau sebesar Rp17.015.073.216,00. Persentase realisasi tersebut meningkat sebesar 7.05 poin jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2023, yaitu sebesar 92.10%.

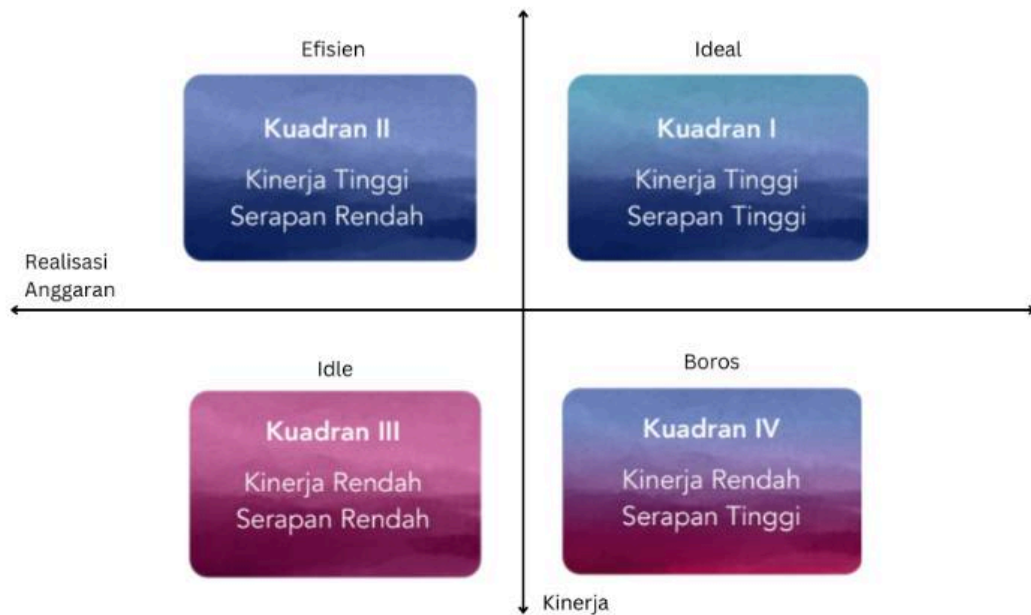
III.5.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam upaya reformasi birokrasi, KRI Vanimo berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Komitmen ini meliputi pengelolaan anggaran yang lebih efektif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Melalui langkah-langkah tersebut, KRI Vanimo berusaha menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan demikian, setiap sumber daya yang tersedia diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan Kemlu dalam mewujudkan tujuan dan target yang ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja yang dapat diukur. Tingkat efisiensi ini divisualisasikan dalam kuadran yang mengelompokkan hasil kinerja dan tingkat serapan anggaran.

Tabel III. 32
Kuadran Efisiensi Kinerja dan Anggaran



Penilaian kriteria tinggi rendahnya capaian kinerja dan anggaran per triwulan didasarkan pada batasan angka/persentase sebagai berikut.

Tabel III. 33
Kriteria Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran per Triwulan

	Rendah	Tinggi
TW I	Di bawah 25%	Di atas 25%
TW II	Di bawah 50%	Di atas 50%
TW III	Di bawah 75%	Di atas 75%
TW IV	Di bawah 90%	Di atas 90%

Berdasarkan Renja KRI Vanimo TA 2024 dan metode pengelolaan anggaran berbasis kinerja, KRI Vanimo menetapkan 7 Rincian Output untuk mendukung 10 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja KRI Vanimo pada tahun 2024 telah didukung oleh serapan anggaran sebesar 99.15%. Rincian anggaran per RO dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 34
Pagu dan Realisasi Anggaran Rincian Output atas Indikator Kinerja yang Didukung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK	Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi	%
Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi Vanimo	85,00	5640.AEH.001 Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata	1.766.631.000	1.650.081.435	93.40%
	Jumlah komitmen perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	75,00				
	Nilai perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	105,51				
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	58,74				
	Jumlah komitmen investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	75,00				
	Nilai investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	18,82				
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	250,41				
	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari Wilayah Kerja KRI Vanimo ke Indonesia	58,79				
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	689,20				
Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KRI Vanimo yang Meningkat	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KRI Vanimo	99,51	Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja			
Basis Data KRI Vanimo yang Akurat	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KRI Vanimo	122,50				

Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KRI Vanimo yang Prima	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KRI Vanimo yang diselesaikan	101,19	4439.QAA.001 Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	386.672.000	382.634.609	98.96%
	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo	100,00				
	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KRI Vanimo	100,00				
Basis Data KRI Vanimo yang Akurat	Persentase WNI di negara akreditasi KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100,00				
Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KRI Vanimo yang Prima	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo	100,00	4439.BAA.001 Pelayanan Kekonsuleran di Perwakilan RI	51.675.000	51.097.991	98.88%
Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KRI Vanimo	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KRI Vanimo	119,05	5640.AEC.001 Kerja Sama Bilateral	551.630.000	547.796.059	99.30%
	Diplomasi bilateral di wilayah kerja KRI Vanimo yang kuat	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan wilayah kerja KRI Vanimo	100,00			
Tata Kelola Organisasi KRI Vanimo yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo	75,45	6023.EBA.994 Layanan Perkantoran	13.870.350.000	13.854.652.069	99.89%
	Pengelolaan Anggaran KRI Vanimo yang Optimal dan Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KRI Vanimo	86,79			
Pengelolaan KRI Vanimo yang Optimal	Aset Indeks Pengelolaan BMN KRI Vanimo	3,12	6023.EBB.994 Layanan Sarana Internal	350.000.000	337.669.571	96.48%
NCKO 2024		102,03	TOTAL	17.160.093.000	17.015.073.216	99.15%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja dan anggaran KRI Vanimo telah mencapai lebih dari 90%, sehingga KRI Vanimo berada pada **Kuadran I atau Ideal**. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya efisiensi penggunaan anggaran KRI Vanimo antara lain adalah:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk Berbagai Kegiatan

Salah satu faktor yang mendukung efisiensi penggunaan anggaran adalah pemanfaatan anggaran secara optimal untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Pada TA 2024, sesuai dengan Permenlu 84 Tahun 2024 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas

bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, ADTLN Home Staff mengalami kenaikan, termasuk juga pada Home Staff KRI Vanimo yang meningkat dari USD6,300 menjadi USD7,800. Selain itu, terdapat penghematan/pemotongan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan arahan Presiden RI pada sidang kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, KRI Vanimo dapat mencapai tujuan strategis tanpa adanya pemborosan sumber daya.

2. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit Kerja

Efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta anggaran sangat bergantung pada koordinasi yang solid di antara seluruh pegawai di KRI Vanimo. Komitmen tinggi untuk menjalankan tugas secara terintegrasi menciptakan sinergi yang optimal, mendukung pencapaian target kinerja dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, KRI Vanimo berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya ini diharapkan tidak hanya akan mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi citra KRI Vanimo sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran negara.

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam mencapai kinerja yang optimal, KRI Vanimo telah memperbarui sistem penjabaran kinerja yang dirancang untuk mencerminkan kerangka logis pencapaian target hingga ke tingkat individu. Penjabaran ini diterapkan melalui pembagian peran yang jelas bagi setiap pegawai, yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sebagai bagian dari strategi untuk memastikan tercapainya kinerja organisasi secara keseluruhan, KRI Vanimo juga menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, diantaranya:

1. **Penempatan Pegawai yang Tepat:** Menempatkan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan agar selaras dengan tugas yang diemban, serta agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan penugasan dengan staf lainnya.
2. **Pengembangan Kompetensi:** Mengadakan pelatihan daring dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas mereka secara profesional.

3. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja:** Melakukan dialog kinerja secara berkala untuk memberikan umpan balik, menilai pencapaian, dan mengidentifikasi area pengembangan yang potensial.

Langkah-langkah ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan optimal melalui pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berkesinambungan.

**Gambar III.____
Informasi Bezzeting Pegawai Setempat**



Berdasarkan data pada aplikasi SIMPS Kemlu yang ditautkan di atas, berikut di bawah ini tabel formasi pegawai berdasarkan kebutuhan KRI Vanimo:

**Tabel III. 35
Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi**

Perwakilan RI	Kebutuhan	Pemenuhan
Home Staff		
Diplomat	4	3
Penata Kanselerai	1	1
Pranata Informasi Diplomatik	1	1
Staf Non Diplomatik (SK 111)	1	1
Pegawai Setempat		
Staf F. Protkons	2	1
Staf F. Ekonomi	2	0

Staf F. Pensosbud	1	0
Staf Administrasi	5	5
Staf Bawaan Kepri	2	2
Total	19	14

Melalui berbagai langkah strategis, KRI Vanimo berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk memotivasi pegawai memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara efisien diharapkan mampu meningkatkan kinerja KRI Vanimo dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel.

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Pemanfaatan sarana dan prasarana KRI Vanimo sangat terkait dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). KRI Vanimo telah menjalankan pengelolaan sarana dan prasarana secara akuntabel dan produktif. Pada tahun 2024, pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan, yang mencakup dua kategori barang, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel.

Tabel III. 36
Laporan Pengadaan Barang Milik Negara Menurut Nilai Perolehan Tahun Anggaran 2024

Kelompok Barang	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	15	337.998.167	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Perencana	-	-	-	-
Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
<i>Software</i>	-	-	-	-
Lisensi	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
Total	15	337.998.167		

Dalam pengelolaan BMN, Indikator Kinerja Pengelolaan BMN (IPA) digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas pengelolaan BMN di berbagai K/L, termasuk Kemenlu. Sejak dimulai pada tahun 2021, pengukuran IPA bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian BMN. Pada tahun 2024, KRI Vanimmo meraih nilai IPA sebesar 3,12. Penerapan IPA pada Perwakilan RI sebagai bagian dari IPA Kemenlu menjadi dasar penting untuk monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam kebijakan tata kelola BMN.

Kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif mendukung pelaksanaan program serta pencapaian target strategis pada tahun 2024. Dengan pengelolaan BMN yang efektif dan efisien, tujuan organisasi dapat tercapai, dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
VANIMO

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

IV.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo berhasil mencatatkan kinerja yang luar biasa dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) sebesar 102,03%, seperti yang tercermin dalam laporan triwulan IV. Pencapaian ini menempatkan KRI Vanimo dalam kategori "Istimewa," menunjukkan keberhasilan konsulat dalam melampaui target yang telah ditetapkan. Melalui berbagai program strategis, KRI Vanimo memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Papua Nugini khususnya melalui kerjasama perbatasan antara Provinsi West Sepik dan Western Province yang merupakan wilayah kerja KRI Vanimo. Proyek-proyek seperti pembangunan Vanimo Urban Fire Station dan Solid Waste Management Facility tidak hanya meningkatkan infrastruktur publik di Provinsi West Sepik Papua Nugini, tetapi juga memperkuat citra positif Indonesia di propinsi dimaksud dan PNG umumnya. Proyek-proyek ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain proyek bantuan hibah Pemerintah Indonesia tersebut juga sebagian besar bahan materialnya diimpor dari Indonesia.

Keberhasilan KRI Vanimo dalam mencapai NCKO ini mencerminkan kinerja yang seimbang di semua perspektif penilaian. Perspektif Stakeholder mencatat skor 93,71%, menunjukkan keberhasilan dalam diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, dan peningkatan hubungan bilateral. Perspektif Customer berhasil mencapai nilai 109,72%, mengindikasikan kepuasan tinggi terhadap layanan konsuler dan perlindungan WNI. Perspektif Internal Business Process mencatat capaian 106,89%, mencerminkan efisiensi tinggi dalam proses internal yang mendukung keberhasilan diplomasi. Perspektif Learning & Growth menunjukkan skor 103,70%, mencerminkan tata kelola organisasi yang optimal dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan komitmen KRI Vanimo terhadap tugas diplomatiknya, tetapi juga memperlihatkan hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 07/B/RO/I/2023/01 Tahun 2023, pencapaian NCKO sebesar 102,03% memberikan KRI Vanimo predikat "Istimewa." Predikat ini menunjukkan bahwa konsulat tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya. Di antara capaian utamanya adalah penyelesaian 85% kasus perlindungan WNI, peningkatan efektivitas implementasi kesepakatan bilateral dengan capaian 119,05%, serta keberhasilan dalam diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dan investasi. Semua ini

memberikan dampak positif bagi hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini dan masyarakat kedua negara.

Dengan pencapaian ini, KRI Vanimo diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Fokus utama akan diarahkan pada penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda, peningkatan kerja sama perdagangan lintas batas, dan optimalisasi diplomasi ekonomi untuk menciptakan peluang kerjasama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perbatasan kedua negara. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas instansi dan penguatan kapasitas internal akan menjadi prioritas guna mendukung diplomasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang lebih terfokus dan target yang realistis. KRI Vanimo diharapkan dapat terus menjadi pilar penting dalam diplomasi Indonesia dalam menggalang kerjasama perbatasan dan wilayah kerja.

IV.2 Kendala-Kendala Utama yang dihadapi

Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo menghadapi beberapa kendala dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama tahun 2024. Salah satunya adalah **keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di wilayah perbatasan**, seperti pengaturan visa di Pos Wutung yang belum optimal dan perlunya peningkatan fasilitas CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Keterbatasan ini memperlambat arus perdagangan lintas batas dan penegakan aturan, terutama di jalur-jalur perbatasan tradisional seperti Keerom-Bewani, yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti perdagangan ilegal dan pelintasan orang secara tidak sah.

Selain itu, **hambatan administratif dan perizinan** menjadi tantangan dalam pelaksanaan kerja sama bilateral. **Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran** juga mempengaruhi kemampuan KRI Vanimo dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif diplomatik secara optimal.

Tantangan geografis dan logistik turut menjadi faktor penghambat, mengingat kondisi geografis Papua Nugini yang sulit diakses serta terbatasnya infrastruktur transportasi.

Secara keseluruhan, kendala dan tantangan tersebut memerlukan strategi mitigasi yang efektif, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan proses administratif, optimalisasi sumber daya, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi untuk memastikan pencapaian target kinerja KRI Vanimo secara optimal.

IV.3. Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja

Berdasarkan informasi yang tersedia, pada tahun 2025, Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo berencana untuk memfokuskan kegiatannya pada

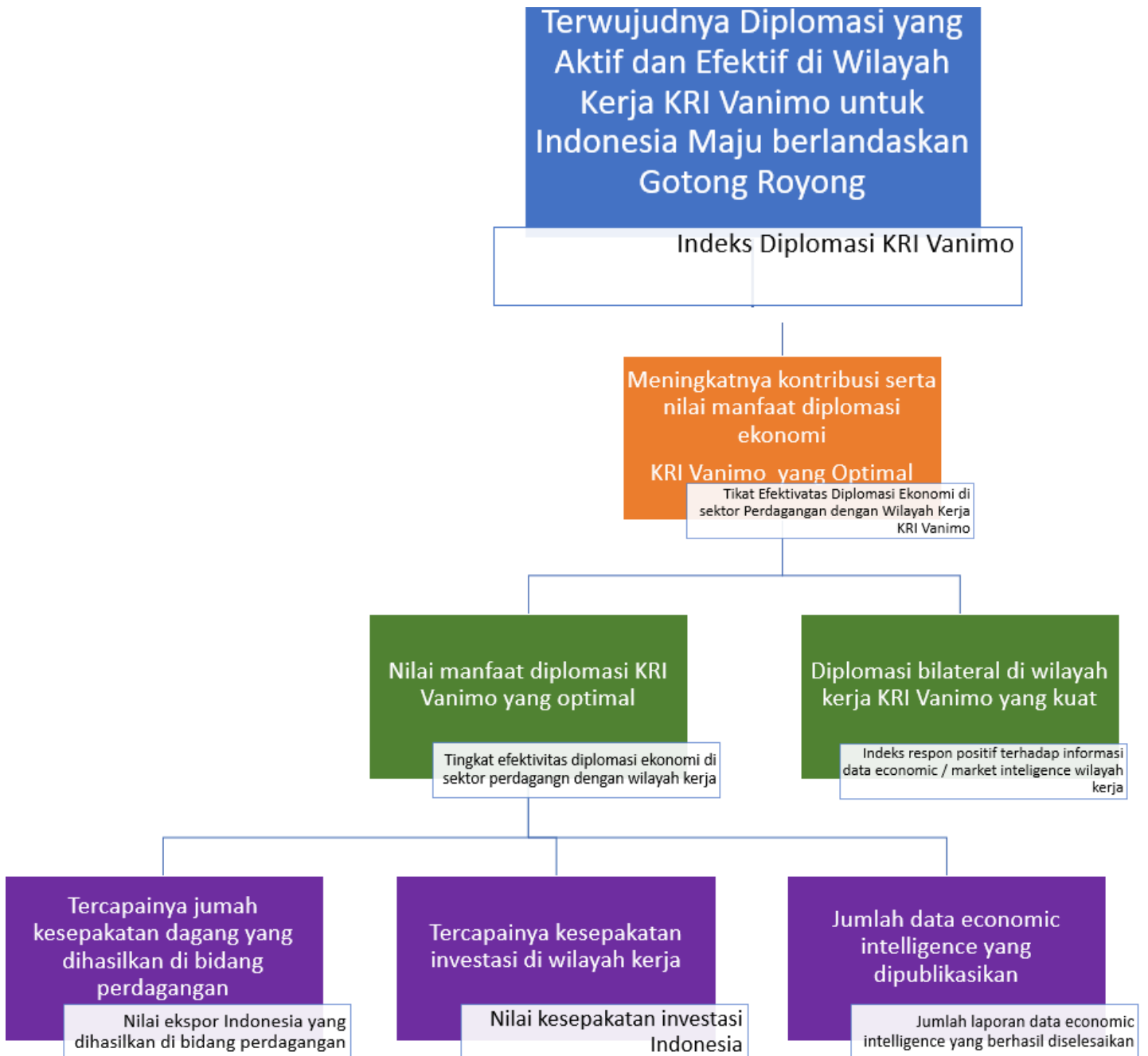
beberapa isu utama guna meningkatkan kinerja dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan serta perlindungan WNI. KRI Vanimo berencana untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan promosi dagang dan business matching antara pelaku usaha Indonesia dan Papua Nugini khususnya perdagangan perbatasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral via perbatasan RI-PNG.

Dalam upaya penyelesaian proyek-proyek hibah infrastruktur, KRI Vanimo akan memastikan bahwa proyek-proyek seperti Fire Station dan Waste Management dapat diselesaikan sesuai rencana dalam kurun waktu tahun 2025. Hal ini termasuk memastikan kelancaran proses administrasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan yang timbul.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, KRI Vanimo berencana untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi, administrasi keuangan dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kapasitas dan penambahan staf, serta penerapan praktik manajemen yang lebih efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Konsulat.

Dengan proyeksi dan langkah-langkah tersebut, diharapkan KRI Vanimo dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun 2025, memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini di wilayah kerja termasuk perbatasan, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

LAMPIRAN POHON KINERJA (1)



LAMPIRAN POHON KINERJA (2)

Terwujudnya Diplomasi yang Aktif dan Efektif di Wilayah Kerja KRI Vanimo untuk Indonesia Maju berlandaskan Gotong Royong

Indeks Diplomasi KRI Vanimo

Dukungan dan komitmen yang kuat atas Diplomasi bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo

Persentase tindak lanjut / implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KRI Vanimo

Meningkatnya kesepakatan bilateral di bidang ekososbud di wilayah kerja KRI Vanimo

Jumlah kesepakatan bilateral di bidang ekososbud dengan wilayah kerja KRI Vanimo

Meningkatnya Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo

Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo

Menyelenggarakan pertemuan koordinasi di bidang ekosobud.

Jumlah pertemuan koordinasi di bidang ekosobud.

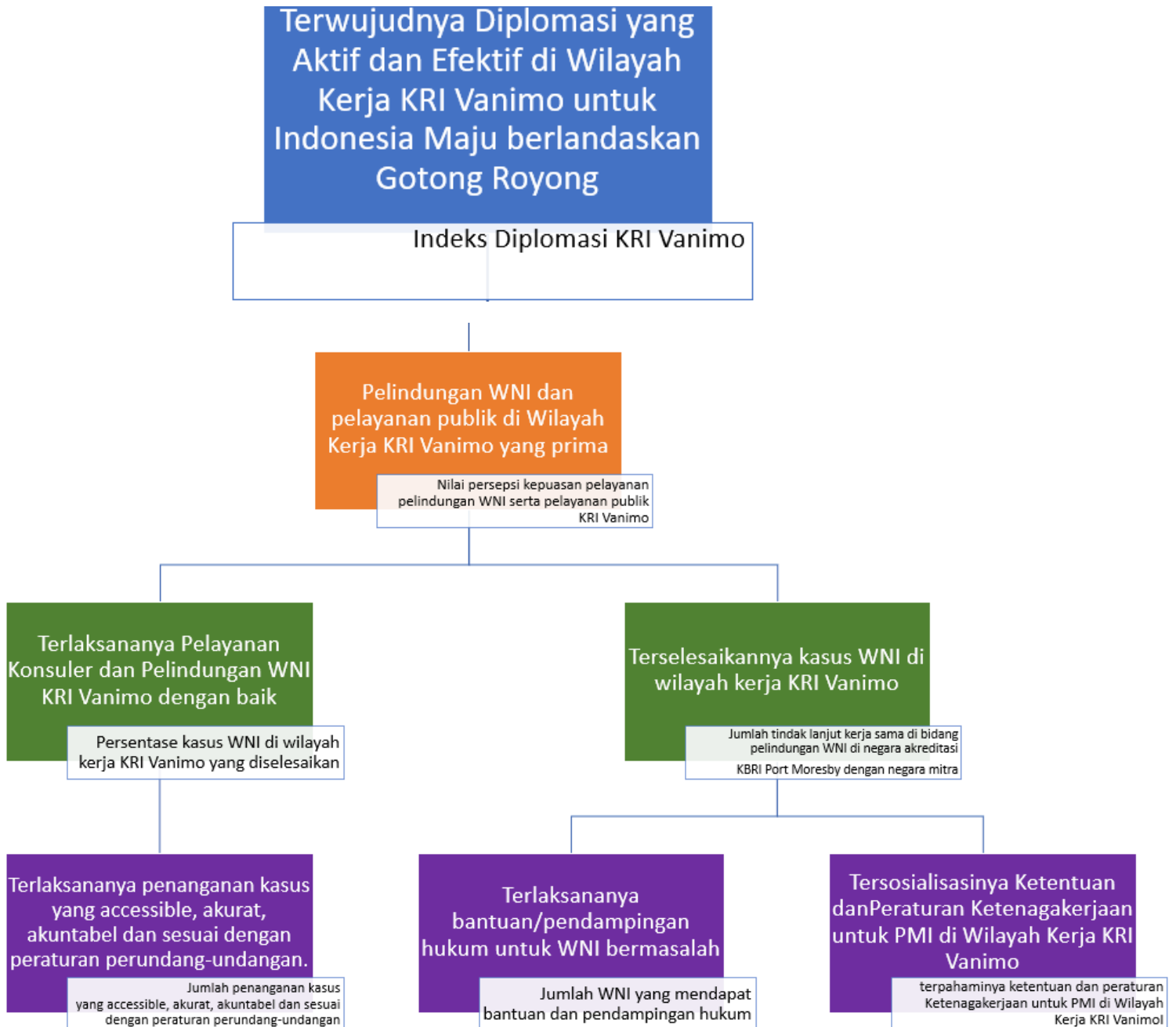
Berpartisipasi dalam pertemuan/ sidang/ konferensi yang membahas isu terkait kerja sama bilateral di bidang ekososbud.

Jumlah pertemuan/ sidang/ konferensi yang membahas isu terkait kerja sama bilateral di bidang ekososbud.

Terlaksananya Pengisian Survey Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo

Indeks respon positif terhadap informasi data economic / market intelligence wilayah kerja KRI Vanimo

LAMPIRAN POHON KINERJA (3)



LAMPIRAN POHON KINERJA (4)

Terwujudnya Diplomasi yang Aktif dan Efektif di Wilayah Kerja KRI Vanimo untuk Indonesia Maju berlandaskan Gotong Royong

Indeks Diplomasi KRI Vanimo

Dukungan Manajemen KRI Vanimo yang kuat

Nilai evaluasi AKIP, IKPA, NKA dan pengelolaan Aset KRI Vanimo

Terpenuhiya Akuntabilitas Kinerja KRI Vanimo yang berkualitas sesuai ketentuan

Peningkatan nilai evaluasi AKIP KRI Vanimo

Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

Terlaksananya pemantauan dan pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang

Kegiatan monitoring kinerja yang terlaksana

Tersusunnya laporan kinerja sesuai dengan standar pedoman

Jumlah laporan kinerja yang tersusun sesuai dengan standar pedoman

Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset KRI Vanimo

Indeks Pengelolaan Aset KRI Vanimo

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana KBRI Port Moresby

Prosentase BMN KRI Vanimo kondisi Baik

Tersedianya SOP dan Standar Pelayanan Minimal pemeliharaan sarana dan prasarana KRI Vanimo

Verifikasi Realisasi SOP

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana

Jumlah BMN yang up to date

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran KRI Vanimo

Nilai Kinerja Anggaran KRI Vanimo

Kepatuhan pelaporan kinerja anggaran periodik secara tepat waktu

Jumlah pelaporan kinerja anggaran periodik yang tersampaikan secara tepat waktu

Terlaksananya verifikasi klaim capaian target kinerja untuk menghasilkan kinerja anggaran yang berkualitas

Kegiatan verifikasi klaim capaian target kinerja yang terlaksana

Terlaksananya Monev Kinerja Anggaran setiap triwulan

Kegiatan monev kinerja anggaran yang terlaksana

MATRIKS RENAKSI

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IK/ Sub IK	Indikator Kinerja	Target IK				Realisasi IK			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
S1	Nilai Manfaat Diplomas Ekonomi KRI Vanimo yang Optimal	S1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KRI Vanimo		49.50%		99.00%		35.00%		84.15%
		S1.1.1	Jumlah komitmen perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo		2		4		1		3
		S1.1.2	Nilai perdagangan dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo		USD 1.350.000		USD 2.700.000				USD 2.848.754
		S1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo		49.50%		99.00%				58.15%
		S1.2.1	Jumlah komitmen investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo		2		4				3
		S1.2.2	Nilai investasi dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo		USD. 900.000		USD 1.700.000				USD 320.000
		S1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo		49.50%		99.00%		4.07%		41.98%
		S1.3.1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari Wilayah Kerja KRI Vanimo ke Indonesia		39.00%		76.54%		0.47%		45.00%
		S1.3.2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari Wilayah Kerja KRI Vanimo ke Indonesia		110 Kunjungan		250 Kunjungan		11,84		6,89
S2	Citra Positif Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Meningkat	S2.1	Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KRI Vanimo	4,07 (Skala 5)	4,07 (Skala 5)	4,07 (Skala 5)	4,07 (Skala 5)	4,28 (Skala 5)	4,39 (Skala 5)	4,39 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)
B1	Diplomasi Bilateral di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang Kuat	B1.1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	1	2	3	4	1	3	3	4
B2	Basis Data KRI Vanimo yang Akurat	B2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Wilayah Kerja KRI Vanimo				80				98
C1	Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KRI Vanimoyang Prima	C1.1	Persentase kasus WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo	84.00%	84.00%	84.00%	84.00%	87%	78.57%	95.71%	103,67%
		C1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
		C1.3	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KRI Vanimo	4	4	4	4	4	4	4	4
B2	Basis Data KRI Vanimo yang Akurat	B2.1	Persentase WNI di Wilayah Kerja KRI Vanimo yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3,74%	3,74%	100.00%
C1	Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KRI Vanimo yang Prima	C1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KRI Vanimo	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
C2	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atau Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KRI Vanimo	C2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KRI Vanimo	25.00%	50.00%	70.00%	84.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
L1	Tata Kelola Organisasi KRI Vanimo yang Baik	L1.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KRI Vanimo				76.90				75.45
L3	Pengelolaan Anggaran KRI Vanimo yang Optimal dan Akuntabel	L3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KRI Vanimo	55	60	65	90	95,36	87,64	87,04	86,79
L2	Pengelolaan Aset KRI Vanimoyang Optimal	L2.1	Indeks Pengelolaan BMN KRI Vanimo				3,20				3,12

MATRIKS RENAKSI

Kode	RO/Komponen>Nama Kegiatan	s.d Target TW IV			s.d Realisasi TW IV			Penggunaan Anggaran
		RO/Komponen		Dukungan SDM (orang)	RO/Komponen		Dukungan SDM (orang)	
		Volume	Anggaran (RKAKL)		Volume	SP2D OMSPAN		
5640.AEC.001	Kerja Sama Bilateral	1			1			
			557,530,000			548,986,108		8,543,892
051	Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan							
A	BOK Keppri		159,000,000	1		158,708,000	1	
052	Representasi							
A	Biaya Representasi Home Staff		20,489,000	6		18,027,866	6	
053	Partisipasi pada Pertemuan Bilateral							
A	BLOM, Joinr Survey/Verifikasi Perbatasan/Special		279,433,000	13		276,762,670	13	
054	Fasilitas Delegasi RI							
A	TANPA SUB KOMPONEN		98,608,000	13		95,487,572	13	
5640.AEH.001	Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata	1			1			
			1,102,706,000			989,215,755		113,490,245
051	Promosi dagang							
A	Indonesia Trade Expo di Jakarta (Potential Buyer Pengusaha		77,538,000	13		76,741,114	13	
052	Bussines forum/bussines matching							
A	BUSINESS MEETING		828,187,000	13		716,507,339	13	
B	Workshop Penguatan Kemitraan Antara KADIN Provinsi			13			13	
057	Representasi							
A	Biaya Representasi Home Staff		6,881,000	6		5,905,302	6	
059	Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan							
A	BOK Keppri		190,100,000	3		190,062,000	3	
				1			1	
5640.AEH.002	Publikasi data economic intelligence	1			1			
			665,725,000			664,984,555		740,445
051	Publikasi data economic intelligence							
A	TANPA SUB KOMPONEN		665,725,000	3		664,984,555	3	
5640.BDD.001	Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja	1			1			
			125,000,000			124,210,767		789,233
051	Kelompok Friends of Indonesia							
A	Forum Komunikasi/ Seminar/ Workshop		49,466,000	13		48,985,046	13	
056	Upacara Kenegaraan							
A	Pelaksanaan Kegiatan Upacara Kenegaraan dan		75,534,000	13		75,225,721	13	
4439.BAA.001	Pelayanan Kekonsuleran di Perwakilan RI	100			100			
			68,075,000			51,324,992		16,750,008
051	Pelayanan dokumen konsuleran							
A	Pelayanan Dokumen Kekonsuleran		68,075,000	13		51,324,992	13	
B	Warung Konsuler di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja			13			13	
4439.QAA.001	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	100			100			
			386,672,000			384,220,970		2,451,030
051	Bantuan pelindungan dan pemulangan WNI bermasalah							
A	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI		386,672,000	13		384,220,970	13	
6023.EBA.994	Layanan Perkantoran	1			1			
			12,932,907,000			12,943,653,261		10,746,261
001	Gaji dan Tunjangan							
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		9,387,429,000	13		9,539,746,805	13	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
A	Penyelenggaraan urusan perkantoran		3,545,478,000	4		3,403,906,456	4	
B	Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan/Tanah			4			4	
6023.EBA.994	Layanan Perkantoran	1			1			
			971,478,000			970,478,644		999,356
001	Gaji dan Tunjangan							
A	TANPA SUB KOMPONEN		971,478,000	13		970,478,644	13	
6023.EBB.951	Layanan Sarana Internal	15			15			
			350,000,000			337,998,167		12,001,833
056	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perwakilan							
A	PERALATAN DAN MESIN		37,458,000	13		35,869,999	13	
057	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan							
			312,542,000			302,128,168		



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA VANIMO



P.O. Box 39 Vanimo, West Sepik Province - Papua New Guinea, Hotline No.
(675) 4571371 / 4571372
Website : vanimo.kemlu.go.id
Email : vanimo.kri@kemlu.go.id